

B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. Pendidikan

a. Prioritas Urusan

Terdapat 3 Program Prioritas Urusan Pendidikan Tahun 2017 di DKI Jakarta (sumber : RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017; halaman 200), yaitu :

- Program Wajib Belajar 12 Tahun (Program 1.01.02).
- Program Peningkatan Mutu Pendidikan (Program 1.01.05).
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Program 1.01.06).

b. Program dan Kegiatan

Program nasional Urusan Pendidikan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 95.43%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.3
Perbandingan Program Nasional dan Daerah Urusan Pendidikan

No	Program	
	Nasional	Provinsi
1.	Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini
2.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
3.	Program Wajib Belajar 12 Tahun	Program Pendidikan Non Formal dan Informal
4.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
5.	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
7.	Tata Kelola Layanan Pendidikan	Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan
8.		Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
9.		Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Pendidikan

No	Program	
	Nasional	Provinsi
10.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Pendidikan
11.		Program Pengembangan Data/Informasi SKPD
	7	11

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Pada tahun anggaran 2017 terdapat 15 program yang dilaksanakan oleh SKPD, UKPD dan UPT Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rincian Program Urusan Pendidikan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	50
2.	Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun	147
3.	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	41
4.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	49
5.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	426
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	226
7.	Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan	9
8.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan	270
9.	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Pendidikan	1
10.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Pendidikan	1
11.	Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Pendidikan	6
	Jumlah	1226

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Dari 1226 kegiatan urusan pendidikan yang dapat direalisasikan sebanyak 1170 kegiatan atau 95.43 %.

Tabel 3.5
Realisasi Program Urusan Pendidikan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	50	40	80.00
2.	Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun	147	146	99.32
3.	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	41	34	80.00
4.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus			

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
5.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	49	48	97.96
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	426	411	96.48
7.	Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan	226	213	80.00
8.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan			
9.	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Pendidikan	9	6	66.67
10.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Pendidikan	270	264	97.78
11.	Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Pendidikan	1	1	100.00
	Total	1226	1170	95.43

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Pencapaian SPM dalam Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Pencapaian SPM Urusan Pendidikan sebagaimana tampak pada Tabel di bawah ini terdapat pencapaian yang melebihi 100 % dikarenakan terdapat siswa yang berasal dari luar daerah.

Tabel 3.6
Indikator SPM Urusan Pendidikan

No.	Indikator SPM	Target 2017		Capaian			
		Volume	Satuan	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan APM						
	a. APK SD	113.4	Persen	104.64	104.82	104.55	103.99
	APM SD	95.36	Persen	95.43	95.54	95.38	96.15
	b. APK SMP	115.5	Persen	118.16	103.9	109.01	108.19
	APM SMP	95.80	Persen	94.66	93.52	95.8	84.79
	c. APK SMA / SMK	97.00	Persen	85.41	86.54	91.36	97.25
	APM SMA/SMK	67.91	Persen	63.53	64.32	67.91	71.87
2.	Jumlah sekolah yang sudah SSN/RSBI/SBI						

No.	Indikator SPM	Target 2017		Capaian			
		Volume	Satuan	2014	2015	2016	2017
	a. SD	0	Sekolah	117	117	-	-
	b. SMP	0	Sekolah	106	106	-	-
	c. SMA	0	Sekolah	15	15	-	-
	d. SMK	0	Sekolah	15	15	-	-
3.	Angka putus sekolah						
	- SD	0	Persen	197	138	2089	982
	- SMP	0	Persen	431	399	1377	1080
	- SMA/SMK	0,05	Persen	1332	1322	3214	3296
4.	Angka kelulusan						
	- SD	100	Persen	100.00	99.32	100.00	100.00
	- SMP	100	Persen	99.40	99.99	99.98	99.99
	- SMA	100	Persen	98.41	99.99	100.00	100.00
	- SMK	100	Persen	98.74	99.98	99.99	100.00
5.	Rata-rata nilai UAN						
	- SD (USBD)	8.00	Rerata	6.79	7.15	7.01	6.00
	- SMP	8.00	Rerata	7.28	7.48	6.23	6.49
	- SMA	8.00	Rerata	7.61	6.94	6.06	6.49
	- SMK	8.00	Rerata	7.35	6.56	6.37	5.68
6.	Rata-rata lama sekolah	11,55 taun	Tahun	10,98 tahun	11,98 tahun	11,58 Tahun	10,88 Tahun
7.	Jumlah sekolah yang mendapat sertifikasi ISO9001:2000						
	- SD	-	Persen	3	5	-	-
	- SMP	-	Persen	11	12	-	-
	- SMA	-	Persen	23	37.73	-	-
	- SMK	-	Persen	31	85.71	-	-
8.	Jumlah Sekolah berstandar Nasional (SSN)						
	- SD	-	Sekolah	109	109	-	-
	- SMP	-	Sekolah	91	91	-	-
	- SMA	-	Sekolah	15	15	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Capaian kinerja lainnya :

- SOP yang sudah dimiliki dalam urusan pendidikan antara lain :
 - SOP Legalisir Ijazah
 - SOP Pengesahan KTSP

- SOP Mutasi Masuk
- SOP Mutasi Keluar
- SOP Penambahan kompetensi keahlian
- SOP Surat Masuk
- SOP tentang tatacara Penerimaan Siswa Baru
- SOP tentang Biaya Operasional Pendidikan
- SOP Ujian Nasional
- SOP tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
- Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI sebanyak 3.417 sedangkan jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI sebanyak 3.509 orang.
- Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS sebanyak 1.218 dari jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS sebanyak 1.265 orang.
- Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA /SMK/MA sebanyak 779 dan jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/M sebanyak 785 orang.
- Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi sebanyak 19.438 dan jumlah Guru jenjang SD/MI sebanyak 20.875 orang.
- Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi sebanyak 11.460 dan Jumlah Guru jenjang SMP/MTS sebanyak 11.975 orang.
- Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi sebanyak 11.731 (SMA = 6462 orang dan SMK = 5269 orang) dan Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 12.763 (SMA = 6892 dan SMK = 5871). Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki peta penjaminan mutu pendidikan.

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan serta UKPD/UPT di bawah dinas tersebut, dengan jumlah pegawai sebanyak 56.242 orang termasuk Guru dari total jumlah pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 72.716. Bahkan jumlah jabatan fungsional terbanyak pun adalah guru yang mencapai 45.016 orang.

Tabel 3.7
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pendidikan

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	3.177	
	• Golongan IV	187	
	• Golongan III	1619	
	• Golongan II	1125	
	• Golongan I	246	
B.	Eselon	33824	
	• Eselon I	0	
	• Eselon II	2	
	• Eselon III	28	
	• Eselon IV	275	
	• Eselon V	-	
	• Fungsional	30308	
	• Staf	3211	
C.	Pendidikan	3.174	
	• S3	2	
	• S2	125	
	• S1	720	
	• Diploma	103	
	• SLTA	1588	
	• SLTP	372	
	• SD	264	

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta, 2017

Dari 301 jabatan struktural yang ada, yang terisi sampai akhir Desember 2017 sebanyak 301 jabatan. Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural
Pelaksana Urusan Pendidikan

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	2	2	2	2	2
2	Eselon III	28	28	28	7	28
3	Eselon IV	275	275	275	44	275
4	Eselon V	301	301	301	112	301
	Jumlah	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 301 / 301 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 112 / 301 = 37,20 %
- Kepangkatan : 301 / 301 = 100,00 %

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Urusan Pendidikan tersebar di SKPD/UKPD tingkat Provinsi maupun Kota dan Kabupaten serta UPT pada Tahun 2017 anggaran urusan pendidikan sebesar Rp 18,208,285,167,195

Tabel 3.9
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN PENDIDIKAN	18,208,285,167,195	16.141.157.875.422	87.99%
1. Belanja tidak langsung	13.115.848.680.840	11.752.174.014.462	90.30%
2. Belanja langsung	5.092.436.486.355	4.388.983.860.960	80.30%
a. Belanja pegawai	163.413.415.478	137.040.119.664	76.78%
b. Belanja barang dan jasa	2.880.559.202.015	2.453.536.166.639	81.31%
Belanja pemeliharaan	502.251.943.476	431.978.887.645	83.87%
c. Belanja modal	2.048.463.868.862	1.798.407.574.657	77.60%
CATATAN PERBANDINGAN :	-	-	-
• Alokasi anggaran urusan : Belanja APBD	18,208,285,167,195	61.821.923.000.480	32.62%
• Belanja modal : belanja urusan	2.048.463.868.862	18,208,285,167,195	5.64%
• Belanja pemeliharaan : belanja barang & jasa	502.251.943.476	2.880.559.202.015	22.71%
• Belanja pemeliharaan : belanja urusan	502.251.943.476	18,208,285,167,195	3.84%

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Pendidikan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.10
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Pendidikan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	2	3	1	3	3	3	3	-	16
2.	Kotak Pengaduan	-	1	1	-	-	-	-	-	2
3.	Media Masa	-	-	-	-	2	-	-	-	2
4.	E-mail	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.	Website	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

- Website : <http://disdikdki.go.id>
- E-mail : disdikprogram@yahoo.com

Jumlah sarana Pendidikan tingkat SD sampai dengan SLTA beserta komponen lainnya yang ada di DKI Jakarta sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11
Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru Tahun 2017

No	Uraian	Tingkatan Sekolah						Jumlah
		TK	SD	SMP	SMA	SMK	PLB	
1	Jml Sekolah	2.141	2.484	1.087	1.040	585	74	7,411
	- Negeri	18	1564	319	180	63	8	2,152
	- Swasta	2123	920	768	860	522	79	5,272
2	Jumlah Siswa	94.081	804.336	358.550	143.772	239.836	5.607	1,646,182
	- Negeri	1.378	575.405	217.462	80.457	73.816	2.203	950,721
	- Swasta	92.703	225.470	141.008	63.265	166.020	2.187	338,312
3	Jumlah Guru	9.933	35.977	17.490	9.954	9.908	723	83,985
	- Negeri	130	23.787	9.485	4.937	2.717	189	41,245
	- Swasta	9.803	12.190	8.005	5.017	7.191	534	31,769

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengelola aset berupa tanah yang terdiri dari :

1) DINAS PENDIDIKAN	:	1
2) PPMS	:	1
3) P2KGK Budi Utomo	:	1
4) P2KGK Jakarta Barat	:	1
5) P2KGK Lenteng Agung	:	1
6) P2KGK Pulogadung	:	1
7) P2KGK Duren Sawit	:	1
8) P3PAUDNI	:	1
9) Gedung TK	:	9
10) Gedung SD	:	1,232
11) Gedung SLTP	:	289
12) Gedung SMA	:	117
13) Gedung SMK	:	63
Jumlah	:	<u>1,718</u>

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Pendidikan sebagian besar merupakan *top down* karena melaksanakan kebijakan-kebijakan Pusat maupun Daerah. Penyusunan perencanaan dilakukan sesuai dengan hirarki perencanaan, yaitu menjabarkan kebijakan pusat (RPJP) dan daerah (RPJMD/RKPD) dan kebutuhan nyata di lapangan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)/rencana kerja (Renja) SKPD. Namun demikian terdapat pula perencanaan yang berasal dari *bottom up*, seperti usulan perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

Tabel 3.12
Sinkronisasi Perencanaan Program Urusan Pendidikan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	8	RENJA SKPD : RKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	8	RKA : RENJA SKPD	100
3	DPA 2017	8	DPA : RKA	100
4	RKPD 2017	8		

h. Permasalahan dan solusi

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta antara lain :

Permasalahan pada Urusan Pendidikan antara lain :

1. Permasalahan di bidang sarana dan prasarana antara lain:
 - a. Jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan di SLB masih kurang mencukupi
 - b. Sarana di SLB dan Inklusi belum mendukung aksesabilitas peserta didik disabilitas
 - c. Kurangnya alat bantu dan media pendidikan bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan SLB
2. Permasalahan bidang PTK antara lain:
 - a. Tempat untuk penyimpanan berkas usulan kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Guru yang sangat terbatas
 - b. Honor untuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru yang tidak diperbolehkan, sehingga sulit untuk menuntut tim penilai menyelesaikan penilaian tepat waktu
 - c. Sangat sulit untuk mendapatkan data guru yang valid
 - d. Masih banyak guru yang mengurus langsung urusan administrasi kepegawaian ke Disdik/ Sudindik, sehingga meninggalkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
 - e. Printer, tinta printer dan kertas yang diberikan masing sangat kurang
 - f. Banyak tugas bid. PTK yang berkaitan dengan menggunggah dan mengunduh data yang size file nya besar tetapi kecepatan internetnya masih kurang memadai
 - g. Banyak surat yang tidak terkait langsung dengan bidang PTK, di-disposisikan ke bidang PTK, misal Penertiban PKL, pemotongan hewan qurban, dugaan pemahalan harga pada proses lelang.

- h. Kurangnya komputer untuk digunakan bekerja
- i. Tidak adanya database kepegawaian
- j. Tidak adanya aplikasi pengolah database kepegawaian yang terintegrasi dari sekolah hingga tingkat Dinas

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Mengikutsertakan guru-guru dalam program pelatihan pengelolaan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di P2KPTK2.
2. Berkoordinasi dengan bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan untuk segera melengkapi sekolah-sekolah untuk penyediaan aksesibilitas peserta didik disabilitas
3. Menyediakan alat bantu dan media pendidikan bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan SLB

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/Peraturan lain yang berkaitan dengan urusan Pendidikan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.13
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Pendidikan

No.	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda / Pergub	Nomor dan Judul Peraturan Daerah/Pergub
1.		Perda No.8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 ttg Honorarium Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS Pada Sekolah Negeri
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 ttg BOP Sekolah Negeri/Madrasah Negeri
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2014 ttg Pedoman Penyusunan RKAS/M
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun	Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2016 ttg

No.	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda / Pergub	Nomor dan Judul Peraturan Daerah/Pergub
	2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	OTK SMKN Mandiri
6	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2016 ttg Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu
7	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 ttg Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui KJP
8	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 246 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 ttg BOP Sekolah Negeri/Madrasan Negeri
9	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 ttg OTK Dinas Pendidikan
10	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 368 Tahun 2016 ttg OTK SLBN
		Peraturan Gubernur Nomor 369 Tahun 2016 ttg OTK PPKPTKK
		Peraturan Gubernur Nomor 370 Tahun 2016 ttg OTK SMPN
		Peraturan Gubernur Nomor 371 Tahun 2016 ttg OTK TKN
		Peraturan Gubernur Nomor 372 Tahun 2016 ttg OTK SDN
		Peraturan Gubernur Nomor 373 Tahun 2016 ttg OTK PPPPAUD dan Dikmas
		Peraturan Gubernur Nomor 374 Tahun 2016 ttg OTK SMPN/SMAN Ragunan
		Peraturan Gubernur Nomor 375 Tahun 2016 ttg OTK PKBMN
		Peraturan Gubernur Nomor 376 Tahun 2016 ttg OTK SMAN
		Peraturan Gubernur Nomor 377 Tahun 2016 ttg OTK SMKN
		Peraturan Gubernur Nomor 378 Tahun 2016 ttg OTK SMANU MHT
		Peraturan Gubernur Nomor 379 Tahun 2016 ttg OTK Pusdatikomdik
		Peraturan Gubernur Nomor 380 Tahun 2016 ttg OTK PPPPOP
		Peraturan Gubernur Nomor 381 Tahun 2016 ttg OTK SMKN Mandiri

Dalam pelayanan masyarakat bidang pendidikan telah dilakukan peningkatan pelayanan, antara lain :

- Sistem penerimaan siswa baru SMA/SMK Negeri menggunakan teknologi informasi dengan sistem *Real Time Online*, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi

DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2005 tentang Sistem PSB SMA/SMK Negeri di Provinsi DKI Jakarta.

- Sistem Administrasi Sekolah (SAS) online
- *Short Masage Service* (SMS) Pelayanan Informasi Pendidikan, yaitu sebagai sarana komunikasi timbal balik antara orang tua siswa dengan sekolah.
- Publikasi berita disdik dengan alamat website disdik.jakarta.go.id
- Radio Pendidikan DKI Jakarta dengan alamat website radiodisdik.caster.fm

Prestasi Daerah di Bidang Pendidikan

Prestasi Provinsi DKI Jakarta di Bidang pendidikan antara lain sebagai berikut.

Tabel 3.14
Prestasi Daerah di Bidang Pendidikan Tahun 2017

No.	Jenis Lomba	Juara
1	Jenjang SMP	
	a. Olimpiade Sains Nasional (OSN)	1,2,3
	b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	1,2,3
	c. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	1
2	Jenjang SMA	
	a. Olimpiade Sains Nasional (OSN)	1,2,3
	b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	1,2,3
	c. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	1
	d. OPSI	
	e. Moscow Academic Competition	1,2,3
3	Jenjang SD	
	Festival/Lomba Literasi /Sinopsis PKLK	1
	OSN /Matematika SD	1
	OSN /Matematika SD	1
	OSN /Matematika SD	1
	OSN /IPA SD	1
	OSN /Matematika SD	2
	OSN /IPA SD	2
	OSN /IPA SD	2
	OSN /Matematika SD	2

No.	Jenis Lomba	Juara
	OSN /Matematika SD	3
	OSN /IPA SD	3
	OSN /IPA SD	3
	OSN /IPA SD	3
	O2SN /Pencak Silat (Pa) SD	1
	O2SN /Pencak Silat (Pi) SD	1
	O2SN /Karate (Pi) SD	1
	O2SN /Renang SD	2
	O2SN /Kids Atletik SD	3
	O2SN /Kids Atletik SD	3
	O2SN /Kids Atletik SD	3
	O2SN /Kids Atletik SD	3
	O2SN /Bulutangkis SD	3
	O2SN /Karate (Pa) SD	3
	Lomba Tata Kelola BOS SD	1
	FLS2N /Baca Puisi SDLB PKLK	1
	FLS2N /Design Grafis SMALB PKLK	1
	FLS2N PKLK /Pantomim SMPLB/SMALB PKLK	1
	FLS2N PKLK /Menyanyi Solo SDLB PKLK	2
	FLS2N PKLK /Melukis SDLB PKLK	2
	FLS2N PKLK /Design Grafis SMPLB PKLK	3
	FLS2N /Pidato Bahasa Indonesia SD	3
	Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI)/Stand Kreatif PKLK	1
	LKSN PKLK/Tata Rias Kecantikan	2

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta, 2017

2. Kesehatan

a. Prioritas Urusan

Capaian Indikator Kinerja Program Unggulan

a) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin :

(Jumlah Kunjungan pasien PBI yang dilayani di Puskesmas / Jumlah Data Kepesertaan PBI Daerah) x 100%

$$10.480.216 / 3.944,858 \times 100\% = 295,67\%$$

- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- Pengembangan Puskesmas Kecamatan menjadi Rawat Inap selain Rumah Bersalin tidak ada lagi karena di DKI telah dibangun RSUD kelas D di beberapa kecamatan .
 - Penambahan kapasitas Tempat Tidur kelas tiga pada RSUD. Presentase kapasitas tempat tidur kelas tiga di RSUD sebanyak 83,40 %.
 - Pelayanan kesehatan masyarakat di pasar – pasar tradisional / rumah susun.
 - Jumlah rumah susun milik pemda yang menyediakan fasilitas layanan kesehatan sebanyak 15 rusun dari target 18 rusun , dan Jumlah pasar yang menyediakan pelayanan kesehatan sebanyak 30 pasar dari target 25 pasar.

- c) Program Pembinaan Upaya Kesehatan
- Pembentukan Kelurahan Siaga Aktif. Persentase capaian Kelurahan Siaga Aktif sebesar 100% dari target sebesar 70 %.

- d) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Penerapan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Kelurahan. Jumlah capaian pada tahun 2017 sebanyak 117 Kelurahan dari target sebanyak 42 Kelurahan.

Pelaksanaan Program Urusan Kesehatan

- a) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
- Pembiayaan Premi Peserta PBI Daerah Sosialisasi dan Promosi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
 - pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuotandan Benefit
 - Validasi dan Rekonsiliasi data Kepesertaan PBI

- Analisa dan Pengembangan Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program JPK di provinsi DKI Jakarta
- b) Program Pembinaan Upaya Kesehatan
- Surveilans penyakit berbasis kematian
 - Analisa dan pengembangan program penyakit kusta
 - Analisa dan pengembangan program penyakit tular vektor dan Zoonotik
 - Analisa dan pengembangan upaya Upaya Kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) serta peningkatan peran serta masyarakat (PPSM)
 - Analisa dan pengembangan pokjanal kelurahan siaga aktif
 - Analisa dan pengembangan penyelenggaraan PHBS dan kemitraan
 - Penyusunan panduan pengembangan pelaksanaan program lansia
 - Pelatihan dokter layanan primer
 - Analisa dan pengembangan media promkes dan model intervensi
 - Promosi kesehatan melalui kampanye ABAT
- c) Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak
- Analisa dan pengembangan program kesehatan maternal dengan komplikasi
 - Penyusunan panduan pelaksanaan kesehatan anak usia sekolah dalam gedung dan luar gedung
 - Analisa dan pengembangan program penatalaksanaan balita gizi kurang
 - penyusunan panduan pengembangan pelaksanaan program kekerasan program kekerasan terhadap anak/perempuan
 - penyusunan panduan pengembangan pelayanan kesehatan bayi dan balita

- analisa dan pengembangan program penyakit pneumonia
 - analisa dan pengembangan program penatalaksanaan balita gizi buruk
 - analisa pengembangan layanan kegawat daruratan maternal neonatal di rumah sakit
- d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- layanan kesehatan di RSUK Pasar Minggu
 - layanan Kesehatan di RSUK Kebayoran baru
 - Pembangunan dan Pengembangan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan di Provinsi DKI jakarta
 - Manajemen Konstruksi pembangunan dan pengembangan gedung Rumah Sakit Umum kelas D di Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
- e) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- Pengembangan pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat
 - pengendalian kualitas air minum
 - pengendalian pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk
 - investigasi rumor KLB/potensial KLB/KLB
 - surveilans penyakit potensial KLB berbasis laboratorium
- f) Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan & Minuman.
- pengembangan dan penggunaan obat generik di puskesmas
 - pengembangan penggunaan obat rasional di puskesmas
 - pemantauan industri rumah tangga pangan

- penyusunan juknis tata kelola obat dan perbekalan kesehatan
 - pengembangan sistem pelaporan narkotika dan psikotropika
 - penyusunan pedoman binwasdal sarana pbf obat jadi dan bahan obat
- g) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
- Penyusunan pedoman penilaian pasca pelatihan
 - penyusunan pedoman magang/praktik lapangan di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - penyusunan pedoman Binwasdal Tenaga Kesehatan
- h) Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana
- Pelaksanaan piket siaga pusat pengendalian dan dukungan kesehatan tingkat Provinsi
 - pelaksanaan layanan kesehatan terkait even nasional dan internasional serta antisipasi kejadian kegawat daruratan
- i) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
- Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa TALI dan IPAL (12 Bulan)
 - Penyediaan BBM KDO?KDO Khusus
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
- j) Program peingkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan
- Pemeliharaan dan pengembangan sistem Manajemen Mutu
 - Survei Kepuasan Pelanggan
 - Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi
- k) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Kesehatan

- Akreditasi Pelatihan
 - Pelatihan Audit Mutu Internal
 - Pelatihan Manajemen Resiko
- l) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD urusan Kesehatan
- Penyusunan dan Sinkronisasi Rencana Kerja
 - Rapat kerja Kesehatan daerah
 - penyusunan rentra Dinas Kesehatan Tahun 2018 - 2022
- m) Program Pengembangan Data/Informasi SKPDS Urusan Kesehatan
- Penyusunan sistem Informaasi Kesehatan daerah
 - Validasi dan Analisa data kesehatan untuk penyusunan profil kesehatanb tingkat provinsi
 - pembayaran hutang kegiatan pengembangan aplikasi SIK Integrasi Tahun 2016

b. Program dan kegiatan

Program Nasional Urusan Kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.15
Perbandingan Program Nasional dan Provinsi
Urusan Kesehatan

No	PROGRAM / KEGIATAN	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	1. Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana. 2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor. 3. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas. 4. Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur 5. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah. 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan 7. Pengembangan Pemberdayaan

No	PROGRAM / KEGIATAN	
	NASIONAL	PROVINSI
		SDM Kesehatan
2	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
3	Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak.	Program Pembinaan Upaya Kesehatan
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
5	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.	Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan & Minuman
Jml	5	11

Sumber : Dinas Kesehatan Prov DKI Jakarta, 2017

Urusan Kesehatan Tahun 2017 sebanyak 13 program dan 135 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.16
Program Urusan Kesehatan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	4
2.	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	10
3.	Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak.	11
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	29
5.	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.	23
6.	Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan & Minuman	4
7.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	1
8.	Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana.	3
9.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan	23
10.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan	16
11.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Urusan Kesehatan	4
12.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan Kesehatan	3
13.	Program Pengembangan Data/informasi SKPD Urusan Kesehatan	4
	Jumlah	135

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Beberapa indikator pencapaian Urusan Kesehatan Tahun 2017 antara lain :

Realisasi Program dan Kegiatan.

Tabel 3.17
Realisasi Program Urusan Kesehatan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	4	4	100 %
2.	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	10	10	100 %
3.	Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak.	11	11	100 %
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	29	29	100 %
5.	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.	23	23	100 %
6.	Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan & Minuman	4	4	100%
7.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	1	1	100 %
8.	Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana.	3	3	100 %
9.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan	23	23	100 %
10.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan	16	16	100%
11.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Urusan Kesehatan	4	4	100%
12.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan Kesehatan	3	3	100%
13.	Program Pengembangan Data/informasi SKPD Urusan Kesehatan	4	4	100%
	Jumlah	135	135	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2017

Indikator SPM

Dihat dari indikator SPM ini, kinerja urusan Kesehatan secara keseluruhan naik.

Tabel 3.18
Indikator SPM Kesehatan

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
		2017	2015	2017

1	Cangkupan Kunjungan Ibu Hamil K4	100	96,99	98,28
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	90	91,06	91,91
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	97,27	98,32
4	Cakupan pelayanan Nifas	100	94,63	97,01
5	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	82	75,99	86,96
6	Cakupan kunjungan bayi	97	98,03	99,59
7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	97	99,62	100
8	Cakupan pelayanan anak balita	94	91,01	94,04
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100	42	82,71
10	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100
11	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	100	94,99	96,05
12	Cakupan peserta KB Aktif	80	77,84	84,16
13	Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk < 15 tahun	>2	>2,27	2.29
14	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia Balita	100	94,99	100
15	Cakupan Penemuan dan Penanganan pasien baru TB BTA Positif	100	76,7	113,83
16	Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita DBD yang ditangani	100	100	100
17	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Diare	100	112,3	122,68
18	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	214	265,67
19	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100
20	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota	100	100	100
21	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	100	100
22	Cakupan Desa Siaga Aktif	70	92	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2017

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Kegiatan pelayanan kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan dan UKPD lainnya, seperti Suku Dinas Kesehatan, Puskesmas dan UPT lainnya, dengan jumlah pegawai (PNS) sebanyak 23286 orang (tidak termasuk RS Cengkareng, RS

Budhi Asih, RS Koja, RS Pasar Rebo, RS Tarakan, RS Duren Sawit, dan RS Pasar Minggu). Adapun komposisi komposisi profesi di Puskesmas sebagai berikut :

Tabel 3.19
Kualifikasi Teknis/Fungsional Pegawai Dinas Kesehatan

NO	KUALIFIKASI	JML
	FUNGSIONAL TERTENTU	2288
1	Dokter	2009
2	Dokter Gigi	559
3	Dokter Spesialis	620
4	Apoteker	217
5	Kesehatan Masyarakat	40
6	Perawat Ahli	361
7	Perawat Terampil	5461
8	Bidan	2379
9	Perawat Gigi	279
10	Asisten Apoteker	990
11	Arsiparis	2
12	Radiografer	162
13	Nutrisionis	362
14	Sanitarian	289
15	Pranata Lab	555
16	Rekam Medis	214
17	Tekhniker gigi	2
18	Fisioterapis	72
19	Elektromedik	38
20	Epidemiolog	13
21	Refraksionis	16

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2017

Tabel 3.20 Rekapitulasi Pegawai Dinas Kesehatan

No.	Kualifikasi	Jml
A.	Golongan	5136
	Gol. IV	647
	Gol. III	3272
	Gol. II	1203
	Gol. I	14
B.	Eselon	5136
	Eselon I	-
	Eselon II	12
	Eselon III	133
	Eselon IV	161
	Eselon V	-
	Fungsional Umum	3352
	Pelaksana	1481

No.	Kualifikasi	Jml
C.	Pendidikan	5136
	S3	-
	S2	372
	S1	1491
	Diploma	1902
	SLTA	1277
	SLTP	93
	SD	1

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2017

Dari jumlah 303 jabatan yang ada, jabatan yang terisi sampai akhir Desember 2017 sebanyak 303 jabatan. Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.21
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural
Pelaksana Urusan Kesehatan

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	12	12	12	9	12
2	Eselon III	133	133	133	89	133
3	Eselon IV	158	158	158	98	158
	Jumlah	303	303	303	196	303

Sumber : Dinas Kesehatan Prov DKI Jakarta, 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : $303 / 303 = 100,00 \%$
- Diklat Kepemimpinan : $196 / 303 = 65 \%$
- Kepangkatan : $303 / 303 = 100,00 \%$

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan dibawah ini termasuk RSUD/RSKD (kecuali RS Kepulauan Seribu), Suku Dinas, Puskesmas dan UPT Kesehatan.

Tabel 3.22
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KESEHATAN			
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.961.665.154.900	1.710.025.950.427	87.17
2. BELANJA LANGSUNG	1.877.631.404.912	1.583.377.863.638	84.33
a. BELANJA PEGAWAI	1.059.316.017.810	908.148.974.303	85,73
b. BELANJA BARANG DAN JASA			
BELANJA PEMELIHARAAN	186.685.552.655	121.971.404.884	65.33
c. BELANJA MODAL	1.400.630.070.488	917.497.779.893	65,51
CATATAN PERBANDINGAN			
• Alokasi Anggaran URUSAN : APBD	1.961.665.154.900	61.821.923.000.480	14,36
• BELANJA MODAL : BELANJA URUSAN	1.400.630.070.488	1.877.631.404.912	17,02
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	186.685.552.655	3.094.109.862.390	5,17
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Urusan	186.685.552.655	1.877.631.404.912	2,45

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Kesehatan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Barang inventaris yang berupa bidang tanah untuk urusan kesehatan sebagian besar digunakan untuk bangunan Puskesmas, baik Puskesmas Kecamatan maupun Kelurahan.

Tabel 3.23
Bidang Tanah Yang Digunakan untuk Pelaksana Urusan Kesehatan

PERUNTUKAN	JUMLAH	NILAI (Rp)	KET
1) Gedung Dinas Kesehatan	4	110.872.055.849.	
2) Gedung Suku Dinas Kesehatan	3	9.351.238.600.	
3) Gedung BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	2	32.537.322.653.	
4) Gedung UP. Jaminan Kesehatan Daerah	1	20.293.444.789.	
5) Gedung BLUD Akademi Keperawatan (AKPER)	1	27.282.010.900.	
6) RSUD Kecamatan	21	91.569.069.120.	
7) Gudang Obat Dinas Kesehatan	1	584.000.000.	
8) Gedung BLUD RS Tarakan	3	202.509.917.321	

PERUNTUKAN	JUMLAH	NILAI (Rp)	KET
9) Gedung BLUD RS Cengkareng	3	123.955.153.125.	
10) Gedung BLUD RS Pasar Rebo	2	97.280.892.250.	
11) Gedung BLUD RS Budhi Asih	2	245.476.280.702.	
12) Gedung BLUD RS Duren Sawit	8	89.146.093.291.	
13) Gedung BLUD RSUD Kepulauan Seribu	1	15.038.273.100.	
14) Gedung BLUD Puskesmas Kecamatan, Puskesmas kelurahan dan Rumah Sakit	33	857.170.730.535.	
15) Gudang AGD	2	121.447.147.188	
Jumlah	87	2.044.513.629.423	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2017

Tabel 3.24
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Kesehatan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JB	JS	JT	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	12	-	17	-	0	3	9	92	133
2.	Kotak Pengaduan	19	-	27	-	1	1	8	129	167
3.	Leaflet	1500	-	43000	-	3000	0	1000	76231	124731
4.	Mobil Keliling	1	-	0	-	0	0	-	15	16
5.	Media Masa	-	-	4	-	0	3	-	27	34
6.	Website	1	-	7	-	1	1	2	22	28
7.	E-mail	1	-	7	-	1	1	11	39	60

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2017

CATATAN PERBBANDINGAN :

- Website : dinkes.jakarta.go.id
- E-mail : datin.dinkesdki@gmail.com
- Call Center : 021 – 34834872

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan kesehatan merupakan perpaduan *top down* dan *bottom up planning*. Proses perencanaan pembangunan di bidang kesehatan melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum Musrenbang. Sebagian urusan kesehatan telah dilimpahkan ke Kelurahan khususnya yang bersifat pembinaan kesehatan.

Tabel 3.25
Sinkronisasi Perencanaan Program Kesehatan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RENJA SKPD 2017	10	RENJA SKPD : RKPD	100
2	RKA 2017	10	RKA : RENJA SKPD	100
3	DPA 2017	10	DPA : RKA	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2017

h. Hasil yang diharapkan

Adapun target outcome yang harus dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesehatan pada tahun 2017 adalah :

- Umur Harapan Hidup tahun 2017 target 76,80 tahun dengan capaian belum dapat diketahui, karena data dari BPS baru akan diterima bulan Mei 2018, Data terakhir UHH Tahun 2016 (data dari BPS Prov DKI Jakarta), 75,80 tahun.
- Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2016 capaian sebesar 92%, capaian tahun 2017 meningkat sebesar 100% dari target sebesar 90%
- Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016 sebesar 53,22/100.000 Kelahiran Hidup, capaian Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2017 41,56/100.000 Kelahiran Hidup. Ini adalah angka perhitungan yang diperoleh dari angka perhitungan kasar jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran, seharusnya diperoleh dari hasil survey
- Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2016 sebesar 4,10/1000 Kelahiran Hidup, tahun 2017 Angka Kelahiran Bayi (AKB) 2,53/1000 Kelahiran Hidup dari target 7,10/1000 Kelahiran hidup. Ini adalah angka perhitungan yang diperoleh dari angka perhitungan kasar jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran, seharusnya diperoleh dari hasil survey.
- Jumlah pasar yang menyediakan pelayanan kesehatan Tahun 2016 sebanyak 27 pasar, tahun 2017 capaian

meningkat sebanyak 30 pasar dari target sebanyak 25 pasar.

- Jumlah rumah susun milik Pemda yang menyediakan fasilitas layanan kesehatan Tahun 2016 sebanyak 18 rumah susun, capaian tahun 2017 menurun sebanyak 16 rumah susun dari target sebanyak 24 rumah susun.
- Persentase kapasitas tempat tidur kelas tiga di RSUD Tahun 2016 sebesar 75%, capaian tahun 2017 meningkat sebesar 83,40 % dari target sebesar 80%.
- Cakupan masyarakat miskin dan rentan ber-KTP DKI Jakarta yang mendapat layanan kesehatan di PPK tingkat I (Puskesmas) sebesar 265,67%.
- Angka Kesakitan akibat penyakit DBD, Tahun 2016 sebesar 198,80/100.000, capaian tahun 2017 32,41/100.000 penduduk dari target sebesar 53 /100.000 penduduk.
- Persentase penemuan kasus – kasus baru TB Paru BTA Positif , Tahun 2016 sebesar 77%, capaian tahun 2017 sebesar 114,94% dari target 96%.
- Persentase cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA, Tahun 2016 sebesar 88%, capaian tahun 2017 meningkat sebesar 100 % dari target sebesar 60%.
- Proporsi jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS, Tahun 2016 sebesar sebesar 81%, capaian tahun 2017 sebesar 67 % dari target sebesar 97%.
- Persentase cakupan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2016 sebesar 99,62%, capaian tahun 2017 sebesar 100% dari target sebesar 100%.
- Jumlah Puskesmas yang melakukan penanganan penyakit tidak menular (PTM) Tahun 2016 sebanyak 44 Puskesmas, capaian tahun 2017 sebesar 44 Puskesmas dari target sebesar 44 Puskesmas.

- Jumlah Kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2016 sebanyak 42 Kelurahan, capaian tahun 2017 meningkat sebanyak 117 Kelurahan dari target sebanyak 30 Kelurahan.
- Persentase obat generik yang digunakan oleh Puskesmas Tahun 2015 sebesar 91,14%, capaian tahun 2017 meningkat sebesar 94% dari target sebesar 91%.
- Persentase obat rasional yang digunakan pada Layanan Kesehatan Pemerintah Tahun 2016 sebesar 96,08%, capaian tahun 2017 meningkat sebesar 95,9% dari target sebesar 80%.
- Jumlah pengujian produk makanan produksi rumah tangga yang beredar di pasaran Tahun 2016 sebanyak 15 item, capaian tahun 2017 sebanyak 15 item dari target sebanyak 15 item.
- Jumlah SDM Kesehatan Non PNS yang memiliki kompetensi Tahun 2016 sebanyak 1480 orang, capaian tahun 2017 meningkat sebanyak 1111 orang dari target sebanyak 1250 orang.
- Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di Puskesmas Tahun 2016 sebesar 57,45%, capaian tahun 2017 sebesar 64 % dari target sebesar 100%.
- Respon time penanganan kesehatan dalam penanggulangan bencana Tahun 2016 sebesar 15 menit, capaian tahun tahun 2017 sebesar 15 menit dari target sebesar 15 menit.

i. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja bidang kesehatan tahun 2017 tidak luput dari adanya berbagai permasalahan dan kendala. Berikut permasalahan berikut permasalahan

dan kendala dimaksud Pada tahun 2017, permasalahan yang ditemukan antara lain :

1. Permasalahan pada isu peningkatan kualitas kesehatan masyarakat antara lain masih rendahnya pengetahuan tentang HIV/AIDs pada penduduk usia 15-24 tahun, yang saat ini baru mencapai 67 % dari target 97%.
2. Angka kematian Ibu masih belum mencapai target, capaian 41,56/100.000 Kelahiran Hidup dari target 30/100.000 Kelahiran hidup.
3. Jumlah rumah susun milik Pemda yang menyediakan fasilitas layanan kesehatan Tahun 2016 sebanyak 18 rumah susun, capaian tahun 2017 meningkat sebanyak 16 rumah susun dari target sebanyak 24 rumah susun

Solusi

Untuk menindaklanjuti permasalahan diatas solusi yang dilakukan adalah :

1. Perlu ditingkatkan sosialisasi, koordinasi lintas sektor terkait dengan Komisi Penanggulangan AIDS (bagaimana pencatatan dan pelaporan, mungkin bisa di fasilitasi oleh Biro Kesos, Setiap lintas sektor terkait harus melakukan Koordinasi: dinas pendidikan, Kanwil Departemen Agama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Pencapaian Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang akurat menunggu hasil survey.
3. Perlu kerjasama dengan pengelola rusun, sumber daya, sarana dan prasarana kurang

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Kesehatan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26
Peraturan Daerah Urusan Kesehatan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda	Nomor dan Judul Peraturan Daerah/Pergub
1.	Peraturan Menteri Kesehatan No 131/Menkes/SK/10/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah
2.	Keputusan Menteri Kesehatan No 1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2011 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten Sehat	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2017 tentang Tim Pembina Kabupaten / Kota sehat
3.	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2011 tentang Eliminasi Malaria
4.	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

j. Prestasi Dinas Kesehatan Tingkat Nasional :

- Lomba Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat Nasional :

Peringkat	Diamond	diperoleh	1 Tim
Peringkat	Platinum	diperoleh	21 Tim
Peringkat	Gold	diperoleh	44 Tim
Peringkat	Silver	diperoleh	2 Tim
- 9 Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Tahun 2017

3. Lingkungan Hidup

Tahun 2017 Program Daerah Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 3.27
Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup

No	Program	Jumlah, Kegiatan
I	Dinas Lingkungan Hidup	374
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	13
2.	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	110
3	Program Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber	20
4.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan	50

No	Program	Jumlah, Kegiatan
	Pekerjaan Umum	
5.	Program Pengelolaan Rumah Dinas Urusan Pekerjaan Umum	7
6.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan Pekerjaan Umum	6
7.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	35
8.	Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	1
9.	Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	12
10.	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	6
11.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup	102
12.	Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Lingkungan Hidup	1
13.	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Lingkungan Hidup	2
14.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup	7
15.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Lingkungan Hidup	2
II	Dinas Kehutanan	327
1.	Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan	12
2.	Program Konservasi Flora dan Fauna	6
3.	Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman	2
4.	Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman	169
5.	Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota	10
6.	Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman	9
7.	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman	9
8.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	97
9.	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas	12
10.	Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah	1

Sumber : Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

a. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Indikator pencapaian kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017 sebagai berikut.

Tabel 3.28
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup

No	Program	Jumlah, Kegiatan	Realisasi	%
----	---------	------------------	-----------	---

No	Program	Jumlah, Kegiatan	Realisasi	%
1.	Dinas Lingkungan Hidup	374	331	88,5
2.	Dinas Kehutanan	327	302	92,35
Jumlah		701	633	90,43

Sumber : Dinas LH, Dinas Kehutanan Prov. DKI Jakarta, 2017

Tabel 3.29 Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup

No	Jenis Pelayanan	Tahun				Keterangan
		2014	2015	2016	2017	
1	Analisa Laboratorium Lingkungan (sampel)	7.075	8.540	10613	12.200	
2	Status Mutu Limbah Cair	4.238	4.337	5180	-	
3	Dok. AMDAL yang diterima	85	127	116	95	
4	Dok. Amdal yang direkomendasi	91	120	159		
5	Dokumen Amdal kegiatan/usaha yang diawasi implementasinya	844	1.143	1.237		

Sumber : Dinas LH Prov. DKI Jakarta, 2017

Hasil kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 lainnya adalah sebagai berikut:

- Hasil pelaksanaan Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor yang dilakukan dari tahun tahun 2013 – 2017 mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.30 Uji Emisi Kendaraan

NO	TAHUN	JUMLAH KENDARAAN	HASIL			
			LULUS	%	TDK LULUS	%
1	2013	3.939	3.361	85	578	15
2	2014	16.720	13.902	83	2.463	17
3	2015	9.600	8.562	89	1.038	11
4	2016	11.551	10.232	89	1.319	11
5	2017	13.575	12.023	89	1.552	11
TOTAL		55.385				

Sumber : Dinas LH Prov. DKI Jakarta, 2017

- Pelaksanaan HBKB

Pelaksanaan Hari Bebas Berkendaraan Bermotor tingkat provinsi dilaksanakan setiap minggu pada jalan Sudirman – MH. Thamrin dan setiap bulan di lima kota administrasi dimana yang menjadi koordinator adalah Dinas Perhubungan. BPLHD Provinsi maupun Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi melaksanakan pengukuran udara dalam rangka pemulihan kualitas udara.

b. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan yang berada di tingkat Provinsi dan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagai berikut :

Tabel 3.31
Rekapitulasi Pegawai

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
I	Dinas LH		
A.	Golongan	1.008	
	1. Golongan IV	63	
	2. Golongan III	422	
	3. Golongan II	475	
	4. Golongan I	48	
B.	Eselon	1.008	
	1. Eselon I	-	
	2. Eselon II	2	
	3. Eselon III	16	
	4. Eselon IV	53	
	5. Fungsional Tertentu	21	Pengendali Dampak Lingkungan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	6. Fungsional Umum	916	
C.	Pendidikan	1.008	
	1. S3	-	
	2. S2	81	
	3. S1	237	

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
	4. Diploma	35	
	5. SLTA	399	
	6. SLTP	144	
	7. SD	112	
II	DINAS KEHUTANAN		
A.	Golongan	688	
	1. Golongan IV	51	
	2. Golongan III	337	
	3. Golongan II	288	
	4. Golongan I	-	
B.	Eselon	688	
	1. Eselon I	-	
	2. Eselon II	1	
	3. Eselon III	12	
	4. Eselon IV	34	
	5. Fungsional Tertentu	-	
	6. Fungsional Umum	1	
C.	Pendidikan	640	
	1. S3	688	
	2. S2	-	
	3. S1	61	
	4. Diploma	190	
	5. SLTA	71	
	6. SLTP	271	
	7. SD	36	

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta, 2017

Dari jumlah 118 jabatan struktural yang ada, jabatan yang terisi sampai akhir Desember 2017 sebanyak 47 jabatan.

Pejabat yang memenuhi persyaratan :

Tabel 3.32
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Lingkungan Hidup

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
A	Dinas Lingkungan Hidup					
1	Eselon II	2	2	2	-	2

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
2	Eselon III	16	16	16	13	16
3	Eselon IV	53	53	53	31	53
		71	71	71	44	71
B	Dinas Kehutanan					
	Eselon II	1	1	1	0	1
	Eselon III	12	12	12	6	12
	Eselon IV	34	34	34	11	34
	Jumlah	47	47	47	17	47

Sumber : Dinas LH dan Dinas Kehutanan Prov. DKI Jakarta, 2017

c. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran untuk tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut

Tabel 3.33
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	106.430.504.663	93.193.399.179	88%
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	79.017.185.750	72.588.144.003	91,86 %
2. BELANJA LANGSUNG	27.413.318.913	20.605.255.176	75%
a. BELANJA PEGAWAI			
b. BELANJA BARANG DAN JASA	26.120.499.185	19.636.035.027	75 %
- Belanja Pemeliharaan	1.463.842.415	869.537.075	59 %
c. BELANJA MODAL	1.292.819.728	969.220.149	75 %
CATATAN :	-	-	-
• Alokasi Anggaran URUSAN : APBD	106.430.504.663		
• Belanja Modal : Belanja URUSAN	1.292.819.728	106.430.504.663	82.32%
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	1.463.842.415	26.120.499.185	17.84%
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	1.463.842.415	106.430.504.663	72.70%

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta (belum)

d. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Lingkungan Hidup tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.34 Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Lingkungan Hidup

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada BPLHD/Kantor LH							JML
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	
A	Dinas LH								
1.	Papan Pengumuman	-	1	1	1	1	1	-	5
2.	Kotak Pengaduan	-	-	-	-	-	2	-	2
3.	Leaflet	-	-	-	-	-	-	1	1
4.	Mobil Keliling	1	-	1	1	-	1	-	4
5.	Media Masa	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Website	1	-	-	-	-	-	-	1
7.	E-mail	1	-	-	-	-	-	-	1
8.	Call Center	1	-	-	-	-	-	-	1
B	Dinas Kehutanan								
1.	Papan Pengumuman	27							27
2.	Kotak Pengaduan	0							0
3.	Leaflet	5							5
4.	Mobil Keliling	-							-
5.	Media Masa	-							-
6.	Website	1							1
7.	E-mail	1							1
8.	Call Center	3							3
9.	Sms center	-							-

Catatan :

Dinas Lingkungan Hidup

- Website : dinaslh@jakarta.go.id
- E-mail : dinaslh@jakarta.go.id
- Call Center : 021-8092744

Dinas Kehutanan :

- Website : www.pertamananpemakaman.go.id
- Email : dki@distama.com
- Call Center : 021 5328454 – 0215367413 - 02158356233

Beberapa sarana dan prasarana lain yang digunakan dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup antara lain :

- i. Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) di 5 Kota Administrasi
- ii. Mobil Station Pemantau Kualitas Udara
- iii. Instalasi Pengolahan Air Limbah
- iv. Peralatan Pengujian laboratorium Udara dan Bising
- v. Laboratorium Kimia Fisika dan Mikrobiologi.

e. Proses perencanaan Pembangunan

Mengingat lingkungan hidup menyangkut perbagai aspek dan institusi, maka perencanaan dalam urusan lingkungan hidup dilakukan secara terintegrasi antara *bottom up*, *top down* dan lintas sektoral melalui forum Musrenbang.

Tabel 3.35 Sinkronisasi Perencanaan Program Lingkungan Hidup

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
A	Dinas LH			
1	RKPD 2017	15	RKPD : RENJA SKPD	100 %
2	RENJA SKPD 2017	15	RENJA SKPD : RKA	100 %
3	RKA 2017	15	RKA : DPA	100 %
4	DPA 2017	15		
B	Dinas Kehutanan			
1	RKPD 2017	10	RENJA SKPD : RKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	10	RKA : RENJA SKPD	100
3	RKA 2017	10	DPA : RKA	100
4	DPA 2017	10		

f. Permasalahan dan solusi

- Masih rendahnya komitmen masyarakat dalam memelihara lingkungan hidup, antara lain tampak dari lingkungan yang kotor, kali penuh dengan sampah dan penggunaan jalur hijau untuk kegiatan usaha atau pemukiman. Untuk itu terus dilakukan sosialisasi dan pendekatan dengan berbagai cara.
- Masih terdapat perusahaan yang kurang memperhatikan AMDAL. Upaya dilakukan dengan pembinaan, pengawasan, penegakkan hukum dan pemberian

penghargaan kepada yang berprestasi.

g. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Lingkungan Hidup yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.36 Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Lingkungan Hidup

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.		Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
		Pergub Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok
		Keputusan Gubernur Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air Serta Baku Mutu Limbah Cair Di Wilayah DKI Jakarta.
		Keputusan Gubernur Nomor 1041 Tahun 2000 tentang Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta.
		Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Emisi dan Perawatan Mobil Penumpang Pribadi di DKI Jakarta.
		Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2005 tentang Pembuatan Sumur Resapan.
		Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Limbah Domestik di DKI Jakarta.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan, pada tahun 2002 Laboratorium Lingkungan BPLHD Provinsi DKI Jakarta telah terakreditasi sebagai laboratorium pengujian berdasarkan SMI 17025:2002 dengan nomor LP – 126 IDN.

4. Pekerjaan Umum

Tabel 3.37
Program dan Jumlah Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

No	Program	Jumlah Kegiatan	Ket
1.	Dinas Bina Marga	269	
	a. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	87	
	b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	99	
	c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	11	
	d. Program Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarana Jaringan Utilitas	1	
	e. Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an	1	
	f. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum	55	
	g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan Pekerjaan Umum	5	
	h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan Pekerjaan Umum	5	
	i. Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Pekerjaan Umum	1	
	j. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi SKPD Urusan Pekerjaan Umum	1	
	k. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan	3	
2.	Dinas Sumber Daya Air	264	
	a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	11	
	b. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih	5	
	c. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir	37	
	d. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase	66	
	e. Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an	4	
	f. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	9	
	g. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum	100	
	h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan Pekerjaan Umum	4	
	i. Program Pengembangan Data/Informasi	4	

No	Program	Jumlah Kegiatan	Ket
	SKPD Urusan Pekerjaan Umum		
	j. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi SKPD Urusan Pekerjaan Umum	2	
	k. Program Pengembangan Sistem Drainase	14	
	l. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Pekerjaan Umum	3	
	JUMLAH	533	

Sumber : Dinas BM, Dinas SDA Tahun 2017

a. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Adapun hasil yang dicapai pada Tahun 2017 antara lain :

Tabel 3.38
Program, Jumlah Kegiatan dan Realisasi
Urusan Pekerjaan Umum

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Dinas Bina Marga	269	258	95.51
2.	Dinas Sumber Daya Air	264	215	81.44
	Jumlah			

Sumber : Dinas BM, Dinas SDA Tahun 2017

Tabel 3.39 Rekapitulasi Pegawai Urusan Pekerjaan Umum

No	Kualifikasi	SKPD (Dinas)		Jumlah
		DTA	DBM	
A.	Golongan	498	371	869
	1. Golongan IV	34	24	58
	2. Golongan III	239	264	503
	3. Golongan II	206	83	289
	4. Golongan I	19	-	19
B.	Eselon	498	371	869
	1. Eselon I	-	-	
	2. Eselon II	1	1	2
	3. Eselon III	15	13	28
	4. Eselon IV	43	38	81
	5. Eselon V	-	-	-
	6. Fungsional	439	319	758
	5. Pelaksana	-	-	-
C.	Pendidikan	498	371	869
	1. S3	1	-	1
	2. S2	51	31	82
	3. S1	149	157	306
	4. Diploma	9	15	24
	5. SLTA	230	147	377
	6. SLTP	39	12	51
	7. SD	19	9	28

Sumber : Dinas BM, Dinas SDA Tahun 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan :

Tabel 3.40
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural
Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Jumlah Pejabat Sesuai		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Dinas Bina Marga	52	50	50	5	50
	1. Eselon II	1	1	1	-	1
	2. Eselon III	13	12	12	1	12
	3. Eselon IV	38	37	37	4	37
2	Dinas Sumber Daya Air	59	59	59	17	47
	1. Eselon II	1	1	1	-	1
	2. Eselon III	15	15	15	3	11
	3. Eselon IV	43	43	43	14	35

Sumber : Dinas BM, Dinas SDA Tahun 2017

b. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi dan anggaran Urusan Pekerjaan Umum tersebar pada beberapa SKPD sebagai berikut.

Tabel 3.41
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan PU

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
URUSAN PEKERJAAN UMUM	9,697,960,178,858	5,346,638,598,165	55.13%
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	259,457,153,406	251,352,695,339	96.88%
2. BELANJA LANGSUNG	9,438,503,025,452	5,095,285,902,826	53.98%
a. BELANJA PEGAWAI	43,815,127,500	27,036,215,210	61.71%
b. BELANJA BARANG DAN JASA	2,262,636,906,987	1,280,826,245,294	56.61%
- Belanja Pemeliharaan	1,945,824,761,106	1,169,658,486,733	60.11%
c. BELANJA MODAL	7,132,050,990,965	3,787,423,442,322	53.10%
CATATAN PERBANDINGAN :	-	-	#DIV/0!
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	9,697,960,178,858	59,685,552,609,233	
• Belanja Modal : Belanja URUSAN	7,132,050,990,965	9,697,960,178,858	
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang&Jas	1,945,824,761,106	2,262,636,906,987	
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	1,945,824,761,106	9,697,960,178,858	

Sumber : LKPD 2017 *unaudited*, BPKD Prov. DKI Jakarta

Anggaran tersebut merupakan gabungan dari anggaran 3 SKPD sebagai berikut.

Tabel 3.42
Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada SKPD Urusan PU

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A. DINAS BINA MARGA	4,076,463,583,091	3,309,732,783,972	81,19%
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	125,183,660,500	114,767,396,191	91,68%
2. BELANJA LANGSUNG	3,951,279,922,591	3,194,965,387,781	80,86%
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	-
b. BELANJA BARANG DAN JASA	1,359,727,554,558	1,197,743,449,741	88,09%
- Belanja Pemeliharaan	1,292,651,504,331	1,151,478,204,094	89,08%
c. BELANJA MODAL	2,591,552,368,033	1,997,221,938,040	77,07%
CATATAN PERBANDINGAN :	-	-	-
• Alokasi Anggaran SKPD : Belanja APBD	4.076.463.583.091		
• Belanja Modal : Belanja SKPD	3,920,849,236,861	4,670,421,808,961	
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	1,037,204,821,827	1,080,554,505,796	
• Belanja Pemeliharaan : Belanja SKPD	1,037,204,821,827	4,670,421,808,961	
B. DINAS SDA			
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.319.553.987.392,00	1.467.597.296.334,00	63.27
2. BELANJA LANGSUNG	152.779.295.600,00	137.851.820.743,00	90.23
a. BELANJA PEGAWAI	2.166.774.691.792,00	1.329.745.475.591,00	61.37
b. BELANJA BARANG DAN JASA	304.153.800,00	257.699.418,00	84.73
- Belanja Pemeliharaan	681.194.256.094,00	486.832.832.912,00	71.47
c. BELANJA MODAL	356.857.338.205,00	229.899.930.021,00	64.42
CATATAN PERBANDINGAN :			
• Alokasi Anggaran SKPD : Belanja			
• Belanja Modal : Belanja SKPD	82.27 %	86.65 %	
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	59.55 %	41.53 %	
• Belanja Pemeliharaan : Belanja SKPD	7.36 %	2.08 %	

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

c. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Perumahan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk

sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.43
Jenis dan Jumlah Fasilitas / Prasarana Informasi

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas		JML
		DBM	DSDA	
1.	Papan Pengumuman	1	-	1
2.	Kotak Pengaduan	-	-	-
3.	Leaflet	-	-	-
4.	Mobil Keliling	-	-	-
5.	Media Masa	3	4	7
6.	Website	1	1	2
7.	E-mail	1	2	3
8.	Call Center	1	1	2
9	Sms center	-	-	-

Sumber : Dinas BM, Dinas SDA Tahun 2017

Catatan :

a. Dinas Bina Marga :

- Email : binamargadkijakarta@gmail.com
- Call Center : 3844444

b. Dinas Sumber Daya Air :

- Website : sumberdayaaair.jakarta.go.id
- Email : sumberdayaaair.jakarta@gmail.com,
sumberdayaaair@jakarta.go.id
- Call Center : 021 3843250
- Media massa :
- Twitter : @DinasSDAJakarta
- Facebook : Dinas Sumber Daya Air Provinsi.DKI Jakarta
- Instagram : @dinas_sda
- Youtube : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Jakarta

d. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan Urusan Pekerjaan Umum lebih kepada usulan masyarakat melalui forum Musrenbang (*bottom up*), karena merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Tabel 3.44
Sinkronisasi Perencanaan Program Pekerjaan Umum

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
A.	Dinas Bina Marga			
1	RKPD 2017	10	RENJA SKPD : RKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	10	RKA : RENJA SKPD	100
3	RKA 2017	10	DPA : RKA	100

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
4	DPA 2017	11		
B.	Dinas SDA			
1	RKPD 2017	12	RENJA SKPD : RKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	12	RKA : RENJA SKPD	100
3	RKA 2017	12	DPA : RKA	100
4	DPA 2017	12		

Sumber : Dinas BM, Dinas SDA Tahun 2017

5. Penataan Ruang

a. Prioritas Urusan

- Program perencanaan tata ruang
- Program pemanfaatan ruang
- Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan
- Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
- Program Pemberdayaan komunitas penyelenggara bangunan gedung
- Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang

b. Program dan Kegiatan

Program Provinsi untuk Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 program dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.45 Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi Urusan Penataan Ruang

No	Program Nasional	Provinsi
1	Program Penataan Ruang	Program perencanaan tata ruang
		Program pemanfaatan ruang
		Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan
		Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
		Program Pemberdayaan komunitas penyelenggara bangunan gedung
		Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang
Jml	1	6

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2017

Program Urusan Penataan Ruang tahun 2017 berjumlah 7 program dengan 32 kegiatan administrasi maupun operasional.

Tabel 3.46
Program Urusan Penataan Ruang

No	Program	Jumlah Kegiatan
1	Program Perencanaan Tata Ruang	3
2	Program Pemanfaatan Ruang	3
3	Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan	3
4	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang	1
5	Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang	2
6	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penataan Ruang	19
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1
Jumlah		32

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Pencapaian kinerja kegiatan urusan penataan ruang Tahun 2017 sebesar 82,08% dari rencana kegiatan.

Tabel 3.47
Program Urusan Penataan Ruang Tahun 2017

No	Program	Jumlah		
		Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Perencanaan Tata Ruang	1.983.257.000	1.680.162.000	84,72
2	Program Pemanfaatan Ruang	470.231.500	44.800.000	9,53
3	Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan	123.200.000	117.600.000	95,45
4	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang	5.565.080.600	4.553.297.516	81,82

No	Program	Jumlah		
		Kegiatan	Realisasi	%
5	Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang	194.682.083	193.318.620	99,30
6	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	575.239.500	467.457.141	81,26
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.033.587.400	13.501.998.518	84,21
Jumlah		23.127.021.083	18.983.471.795	82,08

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2017

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Sebagai Dinas Teknis yang mengemban tugas pokok dalam melaksanakan perencanaan dan evaluasi ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung pemerintah daerah serta perencanaan pertanahan, termasuk memberikan pelayanan Informasi Rencana Tata Ruang, Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan tersebut diantaranya adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana penunjang serta SDM yang berkualitas. Sumber daya manusia Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta merupakan penggabungan dari SDM eks DP2B dan eks DTR. Pada tahun 2017, jumlah seluruh aparatur Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan (Urusan Penataan Ruang) adalah sebanyak 534 orang.

Gambaran kondisi SDM secara rinci berdasarkan Golongan, Jabatan serta tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.48
Rekapitulasi Pegawai Urusan Penataan Ruang

N0	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Golongan	534	
	1 Golongan IV	39	
	2 Golongan III	409	
	3 Golongan II	85	
	4 Golongan I	1	
2	Eselon	534	
	1 Eselon I	0	
	2 Eseln II	1	
	3 Eselon III	12	
	4 Eselon IV	81	
	5 Eselon V	0	
	6 Fungsional	0	
	7 Pelaksana (Staf)	440	
3	Pendidikan	534	
	1 S3	0	
	2 S2	52	
	3 S1	246	
	4 Diploma	35	
	5 SLTA	196	
	6 SLTP	2	
	7 SD	3	

Sumber : BKD Prov.DKI Jakarta Tahun 2017

Dari 94 jabatan struktural yang ada, sampai akhir desember 2017 terisi seluruhnya sebanyak 94 jabatan. Gambaran jabatan struktural yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.49
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksanaan Urusan Penataan Ruang

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan Yang Terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1	0	1
2	Eselon III	12	12	12	8	12
3	Eselon IV	81	81	80	51	81
Jumlah		94	94	93	59	94

Sumber : Dinas Penataan Kota Prov.DKI Jakarta, 2017

Rekapitulasi kesesuaian jabatan dengan

Tingkat Pendidikan : 93 / 94 = 98,93 %

Diklat Kepemimpinan : 59 / 94 = 62,77 %

Kepangkatan : 94 / 94 = 100,00 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Penataan Ruang pada Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 225.390.047.583 tetapi yang terserap sebesar Rp. 205.704.099.469 (91,27%) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.50
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Penataan Ruang Prov. DKI Jakarta

Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN PENATAAN RUANG	225.390.047.583	205.704.099.469	91,27
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	202.263.026.500	186.720.627.674	92,32
2. BELANJA LANGSUNG	23.127.021.083	18.983.471.795	82,08
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	-
b. BELANJA BARANG DAN JASA	21.932.188.389	17.845.444.134	81,37
- Belanja Pemeliharaan	1.732.932.825	1.287.518.100	74,30
c. BELANJA MODAL	1.194.832.694	1.138.027.661	95,25
CATATAN PERBANDINGAN : PERBANDINGAN			
Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	225.390.047.583	61.821.923.000.480	0,36
BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	1.194.832.694	225.390.047.583	0,53
Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	1.732.932.825	21.932.188.389	7,90
Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	1.732.932.825	225.390.047.583	0,77

Sumber : LKPD 2017 unreviewed, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Penataan Ruang tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.51
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Dinas Tata Ruang

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin							Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1	7
2.	Kotak Pengaduan								
3.	Leaflet	1							1
4.	Mobil Keliling								
5.	Media Masa								
6.	Website	1							1
7.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	7
8.	Call Center								
9.	Galery	1							1

Catatan Perbandingan :

Website : <http://dcktrp.jakarta.go.id>

E-mail : dinas_cktrp@jakarta.go.id

Beberapa Sarana dan prasarana untuk melaksanakan operasional Urusan penataan ruang yang ada di Dinas Penataan Kota antara lain adalah :

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| a. GPS | b. Server |
| c. Total Station | d. Software Autocad & Arcgis |
| e. Distometer | f. Mobil Tangga |
| g. Printer/Plotter/PC | h. KDO Lapangan |
| i. Theodolite | j. Eskavator |
| k. Dumptruck | |

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan tahapan perencanaan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta. perencananan merupakan gabungan dari *top down* dan *bottom up planning* melalui proses Musrenbang.

Tabel 3.52
Sinkronisasi Perencanaan Program Tata Ruang

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	7	RKPD : RENJA SKPD	90
2	RENJA SKPD 2017	7	RENJA SKPD : RKA	78
3	RKA 2017	7	RKA : DPA	100
4	DPA 2017	7		

h. Permasalahan dan solusi

- Belum optimalnya pelaksanaan tugas pengawasan dan penertiban ruang dan bangunan sehingga masih banyak pengaduan masyarakat dan pelanggaran ruang dan bangunan di lapangan
- Terbatasnya SDM Bidang Perencanaan sehingga masih banyak peraturan terkait perencanaan yang belum berhasil disusun
- Belum maksimalnya penggunaan sistem informasi sehingga kegiatan perencanaan dan evaluasi rencana tata ruang belum optimal.

Solusi yang ditempuh :

- Pembinaan SDM dan pembuatan/pengembangan aplikasi pengawasan dan penertiban bangunan gedung.
- Pelibatan Narasumber/tenaga ahli dan akademisi dalam penyusunan peraturan penataan ruang.
- Mengoptimalkan SDM yang ada
- Mengirim SDM Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan GIS dan pengembangan teknologi informasi.

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

- Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Penataan Ruang yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut:
 - a) UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan
 - b) UU No.28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung
 - c) UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan
 - d) UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - e) UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025
 - f) UU No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
 - g) UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - h) UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- i) UU No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Prov.DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI
- j) UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan
- k) PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional
- l) Perpres 54/2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak Dan Cianjur
- m) PP 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- SOP yang dimiliki Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Urusan Penataan Ruang Yaitu :
 - a) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota :
 - Pengukuran dan Pematokan untuk perencanaan
 - b) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Struktur Ruang :
 - Penerbitan Rekomendasi Teknis Rencana Tata Letak Bangunan Menara Telekomunikasi
 - Rekomendasi Trase atau Penetapan Lokasi
 - c) Bidang Pengawasan Bangunan
 - Pemeriksaan Lapangan Pelaksanaan Pembangunan
 - Pelaksanaan Patroli Dinas
 - Pemeriksaan Lapangan Awal
 - Pemeriksaan Lapangan dan Penilaian Berkas Survey Rutin
 - Pemeriksaan Lapangan dan Penilaian Berkas Permohonan SLF
 - Pemeriksaan Lapangan dan Penilaian Berkas Survey Insidentil
 - d) Bidang Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang:
 - Pengenaan Sanksi Adminitrasi Pelaksanaan Pembangunan
 - Pengenaan Sanksi Adminitrasi Pemanfaatan Pembangunan
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Perda yang menjadi dasar penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah DKI Jakarta dan kemudian direvisi menjadi Perda 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan

- Ruang terbuka hijau yang direncanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2030 seluas $\pm$ 21,778,03 Ha (32,36%), dari luas wilayah Provinsi DKI Jakarta seluas $\pm$ 65.364,28 Ha.
- Komposisi rencana penggunaan tanah di DKI Jakarta berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR & PZ sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.53 Komposisi Rencana Penggunaan Tanah

NO	PENGUNAAN	LUAS (Ha)	%
1	Sub Zona Terbuka Biru	6.810,61	10,57%
2	Sub Zona Campuran	1.862,36	2,89%
3	Sub Zona Pergudangan	269,90	0,42%
4	Sub Zona Hutan Kota	17,11	0,03%
5	Sub Zona Taman Kota/Lingkungan	1.550,03	2,40%
6	Sub Zona Pemakaman	589,23	0,91%
7	Sub Zona Jalur Hijau	3.669,49	5,69%
8	Sub Zona Hijau Tegangan Tinggi	426,59	0,66%
9	Sub Zona Hijau Pengamanan Jalur KA	293,61	0,46%
10	Sub Zona Hijau Rekreasi	643,73	1,00%
11	Sub Zona Industri	3.922,05	6,08%
12	Sub Zona Perkantoran	3.320,53	5,15%
13	Sub Zona Perdagangan dan Jasa	808,89	1,25%
14	Sub Zona Perkantoran KDB Rendah	1.699,03	2,64%
15	Sub Zona Perdagangan dan Jasa KDB Rendah	105,73	0,16%
16	Sub Zona Suaka dan Pelestarian Alam	371,81	0,58%
17	Sub Zona Pemerintahan Nasional	1.264,84	1,96%
18	Sub Zona Perwakilan Negara Asing	26,42	0,04%
19	Sub Zona Pemerintah Daerah	248,98	0,39%
20	Sub Zona Rumah Kampung	34,25	0,05%
21	Sub Zona Rumah Vertikal KDB Rendah	299,54	0,46%
22	Sub Zona Rumah Sangat Kecil	0,22	0,00%
23	Sub Zona Rumah Kecil	1.349,46	2,09%
24	Sub Zona Rumah Sedang	11.291,09	17,52%
25	Sub Zona Rumah Besar	5.198,24	8,06%
26	Sub Zona Flat	901,42	1,40%
27	Sub Zona Rumah Susun	871,85	1,35%
28	Sub Zona Rumah Susun Umum	346,32	0,54%
29	Sub Zona Rumah KDB Rendah	3.968,83	6,16%
30	Sub Zona Sarana Pendidikan	1.339,18	2,08%

NO	PENGUNAAN	LUAS (Ha)	%
31	Sub Zona Sarana Kesehatan	232,97	0,36%
32	Sub Zona Sarana Ibadah	203,17	0,32%
33	Sub Zona Sarana Sosial Budaya	47,96	0,07%
34	Sub Zona Sarana Rekreasi dan Olahraga	129,28	0,20%
35	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum	630,23	0,98%
36	Sub Zona Sarana Terminal	148,13	0,23%
37	Prasarana Jalan	9.564,94	14,84%
	Total	64.458,00	100,00 %

6. Perencanaan Pembangunan

a. Prioritas Urusan

- Penyusunan kerangka regulasi dan kelembagaan serta pembiayaan perencanaan pembangunan.
- Peningkatan efisiensi pemanfaatan dana publik untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- Meningkatnya kualitas proses perencanaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.
- Terimplementasikannya prinsip - prinsip *good governance*.

b. Program dan kegiatan

Program Provinsi untuk Urusan Perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 6 (enam) program dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.54 Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi Urusan Penataan Ruang

No	Program Nasional	Provinsi
1	Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Perencanaan Pembangunan Perekonomian
2	Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
3	Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur	Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur

No	Program Nasional	Provinsi
4	Peningkatan kapasitas perencana dan kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kapasitas perencana dan kualitas perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan	Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan
6	Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup	Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
Jml	6	6

Sumber : Bappeda, 2017

Program Provinsi untuk Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 6 (enam) program dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.55
Program Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Perencanaan Pembangunan Perekonomian	7
2.	Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	8
3.	Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur	7
4.	Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup	9
5.	Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	2
6.	Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan	26
7.	Peningkatan Kemampuan IPTEK dan Inovasi	1
Jumlah		60

Sumber : Bappeda, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Pelaksanaan dan pencapaian hasil kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.56
Realisasi Program Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Perencanaan Pembangunan Perekonomian	4	4	100.00

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
2.	Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	4	4	100.00
3.	Perencanaan Pembangunan Tatapraaja dan Aparatur	3	3	100.00
4.	Peningkatan kapasitas perencanaan dan kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	100.00
5.	Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan	16	16	100.00
6.	Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup	4	4	100.00
Jumlah		32	32	100.00

Sumber : Bappeda Prov DKI Jakarta, 2017

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Perencanaan Pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2010. Di Kota/Kabupaten Administrasi juga dibentuk Kantor Perencanaan Pembangunan Kota (Kanppeko) dan Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Kanppekab).

Tabel 3.57
Rekapitulasi Pegawai Bappeda, Kanppeko dan Kanppekab
Pelaksana Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	207	
	1. Golongan IV	36	
	2. Golongan III	162	
	3. Golongan II	8	
	4. Golongan I	1	
B.	Eselon	207	
	1. Eselon I	-	
	2. Eselon II	2	
	3. Eselon III	14	
	4. Eselon IV	45	
	5. Eselon V	-	
	6. Fungsional	6	
	7. Pelaksana (Staf)	140	
C.	Pendidikan	207	

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
	1. S3	1	
	2. S2	61	
	3. S1	107	
	4. Diploma	6	
	5. SLTA	30	
	6. SLTP	1	
	7. SD	1	

Sumber : BKD Prov.DKI Jakarta Tahun 2017

Dari 71 jabatan struktural yang ada, yang terisi sampai akhir Desember 2017 sebanyak 71 jabatan. Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.58
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Bappeda

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	2	2	2	1	1
2	Eselon III	14	14	14	14	14
3	Eselon IV	55	55	55	41	55
Jumlah		71	71	71	71	71

Sumber : Bappeda Prov DKI Jakarta, 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 71 / 71 = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : 71 / 3 = 4,22 %
- Kepangkatan : 71 / 3 = 4,22 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran urusan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.59
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perencanaan Pembangunan

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	114.970.302.299	89.746.647.451	78,06
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	100.789.533.925	81.944.967.245	81,30
2. BELANJA LANGSUNG	14.180.768.374	7.600.804.197	53,60
a. BELANJA PEGAWAI	100.789.533.925	81.944.967.245	81,30

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
b. BELANJA BARANG DAN JASA	14.180.768.374	7.600.804.197	53,60
- Belanja Pemeliharaan	105.941.000	76.098.500	71,83
c. BELANJA MODAL	227.260.950	185.163.000	81,47
CATATAN PERBANDINGAN :			
Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	114.970.302.299	62.910.038.315.366	
Belanja Modal : Belanja URUSAN	227.260.950	114.970.302.299	
Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	105.941.000	14.180.768.374	
Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	105.941.000	114.970.302.299	

Sumber : Bappeda Prov. DKI Jakarta 2017

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Perencanaan Pembangunan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.60
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Perencanaan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah pada Bappeda/Kanppeko/Kanppekab							Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1	7
2.	Kota Pengaduan	1	-	-	-	-	-	-	1
3.	Website	2	1	-	1	-	-	1	5
4.	E-mail	8	1	1	1	1	1	1	14
5.	Call Center	3	-	-	-	-	-	-	3

Sumber : Bappeda Prov DKI Jakarta, 2017

Catatan :

- Website :
<http://www.bappedajakarta.go.id/>
<http://www.bapedadki.net/>
<http://kanppeko-jakpus.com/>
<http://kanppeko-jakpus.com/>
<http://perencanaanjaktim.org/>
<http://kanppekabseribu.com/>
- E-mail :
Bappeda
bidang.kesejahteraan.rakyat@bapedadki.net
bidang.ekonomi@bapedadki.net

bidang.pemerintahan@bapedadki.net
bidang.psklh@bapedadki.net
bidang.ppp@bapedadki.net
bidang.p4@bapeddki.net
bidang.litbang@bapedadki.net
sekretariat@bapedadki.net
Subanppeko/kab
kanppeko.pusat@bapedadki.net
kanppeko.utara@bapedadki.net
kanppeko.barat@bapedadki.net
kanppeko.selatan@bapedadki.net
kanppeko.timur@bapedadki.net
kanppekab.kep.seribu@bapedadki.net

- Call Center :
021 - 3842061
021 - 3842062
021 - 3842871

Dalam mendukung kelancanaan pelaksanaan tugas sehari-hari Bappeda Provinsi DKI Jakarta didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai antara lain Komputer 54 buah, printer 38 buah, LCD Proyektor 27 buah, dan kendaraan roda empat 12 buah.

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dilakukan secara bertahap mulai dari Rembug RW sampai Musrenbang Provinsi. Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dimaksudkan untuk mengakomodir usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat (bottom up), yang kemudian diseleksi sesuai dengan urgensi (prioritas) dan alokasi anggaran. Usulan masyarakat tersebut dapat dimasukkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan, Kelurahan, SKPD Kota/Kabupaten dan SKPD Provinsi sesuai dengan besaran kewenangannya.

Musrenbang Kota dan Provinsi bertujuan untuk mensinkronkan usulan kegiatan dari setiap SKPD

dengan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RAPBD dan pertimbangan lainnya.

Tabel 3.61
Sinkronisasi Perencanaan Program Perencanaan Pembangunan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	6	RENJA SKPD : RKPD	>100
2	RENJA SKPD 2017	6	RKA : RENJA SKPD	100
3	RKA 2017	6	DPA : RKA	100
4	DPA 2017	6		

Sumber : Bappeda Prov DKI Jakarta, 2017

h. Permasalahan yang dihadapi antara lain

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI mendapat predikat B dengan nilai 60,13. Penilaian SAKIP memiliki lima komponen penelitian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Dari 5 komponen tersebut, Bappeda memiliki peranan besar terhadap 3 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan capaian kinerja. Sehingga masih rendahnya predikat B mengindikasikan ada permasalahan pada penyelenggaraan urusan fungsi penunjang pemerintahan perencanaan pembangunan. Setelah dilakukan evaluasi internal, berikut adalah permasalahan yang dihadapi Bappeda:

1. Belum lengkapnya Standard Operating Procedure (SOP) untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang efektif serta efisien.
2. Belum optimalnya pengelolaan data informasi pembangunan yang tersusun secara sistematis, terintegrasi dan akurat, sebagai landasan terciptanya integrasi sistem pengendalian, monitoring dan

evaluasi dan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang.

3. Penempatan pegawai yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajibannya belum terdistribusi secara baik dan masih kurang jumlahnya.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut upaya solusi yang dilakukan Bappeda antara lain:

1. Menyusun SOP untuk proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Membangun sistem yang diperlukan untuk proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan guna transparansi dan kemudahan dalam mengontrol ketiga proses tersebut. Pada Tahun 2017 dibangun sistem SIPJMD (Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah Daerah) untuk perencanaan pembangunan 5 tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis SKPD (Renstra).
2. Membangun sistem data yang disebut sebagai Sistem Knowledge Management, sehingga data dapat diakses dengan mudah dan lebih tertata.
3. Meningkatkan kompetensi pegawai Bappeda dengan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan solusi untuk kekurangan pegawai adalah dengan mengajukan permohonan penambahan pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai koordinator perencanaan harus mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan ke dalam peraturan perundang-undangan daerah. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan Perencanaan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.62 Peraturan Daerah dan Pergub Tentang Perencanaan

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Perda/Pergub
1.	Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	a) Peraturan Daerah No 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu
2.	Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	b) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012 c) Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	a) Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b) Pergub Nomor 84 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan

Bappeda selaku pengemban fungsi penunjang pemerintahan daerah perencanaan pembangunan telah berhasil mengantarkan dan mempertahankan Provinsi DKI Jakarta

sebagai penerima Anugerah Pangripta Nasional Tahun 2017 dari pemerintah pusat. Berikut adalah kategori penghargaan yang berhasil diraih pada tahun 2017:

1. Terbaik II Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik (Tahun 2017)
2. Pemenang Kategori Provinsi dengan Inovasi Terbaik dalam Perencanaan (Tahun 2017)

7. Perumahan

a. Prioritas Urusan

Pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di perkotaan terutama di kota besar seperti Jakarta begitu penting untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya pelayanan masyarakat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Seiring kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta yaitu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota dalam rangka peningkatan pelayanan dan daya dukung kota, maka prioritas pembangunan perumahan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman;
- 2) Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung;
- 3) Program Penyediaan Perumahan Rakyat;
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat;
- 5) Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun;
- 6) Program Pembangunan Gedung Pemda;
- 7) Program Pemeliharaan Gedung Pemda;
- 8) Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda;
- 9) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perumahan Rakyat;

b. Program dan kegiatan

Program Provinsi untuk Urusan Perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3 program dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.63
Perbandingan Program Nasional dan Program Daerah
Urusan Perumahan

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Pengembangan Perumahan Rakyat	Penyediaan Perumahan Rakyat
2	Pemberdayaan Komunitas Perumahan Rakyat	Pelayanan Perumahan dan Permukiman
3	Program peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Darinase	Program peningkatan sarana dan prasarana Perumahan Rakyat
Jumlah	3	3

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2017

Pada tahun 2017 terdapat 3 dari 9 program pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan arah kebijakan umum pembangunan daerah.

Tabel 3.64
Program Urusan Perumahan

No	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Penyediaan Perumahan Rakyat	47
2.	Pelayanan Perumahan dan Permukiman	13
3.	Program peningkatan sarana dan prasarana Perumahan Rakyat	4
Jumlah		64

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Pencapaian kinerja kegiatan urusan perumahan Tahun 2017 sebesar 55,77% dari rencana kegiatan :

Tabel 3.65
Realisasi Program Urusan Perumahan

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman	3	3	100%
2	Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung	1	1	100%
3	Program Penyediaan Perumahan Rakyat	47	25	53,19%
4	Program Peningkatan Sarana dan	4	4	100%

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
	Prasarana Perumahan Rakyat			
5	Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun	26	4	15,38%
6	Program Pembangunan Gedung Pemda	3	3	100%
7	Program Pemeliharaan Gedung Pemda	1	1	100%
8	Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda	3	1	33,33%
9	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perumahan Rakyat	16	16	100%
Jumlah		104	58	55,77%

Sumber : Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, 2017

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Pengelolaan urusan perumahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang didukung oleh 317 orang pegawai, dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.66
Rekapitulasi Pegawai Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

No	Klasifikasi	Jumlah
1	2	3
A.	Golongan (Jumlah)	317
	1. Golongan IV	53
	2. Golongan III	209
	3. Golongan II	51
	4. Golongan I	4
B	Eselon	317
	1. Eselon I	0
	2. Eselon II	1
	3. Eselon III	24
	4. Eselon IV	59
	5. Eselon V	0
	5. Fungsional	1
	6. Staf	232
C	Pendidikan	317
	1. S3	0
	2. S2	62
	3. S1	130
	4. Diploma	21
	5. SLTA	96
	6. SLTP	5
	7. SD	3

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta, 2017

Dari 84 jabatan struktural yang ada, yang terisi sampai akhir Desember 2017 sebanyak 84 jabatan. Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.67
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural
Pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1	1	1
2	Eselon III	24	24	24	1	24
3	Eselon IV	59	59	59	7	59
Jumlah		84	84	84	9	84

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 84 / 84 = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : 9 / 84 = 11 %
- Kepangkatan : 84 / 84 = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3.68
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Anggaran Urusan Perumahan	4.871.791.793.487	3.105.695.220.762	63,75%
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	119.479.851.040	111.007.656.832	92,91%
2. BELANJA LANGSUNG	4.752.311.942.447	2.994.687.563.930	63,02%
BELANJA PEGAWAI	119.479.851.040	111.007.656.832	92,91%
BELANJA BARANG DAN JASA	282.958.797.320	177.764.037.703	62,82%
Belanja Pemeliharaan			
c. BELANJA MODAL	4.469.353.145.127	2.816.923.526.227	63,03%
CATATAN PERBANDINGAN :	-	-	-

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	4.871.791.793.487	3.105.695.220.762	63,75%
Belanja Modal : Belanja URUSAN	4.469.353.145.127	2.816.923.526.227	63,03%
Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	282.958.797.320	177.764.037.703	62,82%
Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN			

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2017

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Perumahan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.69
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Perumahan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin							Jumlah
		Prov	J P	J U	J T	J S	J B	K P	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1	7
2.	Kotak Pengaduan	1	1	1	1	1	1	1	7
3.	Leaflet	1	1	1	1	1	1	1	7
4.	Media Masa	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	7

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2017

Catatan :

Website : disperkim.jakarta.go.id

E-mail : subprogramdprkp@gmail.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun rumah susun di 5 Wilayah Kota Administrasi, sebagai sarana pemukiman yang layak bagi warga Jakarta, yaitu :

- Rusun Jati Rawasari;
- Rusun Karang Anyar;
- Rusun Cipinang Besar Utara;
- Rusun Pondok Bambu;
- Rusun Cipinang Muara;
- Rusun Tipar Cakung;
- Rusun Tambora;
- Rusun Flamboyan;

- Daan Mogot;
- Rusun Sukapura;
- Rusun Penjaringan;
- Rusun Marunda;
- Kapuk Muara;
- Muara Baru;
- Rusun Pulo Jahe;
- Rusun Pulo Gebang;
- Pinus Elok;
- Rusun Cakung Barat;
- Rusun Cipinang Besar Selatan;
- Rusun Jatinegara Kaum;
- Komarudin;
- Jatinegara Barat
- Rusun Lokbin Rawa Buaya
- Rusun Cakung Barat
- Rusun Bekasi KM 2
- Rusun Rawa Bebek
- Rusun Jatinegara Kaum
- Rusun Pinus Elok
- Rusun Lokbin Semper
- Rusun Marunda
- Rusun KS. Tubun

Sementara itu terdapat beberapa lokasi yang disiapkan untuk membangun rumah susun, yaitu :

- Rusun Penjaringan (Multi Years)
- Rusun Penggilingan (Multi Years)
- Rusun Kelurahan Pengadegan (Multi Years)
- Rusun BLK Pasar Rebo (Multi Years)
- Rusun Pulo Gebang dan Penggilingan (Multi Years)
- Rusun Rawa Bebek Tower 2 (Multi Years)
- Rusun Lokbin Tegal Alur (Multi Years)
- Rusun Lokbin Rawa Buaya Tower 3, 4 dan 5 (Multi Years)

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPMJ) Tahun 2013-2017, sedangkan Perencanaan Strategis Dinas Perumahan untuk periode 2013-2017.

Tabel 3.70
Sinkronisasi Perencanaan Program Urusan Perumahan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	9	RENJA SKPD : RKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	9	RKA : RENJA SKPD	100
3	RKA 2017	9	DPA : RKA	100
4	DPA 2017	9		

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2017

h. Permasalahan dan solusi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu bagian dari Bidang Sarana dan Prasarana Kota mempunyai permasalahan yang spesifik sebagai berikut :

Pada tahun 2017, permasalahan yang dihadapi pada pembangunan rumah susun adalah berkurangnya waktu penyelesaian pekerjaan karena proses penghapusan aset yang berlangsung sangat lama, adanya kendala dari pedagang pasar eks Lokbin Rawabuaya yang masih menempati lokasi dan belum direlokasi dan juga terlambatnya penyediaan stok material oleh produsen. Solusi yang diambil atas permasalahan tersebut adalah diberikannya perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada kontraktor sesuai dengan Pergub Nomor 189 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerjaan serta Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2017 dan Pergub Nomor 195 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerjaan serta Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2017.

Kendala dalam pencapaian backlog perumahan dan solusinya :

Selain permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan pembangunan, terdapat kendala yang ditemui dalam pencapaian backlog perumahan diantaranya ketersediaan lahan yang semakin sedikit, pelaksanaan kegiatan yang memakan waktu cukup lama mulai dari perencanaan, pelelangan hingga pembangunan, ketersediaan anggaran daerah yang tidak hanya mencakup pembangunan perumahan, serta kurangnya kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan penyediaan rumah. Solusi yang diambil adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong milik pemerintah dan juga pembangunan gedung secara mixed use dengan pasar, lokasi binaan (lokbin) dan fungsi lainnya, menggunakan sistem waktu pelaksanaan kegiatan minimal dua tahun (multi years), mengusulkan kegiatan pembangunan ke pemerintah pusat dan juga memanfaatkan kewajiban pengembang/pihak swasta, serta menggunakan dampingan tenaga ahli/staf profesional dalam pelaksanaan kegiatan

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Menteri yang berkaitan dengan urusan Perumahan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut

Tabel 3.71
Peraturan Daerah Tentang Perumahan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Peraturan Gubernur	Nomor dan Judul Perda/Peraturan Gubernur
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik	Peraturan Daerah No 1 Tahun 1991 Tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
		Keputusan Gubernur No. 707 tahun 1980 tentang Penyempurnaan Pedoman Penetapan Harga Sewa Perumahan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Peraturan Gubernur	Nomor dan Judul Perda/Peraturan Gubernur
		Keputusan Gubernur No. 2693 Tahun 1987 tentang Pedoman Pengaturan Perumahan Pemondokan (Rumah Kost) Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun	Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rumah Susun	Keputusan Gubernur No. 540 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan Atas Bidang Tanah untuk Pembangunan Fisik Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
	Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan PPRS di Rusunami	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 924 Tahun 1991 Tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
		Keputusan Gubernur No. 354 tahun 1992 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sederhana/Murah Bagi Pemegang Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (Sp3I) Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
		Keputusan Gubernur No. 1934/2002 tentang Ketentuan Perhitungan Nilai Kewajiban Penyediaan Bangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Yang Dikonversi Dengan Dana Oleh Para Pengembangan Pemegang SIPPT.
3.	Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 Tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran	Instruksi gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 1995 Tentang Pembentukan RT/RW pada Komplek-Komplek Rumah Susun Flat dan yang sejenis
		Keputusan Gubernur Nomor 638 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
		Keputusan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Nomor 1128 Tahun 1998 Tentang Pedoman Pembinaan Dalam

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Peraturan Gubernur	Nomor dan Judul Perda/Peraturan Gubernur
	Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun	Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Di Wilayah DKI Jakarta
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
		Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
		Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun
5.	Peraturan Menteri Negara Perumahan Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2017

8. Kepemudaan dan Olahraga

a. Prioritas Urusan

- Meningkatnya sumberdaya aparatur, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik yang berkualitas dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga.
- Meningkatnya pemanfaatan iptek keolahragaan dalam pengembangan dan pembinaan olahraga.
- Terwujudnya pemuda yang berdaya saing melalui pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan kepemudaan.

- Tersedianya prasarana dan sarana olahraga dan pemuda yang sesuai standar.

b. Program dan kegiatan

Program Provinsi untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 9 program dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.72
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Kepemudaan dan Olahraga

NO	PROGRAM	
	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1	Program Pembinaan Olahraga Prestasi	Program Pembinaan Olahraga Prestasi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda
3	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Olahraga
4		Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pemuda dan Olah Raga
5		Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Pemuda dan Olah Raga
6		Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Pemuda dan Olah Raga
7		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Urusan Pemuda dan Olah Raga
Jml		Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah Urusan Pemuda dan Olah Raga
	4	9

Pada tahun anggaran 2017 terdapat 9 (sembilan) Program pada Urusan Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Dinas Olahraga dan Pemuda dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.73
Program Urusan Pemuda dan Olahraga

No	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	18
2.	Program Pembinaan Olahraga Prestasi	23
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda	8
4.	Program Pengembangan Olahraga	14
5.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pemuda dan Olah Raga	13
6.	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Pemuda dan Olah Raga	1
7.	Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Pemuda dan Olah Raga	2
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Urusan Pemuda dan Olah Raga	1
9	Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah Urusan Pemuda dan Olah Raga	1
	Jumlah	81

Sumber : Disorda Prov. DKI Jakarta 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan berdasar pada Undang undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Hasil yang dicapai dalam Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Realisasi kegiatan Tahun 2017 mencapai 72,15 %.

Tabel 3.74
Realisasi Program Urusan Pemuda dan Olahraga

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	18	4.153.414.820	85,27%

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
2.	Program Pembinaan Olahraga Prestasi	23	52.527.619.670	75,32%
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda	8	10.282.057.570	56,67%
4.	Program Pengembangan Olahraga	14	5.318.392.146	70,28%
5.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pemuda dan Olah Raga	13	4.294.864.185	77,86%
6.	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Pemuda dan Olah Raga	1	110.159.078	73,30%
7.	Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Pemuda dan Olah Raga	2	471.099.000	52,92%
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Urusan Pemuda dan Olah Raga	1	43.890.000	48,02%
9	Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah Urusan Pemuda dan Olah Raga	1	29.610.000	40,12%
Jumlah		81	77.231.106.469	72,15%

Sumber : Disorda Prov. DKI Jakarta 2017

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Pemuda dan Olahraga di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda serta UKPD/UP di bawah dinas tersebut, dengan jumlah pegawai sebanyak 278 orang atau 0,40 % dari total jumlah pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3.75
Rekapitulasi Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda

No	Kualifikasi	Jumlah	Ket
A.	Golongan	278	
	1. Golongan IV	42	
	2. Golongan III	164	

No	Kualifikasi	Jumlah	Ket
	3. Golongan II	69	
	4. Golongan I	3	
B.	Eselon	58	
	1. Eselon I	-	
	2. Eselon II	1	
	3. Eselon III	16	
	4. Eselon IV	41	
	5. Eselon V	-	
	6. Fungsional	-	
	7. Pelaksana (Staf)	275	
C.	Pendidikan	278	
	1. S3	3	
	2. S2	40	
	3. S1	113	
	4. Diploma	12	
	5. SLTA	99	
	6. SLTP	4	
	7. SD	7	

Sumber : Dinas Olahraga dan Pemuda, 2017

Dari 58 jabatan struktural yang ada, yang terisi sampai akhir Desember 2017 sebanyak 56 jabatan. Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.76
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Pemuda dan Olahraga

No.	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1	1	1
2	Eselon III	16	15	15	13	15
3	Eselon IV	41	40	40	24	40
Jumlah		58	56	56	38	56

Sumber : Disorda Prov. DKI Jakarta 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 56 / 58 = 96,55 %
- Diklat Kepemimpinan : 38 / 58 = 65,52 %
- Kepangkatan : 56 / 58 = 96,55 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Pagu Anggaran Dinas Olahraga dan Pemuda Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.77
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Olahraga dan Pemuda

URAIAN	Alokasi(Rp)	Realisasi (Rp)	%
DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA	380.571.444.103	308.221.140.964	80,99%
1. Belanja Tidak Langsung	88.681.261.680	87.004.526.973	98,11%
2. Belanja Langsung	291.890.182.423	221.216.613.991	75,79%
a. Belanja pegawai	47.544.362.500	38.135.194.400	80,21%
Belanja barang dan jasa	208.868.429.686	159.289.353.213	76,26%
Belanja pemeliharaan	10.551.553.526	8.093.877.683	76,71%
c. Belanja modal	35.477.390.237	23.792.066.378	67,06%
Catatan :			
Alokasi Anggaran Urusan: Belanja APBD	380.571.444.103	308.221.140.964	80,99%
Belanja Modal : Belanja Urusan	35.477.390.237	23.792.066.378	67,06%
Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang&Jasa	10.551.553.526	8.093.877.683	76,71%
Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	10.551.553.526	8.093.877.683	76,71%

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

- Sarana Olahraga dan Pemuda

Sarana yang digunakan dalam Urusan Pemuda dan Olahraga tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.78
Jenis dan Jumlah Sarana Informasi
Pemuda dan Olahraga

No.	Jenis Fasilitas/ Sarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin/UPT								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	GR	GOR	
1.	Papan Pengumuman	1	1	3	3	2	2	31	1	44
2.	Kota Pengaduan	1	1	3	3	1	2	23	1	35
3.	Leaflet	4	-	-	-	-	-	-	-	4
4.	Mobil Keliling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Media Masa	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6.	Website	1	-	-	-	-	-	-	-	1
7.	E-mail	1	1	3	3	2	2	5	1	18
8.	Call Center	1	1	3	3	2	2	5	1	18

Sumber : Disorda Prov. DKI Jakarta 2017

Catatan :

- Website : www.dispora.jakarta.go.id
- E-mail : dispora@jakarta.go.id
- Call Center : 021 – 8193548

- **Prasarana Olahraga dan Pemuda**

Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olahraga secara umum sudah merata pada semua kota dan kabupaten, yaitu :

Unit Pengelola (UP) Gelanggang Remaja di DKI Jakarta sebanyak 36 Unit di 5 Wilayah Kota Administrasi :

- Unit Pengelola (UP) Gelanggang Remaja Kota Administrasi (5 Unit) :
 1. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Pusat
 2. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara
 3. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Barat
 4. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Selatan
 5. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Timur
- Unit Pengelola (UP) Gelanggang Olahraga (7 Unit) :

1. Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun
2. Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Ragunan
3. Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Ciracas
4. Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Sunter
5. Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Cendrawasih
6. Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya
7. Unit Pengelola Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro
- Unit Pengelola (UP) Gelanggang Remaja Kecamatan (31 Unit):

Jakarta Pusat

1. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Cempaka Putih
2. Unit Pengelola. Gelanggang Remaja Kecamatan Kemayoran
3. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Tanah Abang
4. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Sawah Besar
5. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Johar Baru

Jakarta Utara

6. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Cilincing
7. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Kelapa Gading
8. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Koja
9. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Tanjung Priok

Jakarta Barat

10. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan KebonJeruk
11. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Grogol Petamburan
12. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Palmerah
13. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Kalideres
14. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Kembangan
15. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Tambora

Jakarta Selatan

16. Gelanggang Remaja Kecamatan Kebayoran Baru
17. Gelanggang Remaja Kecamatan Kebayoran Lama
18. Gelanggang Remaja Kecamatan Pesanggrahan
19. Gelanggang Remaja Kecamatan Tebet
20. Gelanggang Remaja Kecamatan Mampang Prapatan
21. Gelanggang Remaja Kecamatan Pasar Minggu
22. Gelanggang Remaja Kecamatan Jagakarsa

Jakarta Timur

23. Gelanggang Remaja Kecamatan Ciracas
24. Gelanggang Remaja Kecamatan Cipayung
25. Gelanggang Remaja Kecamatan Pasar Rebo
26. Gelanggang Remaja Kecamatan Kramat Jati
27. Gelanggang Remaja Kecamatan Makasar
28. Gelanggang Remaja Kecamatan Jatinegara
29. Gelanggang Remaja Kecamatan Duren Sawit
30. Gelanggang Remaja Kecamatan Pulo Gadung
31. Gelanggang Remaja Kecamatan Cakung

- Gedung Olahraga / Fasilitas Lepas (53 Unit)

Jakarta Pusat

1. Gedung Olahraga (GOR) Jakarta Pusat
2. Gedung Olahraga Tenis Meja
3. Gedung Olahraga Kemakmuran
4. Gedung Auditorium Kebon Jahe Jakarta Pusat

Jakarta Utara

5. Gedung Olahraga (GOR) Jakarta Utara
6. Gedung Bulutangkis
7. Gedung Judo Klp. Gading
8. Gedung Serbaguna Semper Barat
9. GOR Kamal Muara
10. Yacht Club (Gedung Serbaguna)

Jakarta Barat

11. Gedung Bulutangkis Cendrawasih
12. Gedung Serbaguna GOR Cendrawasih

Jakarta Selatan

13. Gedung Basket (Hall A) GMSB
14. Gedung Voli (Hall B) GMSB
15. Gedung Bulutangkis (Hall C) GMSB
16. Ruang Tenis Meja GMSB
17. Ruang Fitnes GMSB
18. Gedung Pertunjukan, Gedung B, C, dan D Gelanggang Remaja Jakarta Selatan
19. Gedung Olahraga (GOR) Jakarta Selatan
20. Fasilitas Gedung Bridge

21. Gedung Bulutangkis PPOP Ragunan
22. Gedung Tenis Meja PPOP Ragunan
23. Gedung Voli PPOP Ragunan
24. Gedung Angkat Besi PPOP Ragunan
25. Gedung Gulat PPOP Ragunan
26. Gedung Judo PPOP Ragunan
27. Gedung Serbaguna (Basket) PPOP Ragunan
28. Gedung Senam PPOP Ragunan

Jakarta Timur

29. Gedung Olahraga (GOR) Jakarta Timur
30. Gelanggang Olahraga PKP
31. Gedung Futsal GOR Rawamangun
32. Gedung Badminton GOR Rawamangun
33. Gedung Squash GOR Rawamangun
34. Gedung Voli Pondok Bambu
35. Gedung Senam Radin Inten
36. Gedung Serba Guna Radin Inten
37. GOR Perumnas Klender
38. Gedung Olahraga (GOR) Ciracas
39. Gedung Teater Terbuka

Fasilitas Lepas : 11

Jakarta Pusat

1. Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Pusat
2. Kolam Renang Kebon Jahe Tanah Abang

Jakarta Utara

3. Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Utara
4. Kolam Renang GOR Sunter
5. Kolam Renang Rawa Badak

Jakarta Selatan

6. Fasilitas Kolam Renang Bulungan
7. Gedung Kolam Renang PPOP Ragunan
8. Kolam Renang GMSB

Jakarta Barat

9. Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Jakarta Timur

10. Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Timur
11. Gedung kolam renang GOR Ciracas

- Lapangan Olahraga milik Pemerintah DKI Jakarta sebanyak 35 unit + 52 Stadion/Lapangan Sepak Bola = 87 unit

Lapangan Olahraga : 35

Jakarta Pusat

1. Lap. Fitnes Terbuka

Jakarta Utara

2. Lap. Tenis Rawa Badak
3. Lap. Fitnes Terbuka

Jakarta Barat

4. Lapangan Basket terbuka Angsana Raya Cengkareng Timur
5. Lapangan Tenis / Futsal
6. Lapangan Tenis Cengkareng
7. Lapangan Tenis Jati Pulo RW 03, Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah
8. Lapangan Voli Kampung Belakang Kamal
9. Lapangan Voli Kapuk

Jakarta Selatan

10. Lapangan Basket Luar
11. Lapangan Tenis
12. Fasilitas Lapangan Tenis Bulungan (Semi Indoor)
13. Lapangan Tenis PPOP Ragunan
14. Lap. Fitnes Terbuka
15. Lapangan Luar (HOKI)
16. Lapangan Serbaguna (Lap Hockey)
17. Lapangan Serbaguna (Lap Hockey)
18. Lapangan Serbaguna (Lap Hockey)
19. Lapangan Serbaguna (Lap Hockey)
20. Lapangan Serbaguna (Lap Hockey)
21. Lapangan Serbaguna (Lap Hockey)

Jakarta Timur

22. Lap Basket Outdoor Tri On Tri GOR CIRACAS
23. Lap. Tenis Pondok Bambu
24. Lapangan Tenis Terbuka
25. Lap. Fitnes Terbuka
26. Lap. Fitnes Terbuka

Kepulauan Seribu

27. Lapangan Tenis Pulau Pramuka
28. Lapangan Voli Pulau Untung Jawa
29. Lapangan Voli Pulau Panggang
30. Lapangan Voli Pulau Karya
31. Lapangan Voli Pantai Pulau Untung Jawa
32. Lapangan Voli Pantai Pulau Karya
33. Lapangan Voli Pulau Pramuka
34. Lapangan Voli Pulau Panggang
35. Lapangan Bulutangkis Pulau Untung Jawa

Lapangan Sepak Bola : 38

Jakarta Pusat

1. Lapangan Sepakbola Karet Tengsin
2. Lapangan Sepakbola Pejompongan
3. Lapangan Sepakbola PORS Serdang

Jakarta Utara

4. Lapangan Sepakbola Kalibaru
5. Lapangan Sepakbola Muara Angke
6. Lapangan Sepakbola Rorotan

Jakarta Barat

7. Lapangan Sepakbola Pegadungan
8. Lapangan Sepakbola Semanan
9. Lapangan Sepakbola Srengseng
10. Lapangan Joglo
11. Lapangan Sepakbola Kedoya
12. Lapangan sepakbola Kebon Jeruk
13. Lapangan Sepakbola Persima
14. Lapangan Sepakbola Wijaya Kusuma
15. Lapangan Sepakbola Terbuka

Jakarta Selatan

16. Lapangan Sepak Bola Blok.S
17. Lapangan Sepakbola A. Yani
18. Lapangan Sepak Bola Kebagusan
19. Lapangan Sepak Bola Jagakarsa
20. Lapangan Sepak Bola Sukatani
21. Lapangan Sepak Bola Pesanggrahan
22. Lapangan Bola II
23. Lapangan Bola III

Jakarta Timur

24. Lapangan sepak bola setu
25. Lapangan Sepak bola Klender
26. Lapangan sepak bola cakung
27. Lapangan sepak bola kramat jati
28. Lapangan sepak bola gedong
29. Lapangan sepak bola cijantung
30. Lapang sepak bola kelapa dua wetan
31. Lapangan sepak bola cibubur
32. Lapangan sepak bola lubang buaya
33. Lapangan sepak bola ceger

Kepulauan Seribu

34. Lapangan Sepakbola Pulau Untung
35. Lapangan Sepakbola Pulau Karya
36. Lapangan Sepakbola Pulau Pramuka
37. Lapangan Sepakbola Pulau Tidung
38. Lapangan Sepakbola Pulau Kelapa

Stadion Sepakbola : 13

Jakarta Pusat

1. Stadion Sepakbola VIJ
2. Stadion Sepakbola Banteng

Jakarta Utara

3. Stadion Sepakbola GOR Sunter
4. Stadion Sepakbola Rawa Badak
5. Stadion Sepakbola Tugu
6. Stadion Kamal Muara

Jakarta Barat

7. Stadion Sepakbola Cendrawasih
8. Stadion Sepakbola Tamansari

Jakarta Selatan

9. Stadion Sepakbola GMSB
10. Stadion Sepakbola GOR Ragunan

Jakarta Timur

11. Stadion Bola Pondok Bambu
12. Stadion Sepakbola Gongseng
13. Stadion Sepakbola Ciracas

Stadion Sepakbola : 1

Jakarta Timur

1. Stadion Atletik GOR Rawamangun

Selain itu terdapat banyak prasarana olahraga lain, baik yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihak Swasta maupun Nasional, namun rasio antara jumlah penduduk dengan sarana olahraga masih kurang.

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Proses perencanaan dalam Urusan Pemuda dan Olahraga dilakukan dengan mengacu kepada program nasional khususnya yang berkaitan dengan even-even olahraga dan pemuda ditingkat nasional, pemasyarakatan dan pemasalah olahraga. serta even-even olahraga internasional yang dapat diikuti atau dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3.79
Sinkronisasi Perencanaan Program Urusan Pemuda dan Olahraga

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017		RENJA SKPD : RKPD	
2	RENJA SKPD 2017	9	RKA : RENJA SKPD	100
3	RKA 2017	9	DPA : RKA	100
4	RKPD 2017	9		

Sumber : Disorda Prov. DKI Jakarta 2017

h. Permasalahan dan solusi

- 1) Permasalahan dan kendala pada kegiatan Pengiriman Pemuda Pelopor Provinsi ke Tingkat Nasional adalah dalam mencari pemuda pelopor yang menonjol di bidang-bidang yang diperlombakan karena di DKI Jakarta jarang peminatnya sehingga sangat sulit dalam pencariannya di Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota, jika di provinsi/daerah lain bidang-bidang yang diperlombakan masih banyak peminatnya.
- 2) Permasalahan dan kendala dalam kegiatan Lomba TUB dan Kreasi PBB Tingkat Provinsi DKI Jakarta, Panca Lomba PMR dan Ajang Kreativitas Pemuda adalah keikutsertaan dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu karena Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta secara struktur tidak memiliki jalur organisasi langsung harus berkoordinasi dengan Kabupaten Kepulauan Seribu sehingga tidak menganggarkan dalam kegiatan ini.
- 3) Permasalahan dari kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Provinsi DKI Jakarta ke Tingkat Nasional adalah peserta kegiatan PPAN merupakan peserta yang telah lolos di tingkat wilayah kota / kabupaten. Sedikitnya jumlah peserta yang telah lolos seleksi di tingkat Kota / Kabupaten karena jumlah peserta seleksi di tingkat kota kurang dari target. Peserta yang akan lolos di tingkat provinsi harus mengikuti program selama 3 bulan karena program yg diadakan mengharuskan peserta yang terpilih untuk mengikutinya intens selama 1-3 bulan. Solusinya adalah sosialisasi yang lebih ditingkatkan lagi di Suku Dinas Pemuda dan

Olahraga 5 Kotamadya DKI Jakarta agar peserta yang terjaring lebih banyak.

- 4) Permasalahan dari kegiatan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) asal Provinsi DKI Jakarta ke Tingkat Nasional adalah peserta kegiatan KPN merupakan peserta yang telah lolos di tingkat wilayah kota / kabupaten. Sedikitnya jumlah peserta yang telah lolos seleksi di tingkat Kota / Kabupaten karena jumlah peserta seleksi di tingkat kota kurang dari target. Peserta yang akan lolos di tingkat provinsi harus mengikuti program selama 1-3 bulan karena program yg diadakan mengharuskan peserta yang terpilih untuk mengikutinya intens selama 1-3 bulan. Solusinya adalah sosialisasi yang lebih ditingkatkan lagi di Suku Dinas Pemuda dan Olahraga 5 Kotamadya DKI Jakarta agar peserta yang terjaring lebih banyak.
- 5) Pemagaran Lahan Batu Kurang Koordinasi dengan Pihak yang terkait
- 6) Rehabilitasi Pagar Taman BMW dalam Penginputan Anggaran Terdapat Kesalahan Perhitungan Anggaran mengakibatkan Anggaran yang di butuhkan tidak tercukupi dan tidak dapat dilaksanakan

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Pemuda dan Olahraga yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.80
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Pemuda dan Olahraga

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.		Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keolahragaan
2.		Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepemudaan
3.	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

4.		Peraturan Gubernur Nomor 366 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Gelanggang Remaja
5.		Peraturan Gubernur Nomor 367 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
6.		Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Layanan Gratis Penggunaan Kolam Renang Bagi Pelajar Pemegang Kartu Jakarta Pintar dan Fasilitas Pemuda dan Olahraga Bagi Sekolah Pada Hari dan Waktu Tertentu
7.		Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Analisa Jabatan
8.		Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Olahraga dan Pemuda

Sumber : Disorda Prov. DKI Jakarta 2017

• Program Kepemudaan

- a) Telah terpilih 2 orang Paskibraka Provinsi DKI Jakarta sebagai Tim Paskibraka pengibaran bendera hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2017 atas nama Evan William dan Ratu Sarah Nadia Lubis.
- b) Keikutsertaan Paduan Suara binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Youth Choir pada Kejuaraan Paduan Suara Piala Mendagri 2017 di Kuningan, Jakarta Selatan dengan meraih Juara 1 dan BPK Penabur International Choir Competition dengan meraih gold medal.
- c) Keikutsertaan Paduan Suara binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Youth Choir pada Beijing Joy Dancing 2017 di Beijing, RRT dengan meraih delegasi penampilan terbaik.
- d) Keikutsertaan Paduan Suara binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Youth Choir pada Dalian International Art Festival 2017 di Dalian, RRT dengan meraih delegasi

penampilan terbaik.

- e) Keikutsertaan anggota Jakarta Chambers International yang bernama Wini Rizkiningayu pada Public Speaking tingkat nasional di Medan, Sumatera Utara dengan meraih juara 1.
- f) Keikutsertaan anggota Jakarta Chambers International yang bernama Wini Rizkiningayu pada Public Speaking tingkat asia pasifik di Ulaanbatar, Mongolia dengan meraih juara 1.
- g) Keikutsertaan anggota Jakarta Chambers International yang bernama Wini Rizkiningayu pada Public Speaking tingkat dunia di Amsterdam, Belanda dengan meraih peringkat 5 besar.
- h) Keikutsertaan Desi Widayanti pada Program Pemuda Pelopor tingkat nasional 2017 di Jakarta dengan meraih juara 1 kategori bidang pangan.

• **Program Olahraga Prestasi**

- a) Beijing Football Competition yaitu pengiriman atlet pelajar cabang olahraga Sepakbola U-18 Provinsi DKI Jakarta pada 6th Beijing Cup Football Tournament U-18 Tahun 2017 di Beijing, Tiongkok melibatkan 17 orang atlet, 2 pelatih dan 2 ofisial tim. Kontingen Sepakbola Pelajar DKI Jakarta berhasil meraih Juara 2 dari 8 peserta antar lain Jakarta, Beijing (Chong Qing No.7), Beijing, Beijing (Zheng Zhou No.2), Seoul, Beijing (He Nan), Birmingham dan Beijing (Xi'an Tie Yi). Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kerjasama antar anggota Sister City.
- b) Jakarta International Aquatic Invitation, menghasilkan event internasional cabang olahraga Aquatic (Renang Indah dan Loncat Indah) bekerjasama dengan Pengurus Provinsi PRSI DKI Jakarta yang diselenggarakan di Kolam Renang Pusat Pembinaan Olahraga Pelajar, Ragunan Jakarta Selatan di bulan Desember 2017.
- c) Jakarta International Gymnastic Invitation, menghasilkan event internasional cabang olahraga Senam (Ritmik Putri, Artistik Putra/Putri dan Aerobik Putra/Putri) bekerjasama dengan Pengurus Provinsi PERSANI DKI Jakarta yang dilaksanakan di GOR Senam Radin Inter, Jakarta Timur pada bulan November 2017 dengan

jumlah peserta kurang lebih 350 orang terdiri dari dalam dan luar negeri.

- d) Jakarta International Water Polo Betawi Cup Invitation, menghasilkan event internasional cabang olahraga Polo Air bekerjasama dengan Pengurus Provinsi PRSI DKI Jakarta yang dilaksanakan di Kolam Renang Gelanggang Olahraga Soemantri Brodjonegoro Jakarta Selatan pada bulan Desember 2017 dengan jumlah peserta 8 tim dari dalam dan luar negeri.
- e) Pengiriman Atlet Bulutangkis dan Tenis Meja Pelajar Menuju AJSEG, telah melaksanakan pengiriman atlet pelajar cabang olahraga Bulutangkis dan Tenis Meja Provinsi DKI Jakarta menuju Asia Junior Sports Exchange Games dengan melibatkan Jakarta, Beijing, Hongkong, Kuala Lumpur, Taipei, Ulanbaatar, Singapore, Iwate, Bangkok, Fukushima, Yangon. Ibaraki, Tomsk, Tokyo (A), Tokyo (B), Hanoi dan Delhi. Kontingen DKI Jakarta melibatkan antara lain 6 orang atlet Bulutangkis, 2 orang pelatih Bulutangkis, 6 orang atlet Tenis Meja, 2 orang pelatih Tenis Meja dan 2 ofisial tim. Pada kegiatan Asia Junior Sports Exchange Games Tahun 2017, Kontingen Bulutangkis DKI Jakarta menempati peringkat pertama dari 20 kota peserta sedangkan Tenis Meja menempati peringkat 16 dari 20 kota peserta. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kerjasama antar anggota Sister City.
- f) Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun Menuju Tokyo, pengiriman atlet pelajar cabang olahraga Sepakbola U-14 Provinsi DKI Jakarta pada Tokyo International Youth Football di Tokyo, Jepang melibatkan 16 orang atlet, 2 pelatih dan 2 ofisial tim. Kontingen Sepakbola Pelajar DKI Jakarta belum berhasil meraih juara dari 20 peserta antar lain Jakarta, Ibaraki, Boca Junior, Tokyo Junior High School, Paris, Beijing, Seoul, Miyagi, Sundowns, Tokyo TC, New South Wales, J.League, Iwate, Corinthians, Berlin, Tokyo Verdy, Fukushima dan Cairo.
- g) Persiapan ASIAN Games 2018, dilasanakan beberapa persiapan pendukung pelaksanaan Tuan Rumah event internasional ASIAN Games XVIII/2018 di Jakarta-

Palembang. Persiapan dukungan antara lain sosialisasi ASIAN Games XVIII/2018 berupa pengadaan backdrop, spanduk dan roll benner ASIAN Games XVIII/2018 yg di pasang pada Gelanggang Olahraga dan Gelanggang Remaja di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibawah koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.

- h) Invitasi Cabang Olahraga Angkat Besi Provinsi DKI Jakarta, penyelenggaraan Invitasi Cabang Olahraga Angkat Besi Provinsi DKI Jakarta pada bulan Mei bertempat di Gedung Angkat Besi PPOP Ragunan Jakarta Selatan. Diikuti sebanyak 13 klub angkat besi dengan jumlah total peserta sebanyak 80 atlet pelajar.
- i) Invitasi Cabang Olahraga Panahan Provinsi DKI Jakarta, penyelenggaraan Invitasi Cabang Olahraga Panahan Provinsi DKI Jakarta pada bulan April bertempat di Lapangan Panahan PPOP Ragunan Jakarta Selatan. Invitasi melombakan nomor FITA Recurve, FITA Compound dan Standar Bow tingkat SD dan SMP. Diikuti sebanyak 14 klub panahan se-Jabodetabek dengan jumlah total peserta sebanyak 100 atlet pahanan pelajar.
- j) Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) DKI Jakarta, penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) DKI Jakarta pada bulan Juli bertempat di GOR Soemantri Brodjonegoro, GOR Ciracas, GOR Kecamatan Pasar Minggu, Stadion Atletik Rawamangun, Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan GOR Kecamatan Pulo Gadung. POPPROV diikuti oleh 5 Wilayah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan melombakan 10 cabang olahraga Atletik, Bola Basket, Bola Voli, Karate, Pencak Silat, Renang, Sepakbola, Sepak Takraw, Taekwondo dan Tenis Meja tingkat SD, SMP dan SMA dengan jumlah peserta sebanyak 1000 atlet pelajar. Jakarta Timur keluar sebagai Juara Umum pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) DKI Jakarta Tahun 2017.
- k) Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada POPNAS XIV/2017 Semarang Jawa Tengah, Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada POPNAS XIV/2017 Semarang Jawa Tengah pada bulan

September di Semarang, Jawa Tengah diikuti oleh seluruh Provinsi di Indonesia dengan melombakan 19 cabang olahraga yaitu Angkat Besi, Atletik, Bola Basket, Bola Voli, Bola Voli Pasir, Bulutangkis, Dayung, Gulat, Judo, Karate, Panahan, Pencak Silat, Renang, Senam, Sepakbola, Sepak Takraw, Taekwondo, Tarung Derajat, Tenis, Tinju dan Tenis Meja. Kontingen Provinsi DKI Jakarta berjumlah 500 orang terdiri dari 380 atlet dan 120 ofisial. Provinsi DKI Jakarta memperoleh peringkat II pada POPNAS XIV/2017 dengan Jawa Barat keluar sebagai Juara Umum dengan selisih 2 medali emas.

- l) Pemberian Penghargaan Kontingen POPNAS XIV/2017 Jawa Tengah, Pemberian Penghargaan Kontingen POPNAS XIV/2017 Jawa Tengah pada bulan Desember di Balai Agung Balaikota Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan diberikan kepada atlet dan pelatih DKI Jakarta berprestasi pada Pelaksanaan POPNAS XIV/2017 di Semarang Jawa Tengah.
- m) Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta Pada Kejuaraan Nasional/Try Out dan Kejuaraan Luar Negeri, Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta Pada Kejuaraan Nasional/Try Out dan Kejuaraan Luar Negeri selama April s.d Desember Tahun 2017 sebanyak 42 pengiriman mengikuti Kejuaraan Nasional dan Try Out dalam negeri. Pengiriman dilaksanakan sebagai ajang uji coba dan alat ukur keberhasilan pembinaan atlet pelajar di Provinsi DKI Jakarta. Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta berasal dari cabang olahraga di PPOP Ragunan dan POPNAS yaitu Angkat Besi, Atletik, Bola Basket, Bola Voli, Bola Voli Pasir, Bulutangkis, Dayung, Gulat, Judo, Karate, Panahan, Pencak Silat, Renang, Senam, Sepakbola, Sepak Takraw, Taekwondo, Tinju dan Tenis Meja.
- n) Invitasi Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan di Lapangan Bola Voli Petamburan, Jakarta Pusat dengan jumlah peserta sebanyak 16 tim putra dan 16 tim putri yang berasal Klub Bola Voli di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini rutin diadakan setiap tahunnya dan selalu ditutup secara resmi oleh pejabat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

baik Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah maupun Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

- o) Invitasi Cabang Olahraga Hoki Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan di Gedung Serbaguna Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur pada tanggal 17 s.d 19 Maret 2017 dengan jumlah peserta yaitu 9 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh DKI Jakarta. Dengan mempertandingkan 2 kategori yaitu Tim Putra dan Tim Putri.
- p) Invitasi Squash Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan di Gedung Squash GOR Rawamangun, Jakarta Timur pada tanggal 25 s.d. 29 November 2017 dengan jumlah peserta 105 atlet yang berasal dari 8 Klub asal DKI Jakarta dan Banten dengan mempertandingkan 20 nomor pertandingan.
- q) Pengiriman Kontingen Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta Menuju Pekan Olahraga Mahasiswa (POMNAS) XV/2017 di Makassar, Sulawesi Selatan, dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 21 Oktober 2017 di Makassar, Sulawesi Selatan. Kontingen DKI Jakarta mengirimkan 119 putra-putri terbaiknya yang tersebar di 34 Perguruan Tinggi yang ada di wilayah DKI Jakarta. Selain itu juga didukung oleh Pelatih dan official sejumlah 144 orang perwakilan dari DISPORA, BAPOMI Provinsi DKI Jakarta serta dari Perguruan Tinggi, untuk menghantarkan Kontingen DKI Jakarta meraih Juara Umum dengan raihan 51 medali Emas, 32 medali Perak dan 35 medali Perunggu.
- r) Pengiriman Kontingen Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional/Try Out Dalam dan Luar Negeri
- s) Kejuaraan Nasional Panahan 2nd Jogja Open Archery Competition Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 29 Maret 2017 di Yogyakarta. DKI Jakarta mengirimkan atlet mahasiswa cabang olahraga Panahan pada program Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) Provinsi DKI Jakarta, dengan perolehan 1 medali Perunggu pada nomor Perorangan Putra.
- t) Kejuaraan Bali Six's Ke 21 Tahun 2017 cabang olahraga Kriket dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 18 April 2017 di

Lapangan Udayana, Bali. DKI Jakarta mengirimkan Tim Kriket Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan berhasil menempati Rangking ke 2.

- u) Kejuaraan Nasional Tenis Meja Iwa Karniwa Open Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 28 April s.d 1 Mei 2017 di GOR Saparua Bandung, Jawa Barat. DKI Jakarta mengirimkan atlet mahasiswa cabang olahraga Tenis Meja pada program Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) Provinsi DKI Jakarta. Kejuaraan ini menjadi bahan evaluasi program pembinaan prestasi berikutnya dan sebagai wadah untuk menambah pengalaman bertanding para atlet.
- v) Kejuaraan Nasional Cadet , Junior dan Senior KartikaCup X Tahun 2017 cabang olahraga Judo dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 22 Mei 2017 di GOR X'Tra Arena Cikutra Bandung, Jawa Barat. DKI Jakarta mengirimkan atlet mahasiswa cabang olahraga Judo pada program Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) Provinsi DKI Jakarta, dengan perolehan medali 5 medali Emas, 4 medali Perak dan 3 medali Perunggu, yang mengantarkan DKI Jakarta berhasil meraih predikat Juara Umum.
- w) Invitasi Taekwondo USM Cup III Tahun 2017 cabang olahraga Taekwondo dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 15 Mei 2017 di Gelora USM Semarang, Jawa Tengah. DKI Jakarta mengirimkan atlet mahasiswa cabang olahraga Taekwondo pada program Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) Provinsi DKI Jakarta, dengan perolehan medali 1 medali Emas, 2 medali Perak dan 3 medali Perunggu.
- x) Pengiriman kontingen mahasiswa DKI Jakarta pada kegiatan Try Out Pencak Silat PPLM DKI Jakarta Kategori Tanding dengan Tim Pencak Silat UNS Surakarta Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 16 Juli 2017 di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Jawa Tengah. Kegiatan ini sebagai bahan evaluasi program pembinaan prestasi berikutnya, untuk mengukur peta kekuatan dan kelemahan tim dan untuk menambah pengalaman bertanding para atlet.
- y) Pengiriman kontingen mahasiswa DKI Jakarta pada

kegiatan Try Out Pencak Silat PPLM DKI Jakarta kategori TGR (Tunggal Ganda Regu) dengan Tim Pencak Silat IPSI Kabupaten Badung, Bali Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 29 Agustus 2017 di Kabupaten Badung, Bali. Kegiatan ini sebagai bahan evaluasi program pembinaan prestasi berikutnya, untuk mengukur peta kekuatan dan kelemahan tim dan untuk menambah pengalaman bertanding para atlet.

- z) Pengiriman kontingen mahasiswa DKI Jakarta pada kegiatan Try Out Sepaktakraw PPLM DKI Jakarta dengan Tim Sepaktakraw Surabaya Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 10 September 2017 di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini sebagai bahan evaluasi program pembinaan prestasi berikutnya, untuk mengukur peta kekuatan dan kelemahan tim dan untuk menambah pengalaman bertanding para atlet.
- aa) Kejuaraan Nasional “Gajah Mada Swimming Competition Tahun 2017” cabang olahraga Renang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 11 September 2017 di Kolam Renang Fakultas Ilmu Keolahragaan Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. DKI Jakarta mengirimkan atlet mahasiswa cabang olahraga Renang pada program Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) Provinsi DKI Jakarta, dengan perolehan medali 5 medali Emas, 4 medali Perak dan 3 medali Perunggu , yang menghantarkan DKI Jakarta berhasil meraih predikat Juara Umum.
- bb) Pemberian Penghargaan Kontingen POMNAS XV/2017 DKI Jakarta, Kontingen Mahasiswa DKI Jakarta berhasil mempertahankan gelar Juara Umum ke 15 kalinya dengan perolehan medali sebanyak 51 medali Emas, 32 medali Perak dan 35 medali Perunggu.
- cc) Invitasi Cabang Olahraga Renang Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan di Kolam Renang Gelanggang Olahraga Soemantri Brodjonegoro Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 30 November s.d 2 Desember 2017 dengan jumlah peserta dari 11 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh DKI Jakarta, dengan mempertandingkan 35 nomor pertandingan.

dd) Pembinaan Olahraga Prestasi Mahasiswa Melalui Pembinaan PPLM Provinsi DKI Jakarta. mulai dibentuk dan melaksanakan kegiatan Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) DKI Jakarta yang terdiri dari 14 cabang olahraga, yaitu Atletik, Bola Voli Pasir, Catur, Judo, Karate, Kempo, Menembak, Pencak Silat, Panahan, Petanque, Renang, Sepaktakraw, Taekwondo dan Tenis Meja. Program PPLM DKI Jakarta terdiri dari 19 orang pelatih, 21 orang asisten pelatih dan 171 orang atlet melalui proses seleksi antar Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini didukung oleh Tenaga Ahli yang meliputi 1 orang Dokter Spesialis, 5 orang Petugas Monitoring, 13 Petugas Masseur dan 13 orang Tim Strength AND Conditioning (SC).

- **Program Pengembangan Olahraga**

- a) Senam Kebugaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta di 3 lokasi yaitu : 1. Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, 2. Kantor Dinas Teknis Jatibaru, dan 3. Kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. Dengan melibatkan 29 instruktur senam dilaksanakan secara bergantian dan rutin di hari Jumat Pagi sepanjang tahun.
- b) Kejuaraan Olahraga Beladiri Pelajar Provinsi DKI Jakarta mempertandingkan 2 (dua) cabang olahraga beladiri yaitu pencak silat dan gulat berlokasi di GOR Ciracas (pencak silat) dan GOR Gulat PPOP Ragunan (Gulat). Pelaksanaan di bulan Agustus 2017.
- c) Kejuaraan Atletik Pelajar Bulanan Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan 8 (delapan) kali dari bulan Maret sampai dengan Desember 2017. Yang melombakan dari berbagai kelompok umur dan nomor lomba lari, lompat dan lempar. Sebanyak 40 nomor lomba, dengan peserta total 3.000 orang dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Yang mana penyelenggaraanya di laksanakan di gelanggang olahraga Rawamangun Jakarta Timur.
- d) Kejuaraan Renang Pelajar Bulanan Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan 8 (delapan) kali dari bulan Maret sampai dengan Desember 2017. Yang melombakan dari berbagai kelompok umur dan nomor lomba sebanyak 24

nomor lomba, dengan peserta total 2.400 orang dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Yang mana penyelenggaraanya di laksanakan di kolam renang milik Pemprov DKI Jakarta yang tersebar di 5 wilayah kota dengan penjadwalan secara bergantian.

- e) Kejuaraan Sepatu Roda Pelajar Provinsi DKI Jakarta, atlet-atlet sepatu roda Provinsi DKI Jakarta yang potensial dari berbagai klasifikasi mulai dari kelas pemula, kelas standard, sampai dengan kelas speed (kecepatan tinggi). Momen ini dijadikan ajang untuk talent scouting atlet dalam rangka persiapan jangka panjang untuk menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2019 di Papua.
- f) Kejuaraan Olahraga Antar Pondok Pesantren Provinsi DKI Jakarta berkerja sama dengan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Olahraga dan Pemuda 5 Wilayah kota Administrasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta dan Pengurus Provinsi masing – masing cabang olahraga. Pelaksanaannya dilakukan di bulan Oktober di dua lokasi, PPOP Ragunan dan Gelanggang Remaja Kecamatan Pasar Minggu. Dengan jumlah pondok pesantren yang ikut serta sebanyak kurang lebih 28 ponpes. Juara Umum diraih oleh Ponpes Luhur Tsaqafah, Jakarta Selatan.
- g) Kejuaraan Cabang Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas Provinsi DKI Jakarta, bibit-bibit atlet disabilitas berbakat dari 5 (lima) cabang olahraga sesuai klasifikasi ketunaannya, antara lain Bocce Tuna Grahita, Sepakbola Tuna Grahita, Futsal Tuna Rungu, Bulutangkis Tuna Rungu, dan Renang untuk seluruh ketunaan baik Tuna Dhaksa, Tuna Grahita, Tuna Rungu, maupun Tuna Netra. Dilaksanakan pada bulan Oktober dan November bertempat di PPOP Ragunan Jakarta Selatan, GOR Rawamangun, dan Kolam Renang pada Gelanggang Remaja Jakarta Pusat.
- h) Pekan Paralimpik Provinsi DKI Jakarta difokuskan untuk mempertandingkan khusus peserta kategori pelajar disabilitas dari perwakilan kontingen masing-masing Kota Administrasi. Ditujukan sebagai ajang seleksi menjaring

atlet disabilitas terbaik yang akan menjadi tulang punggung Kontingen Disabilitas Provinsi DKI Jakarta dalam mengikuti Multi Event Tingkat Nasional yaitu Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) pada bulan November 2017 di Solo.

- i) POR Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta pada bulan Desember di lapangan parkir IRTI Monas. Dimana peserta yang terlibat adalah para anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dari masing – masing SKPD. Cabang olahraga yang perlombakan adalah olahraga tradisional yang diberikan modifikasi sedikitan rupa antara lain Olahraga Tradisional Hadang dan Panca Dolanan (Balap karung–Egrang Batok – Lari Balok – Gelindingan – Dampu) dan beberapa permainan tradisional yang dijadikan ajang eksibisi.
- j) Festival Pencak Silat Betawi, yang menampilkan berbagai pertunjukan seni silat betawi dari berbagai aliran dan berbagai perguruan. Dengan total jumlah peserta 27 perguruan dan 513 pesilat betawi, mulai dari usia dini, muda, sampai dengan usia lanjut. Di Kategori Beksi, Juara I diraih oleh : Beksi Selempang Betawi dan di kategori Kategori Cingkrik Juara I diraih oleh : Cingkrik Sanggar Pitung.
- k) Kejuaraan Olahraga Tradisional Provinsi DKI Jakarta yang melombakan 5 cabang permainan rakyat. Antara lain Terompah Panjang, Dagongan, Enggang, Tarik Tambang, dan Balap Karung. Pesertanya berasal dari pelajar SMA dari 5 wilayah kota, yang sebelumnya dilakukan proses seleksi di masing – masing sudinpora. Kontingen Jakarta Utara berhasil menjadi juara umum dengan meraih 3 juara Pertama di masing – masing lomba.
- l) Pengiriman Kontingen Disabilitas Provinsi DKI Jakarta pada Kejuaraan Internasional, yaitu dilakukan Pengiriman Atlet Disabilitas Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti Kejuaraan Internasional antara lain, Kejuaraan Tennis Meja Tuna Dhaksa dalam ITTF Para Table Tennis ‘Ciutat del Prat’ Spanish Open 2017 di Barcelona pada bulan Juli dengan prestasi mampu meraih 2 emas dan 1 perak. Kemudian pengiriman Atlet Renang dan

Bulutangkis Tuna Rungu pada Olimpiade Olahraga Tuna Rungu “23rd Summer Deaflympics 2017” di Samsun, Turki dimana mampu menempati urutan ke-37 klasemen umum dengan perolehan 1 perak dan 1 perunggu. Dengan perolehan tersebut, untuk kawasan Asia, maka Indonesia yang hanya diwakili oleh 5 atlet Tuna Rungu Provinsi DKI Jakarta berada di urutan ke-9 dibawah Korea Selatan, China, Jepang, Iran, Taiwan, Thailand, Kazakhstan, dan India.

- m) Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berkebutuhan Khusus Berprestasi Tahun 2017, telah diberikan penghargaan bonus uang tunai bagi para Pelatih dan Atlet Disabilitas yang berprestasi meraih medali baik pada event tingkat nasional maupun tingkat internasional. Pemberian penghargaan ini dimaksudkan sebagai ucapan terima kasih atas perjuangan para atlet dan pelatih dalam mengharumkan nama Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia di dunia olahraga Nasional dan Internasional. Total sebanyak 53 orang yang berstatus sebagai atlet dan pelatih berprestasi yang telah diberikan penghargaan. Acara penghargaan dilaksanakan pada akhir bulan November di Balai Agung, Balaikota Provinsi DKI Jakarta.
- n) Pengiriman Kontingen Disabilitas dalam mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) VIII – 2017 pada bulan November di Kota Solo – Jawa Tengah. Kontingen berkekuatan total 73 orang, terdiri dari atlet, pelatih dan ofisial yang telah terseleksi dari Pekan Paralimpik tingkat Provinsi dan dilakukan pembinaan selama 3 bulan. Kontingen Provinsi DKI Jakarta total mampu meraih 3 medali Emas, 2 medali perak, dan 8 medali perunggu sehingga menempatkan Provinsi DKI Jakarta pada peringkat ke 13 di klasemen akhir keseluruhan. Provinsi Jawa Tengah selaku tuan rumah berhasil menjadi Juara Umum.

- **Program Prasarana Olahraga dan Pemuda**

- a) Rehabilitasi Gelanggang Olahraga Stadion Rawabadak
- b) pengamanan aset tanah berupa Pemagaran Lahan Marunda yang berlokasi di Jalan Sarang Bango Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota

Administrasi Jakarta Utara.

- c) Pengadaan Peralatan Olahraga dan Perlengkapan Permainan untuk didistribusikan ke masyarakat,sekolah,RT/RW di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- d) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga serta Perlengkapan Kontingen dalam rangka POMNAS, POPNAS dan PEPARPENAS 2017.
- e) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga untuk PPLM untuk latihan para mahasiswa di Pusat Pelatihan selama 1 tahun.

9. Penanaman Modal

a. Prioritas urusan

Prioritas urusan Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

b. Program dan kegiatan

Program Provinsi untuk Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 6 program dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.81
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Penanaman Modal

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal
2	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Program Promosi dan Kerjasama Investasi
Jml	2	2

Sumber : BPMP Prov. DKI Jakarta 2017

Pada tahun anggaran 2017 terdapat 5 program pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta. Adapun rincian program dan jumlah kegiatan sebagaimana tampak pada berikut

Tabel 3.82
Program Urusan Penanaman Modal

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	1	100
2.	Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal	2	2	100
Jumlah		3	3	100

Sumber : DPMPSTSP Prov. DKI Jakarta 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Untuk meningkatkan pelayanan pada urusan Penanaman Modal, pada tahun 2008 telah dikeluarkan peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pencapaian SPM dalam Bidang Penanaman Modal selama 3 tahun terakhir sebagaimana berikut :

Tabel 3.83
Indikator SPM Urusan Penanaman Modal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi 2015	Realisasi 2017
		Indikator	Nilai		
1	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun	1 (satu) kali	
2	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan:			
		Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing.	1 (satu) kali/ tahun	1 (satu) kali	
3	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi.	1 (satu) kali/ tahun	0	Kegiatan promosi diganti dengan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi 2015	Realisasi 2017
		Indikator	Nilai		
					kegiatan penyusunan bahan promosi
4	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:			
		Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi.	100%		
		Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah	100%		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi 2015	Realisasi 2017
		Indikator	Nilai		
		kabupaten/kota.			
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 (satu) kali/tahun	1 (satu) kali/tahun	
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).	100%	100%	
7	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2 kali	

Sumber : DPMPSTSP Prov. DKI Jakarta 2017

Hasil-hasil kegiatan BPMP Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilainya, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar Rp 12,22 Triliun menjadi Rp 47,3 Triliun pada tahun 2017. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar US\$ 3,39 Juta menjadi US\$ 4,6 Juta di tahun 2017.

Tabel 3.84
Volume Penanaman Modal

Tahun	PMA		PMDN		Jumlah proyek
	Proyek	Investasi (Juta US \$)	Proyek	Investas (Milyar Rupiah)	
2011	1.094	4.824,00	84	9.257,00	1.178
2012	1.148	4.107,70	108	8.540,10	1.256
2013	3.028	2.591,10	156	5.754,50	3.184
2014	3.799	4.509,40	167	17.811,50	3.966
2015	4.463	3.619,00	316	15.513,00	4.779
2016	6.751	3.398,20	463	12.216,90	7.214
2017	6483	4.600,00	497	47.300.00	6.980

Sumber : DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta 2017

2. Berdasarkan jumlah proyek PMA dan PMDN, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya dimana pada tahun 2012 terdapat 1.256 proyek, tahun 2013 terdapat 3.184 proyek, tahun 2014 terdapat 3.966 proyek, tahun 2015 terdapat 4.779 proyek dan tahun 2016 menjadi 7.214 proyek, namun untuk tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 6.980 proyek.
3. Penyelenggaraan promosi investasi dalam bentuk keikutsertaan pada pameran investasi di dalam negeri. Pada tahun 2017 DPMPTSP tidak melakukan secara mandiri program promosi investasi melainkan hanya mengikuti event-event seperti halnya Jakarta Fair.

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Penanaman Modal Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah pegawai sebanyak orang sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.85
Rekapitulasi Pegawai DPMPTSP

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	13	
	1. Golongan IV	2	
	2. Golongan III	10	
	3. Golongan II	1	
	4. Golongan I	-	
B.	Eselon	13	
	1. Eselon I	-	
	2. Eselon II	-	
	2. Eselon III	1	
	3. Eselon IV	3	
	5. Eselon V	-	
	6. Fungsional	-	
	7. Pelaksana (Staf)	9	
C.	Pendidikan	13	
	1. S3	0	
	2. S2	4	
	3. S1	7	

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
	4. Diploma	1	
	5. SLTA	1	
	6. SLTP	0	
	7. SD	-	

Sumber : BKD Provinsi DKI Jakarta 2017

Dari 4 jabatan struktural yang ada pada urusan penanaman modal, akhir Desember 2017 telah terisi 390, jumlah jabatan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Tabel 3.86
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Penanaman Modal

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II					
2	Eselon III	1	1	1	1	1
3	Eselon IV	3	3	3	1	3
Jumlah		4	4	4	2	4

Sumber : DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 4 / 4 = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : 2 / 4 = 50 %
- Kepangkatan : 4 / 4 = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Penanaman Modal tahun anggaran 2017 sebesar Rp.443.830.000,-. Anggaran yang terserap sebesar Rp.350.700.000,- (79,07%)

Tabel 3.87 Alokasi dan Realisasi Anggaran DPMPTSP

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN PENANAMAN MODAL	29.420.920.434	25.662.931.889	87,23
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.888.297.272	20.985.848.122	91,69
2. BELANJA LANGSUNG	6.532.623.162	4.677.083.767	71,60
a. BELANJA PEGAWAI	20.790.000	18.900.000	90,91
b. BELANJA BARANG DAN JASA	5.960.746.592	4.281.253.267	71,82
- Belanja Pemeliharaan	86.282.680	75.988.000	88,06
c. BELANJA MODAL	551.086.570	376.930.500	68,40
CATATAN PERBANDINGAN			-

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	29.420.920.434	57.365.040.315.366	
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	551.086.570	29.420.920.434	
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	86.282.680	5.960.746.592	
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	86.282.680	29.420.920.434	

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pada tahun 2017 berkantor di Jalan Kebon Sirih Nomor 18 Gedung Balaikota Blok H Jakarta Pusat lantai 13, 17, 18 dan 21, selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu juga berkantor di Mal Pelayanan Publik Jalan HR Rasuna Said Kav C 22, Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan. Sarana dan prasarana lainnya bersifat alat perkantoran pada umumnya termasuk untuk pengembangan teknologi informasi, memiliki sarana dan prasarana yang spesifik berupa alat ukur dan mobile service unit (MSU). Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.88
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Penanaman Modal

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Papan Pengumuman	Ada	
2.	Kotak Pengaduan	Ada	
3.	Leaflet	Ada	
4.	Media Masa	Ada	
5.	Website	Ada	
6.	Standing Poster	Ada	
7.	Banner	Ada	
8.	LCD	Ada	

Sumber : DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta 2017

- Website : pelayanan.jakarta.go.id
- Call Center : 1500164

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Penanaman Modal sebagian besar merupakan top down karena melaksanakan kebijakan-kebijakan Pusat maupun Daerah/ Penyusunan perencanaan dilakukan sesuai dengan hierarki perencanaan, yaitu menjabarkan kebijakan pusat (RPJP) dan daerah (RPJMD/RKPD) dan kebutuhan nyata di lapangan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) SKPD. Perencanaan Urusan Penanaman Modal sebagian besar merupakan top down karena melaksanakan kebijakan-kebijakan pusat maupun daerah, khususnya yang berkaitan dengan investasi atau penanaman modal, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Tabel 3.89
Sinkronisasi Perencanaan Program Urusan Penanaman Modal

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	5	RENJA SKPD : RKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	5	RKA : RENJA SKPD	100
3	RKA 2017	5	DPA : RKA	100
4	DPA 2017	5		

Sumber : BPMP Prov. DKI Jakarta, 2017

h. Permasalahan dan solusi

Faktor-faktor yang masih menjadi permasalahan dan sangat berpengaruh terhadap iklim investasi di DKI Jakarta pada tahun 2017 antara lain masalah kepastian hukum, kondisi keamanan, birokrasi perizinan, infrastruktur dan ketenagakerjaan.

Masalah kepastian hukum ditandai dengan peraturan yang sering berubah-ubah, penegakan yang tidak pasti dan multitafsir sehingga menimbulkan keraguan bagi investor untuk menanamkan modal. Dalam hal kondisi keamanan,

masih terdapat keraguan yang besar pada para investor, terutama investor asing terhadap stabilitas politik dan keamanan Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan Jakarta sebagai ibukota negara, sehingga resiko menanam modal di Jakarta dianggap masih cukup besar. Hal lain yang menjadi perhatian investor adalah masalah ketersediaan energi listrik. Dengan terjadinya gangguan instalasi listrik, dikhawatirkan akan mengancam pemenuhan kebutuhan listrik di Jakarta.

Selain hal tersebut diatas, ketidaktahuan para investor atas Undang-undang Penanaman modal yang baru disahkan oleh Pemerintah, sehingga para calon investor ragu untuk memulai menanamkan modal karena tidak mengerti proses investasi Perizinan/Non perizinan yang diwajibkan kepada perusahaan telah banyak dan sangat membebani perusahaan, serta adanya multitafsir tentang perusahaan yang telah memiliki IUT masih diwajibkan untuk mengurus dan memiliki SIUP, dan banyaknya unit/instansi terkait yang melakukan pengawasan, Birokrasi yang sulit dalam mengurus perizinan khususnya di tingkat wilayah.

Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa permasalahan pada urusan penanaman modal bukanlah permasalahan-permasalahan pada urusan penanaman modal sendiri, bahkan bukan hanya permasalahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan-permasalahan tersebut disamping sangat berkaitan dengan urusan-urusan lain, juga menjadi permasalahan yang pemecahannya adalah kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, peningkatan koordinasi vertikal dengan instansi pemerintah pusat dan koordinasi horizontal antara DPMPTSP dengan SKPD-SKPD pada urusan lain

yang berkaitan sangat penting dalam rangka mewujudkan integrasi kebijakan-kebijakan di DKI Jakarta.

Selain itu, solusi yang dapat dilakukan antara lain kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap perusahaan PMA/PMDN perlu terus dilaksanakan secara berkesinambungan, serta perlu juga diadakan pembinaan melalui bimbingan atau penyuluhan kepada para investor.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

Tahun 2017 telah dihasilkan berdasarkan publikasi BKPM Republik Indonesia, jumlah proyek (PMDN/PMA) yang berada di DKI Jakarta sebanyak 6.980 dengan rincian 497 proyek PMDN dan 6.483 proyek PMA meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 7.214 dengan rincian 463 proyek PMDN dan 6.751 proyek PMA.

Tahun 2017 telah dihasilkan Realisasi nilai investasi tahun 2016 yang berasal dari PMA dan PMDN berjumlah Rp. 108.600.000.000.000,- terdiri dari PMA berjumlah Rp.61.640.000.000.000,- dan PMDN berjumlah Rp.47.300.000.000.000,- pada tahun 2017 dari sebesar Rp. 58.092.455.000.000,-. Terdiri dari PMA berjumlah Rp.45.875.565.000.000,- dan PMDN berjumlah Rp.12.216.890.000.000,- pada tahun 2016.

Tahun 2017 telah dihasilkan jumlah perusahaan yang ditinjau penggunaan perizinannya adalah 1456 perusahaan dari 1.676 perusahaan pada tahun 2016. Perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa selama tahun 2017 Program Promosi dan Peningkatan Investasi diarahkan untuk diadakan kegiatan di Jakarta Tahun 2017 telah dihasilkan laporan berupa kajian tentang potensi investasi di Jakarta antara lain terdiri dari.

1. Kajian Potensi Investasi Sektor Pariwisata
2. Kajian Potensi Investasi Sektor Air Bersih
3. Kajian Potensi Investasi Sektor Transportasi
4. Kajian Potensi Investasi Sektor Air Limbah
5. Penyusunan Bahan Promosi Sektor Ketahanan Pangan
6. Penyusunan Bahan Promosi Sektor Utilitas Provinsi DKI Jakarta
7. Penyusunan Bahan Promosi Sektor Properti

Pada Tahun 2017 telah dihasilkan Pergub 47 /2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang didalamnya terdapat simplifikasi atau penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui :

- Penyederhanaan persyaratan agar tidak terdapat duplikasi persyaratan, menghapuskan atau meniadakan persyaratan yang tidak berdampak secara hukum, menyatukan persyaratan yang mempunyai substansi yang sama dan menghapuskan persyaratan yang mempersulit perkembangan dunia usaha.
- Percepatan waktu penyelesaian permohonan melalui tanda tangan secara elektronik, pembubuhan stempel secara elektronik, pengajuan permohonan secara elektronik, koordinasi inter dan antar SKPD secara elektronik, penerapan nomor antrian secara elektronik dan pemrosesan permohonan inter dan antar SKPD secara elektronik.
- Kepastian biaya melalui penginformasian biaya secara elektronik.
- Kejelasan prosedur melalui penetapan SOP, Standar Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal.
- Keterbukaan dan kejelasan informasi

- Kemudahan penyampaian keluhan pengaduan
- Kejelasan Penyelesaian pengaduan/keluhan

(dijelaskan detail Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Penanaman Modal).

Penyederhanaan persyaratan agar tidak terdapat duplikasi persyaratan, menghapuskan atau meniadakan persyaratan yang tidak berdampak secara hukum, menyatukan persyaratan yang mempunyai substansi yang sama dan menghapuskan persyaratan yang mempersulit perkembangan dunia usaha

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Penanaman Modal yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.90
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Penanaman Modal

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta	Pergub Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pergub Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber : BPMP Prov. DKI Jakarta, 2017

10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

a. Prioritas Urusan

Terdapat 4 Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017 di DKI Jakarta yaitu :

- Program Peningkatan Usaha Koperasi
- Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi
- Program Pemberdayaan UMKM
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM

b. Program dan Kegiatan

Program Nasional Urusan Koperasi dan UKM yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 80 %, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.91
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Koperasi dan UKM

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI
1	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM
2	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	Program Pemberdayaan UMKM
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi
4	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM	Program Peningkatan Usaha Koperasi
5	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM	
	5	4

Sumber : Dinas Koperasi UKM, serta Perdagangan Prov. DKI Jakarta. 2017

Pada tahun anggaran 2017 terdapat 6 program pada Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan untuk urusan Koperasi dan UKM. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.92
Rincian Program Urusan Koperasi dan UKM

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Peningkatan Usaha Koperasi	1
2.	Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi	6
3.	Program Pemberdayaan UMKM	3
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM	15
5.	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1
	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	72
	Jumlah Total	98

Sumber : Dinas Koperasi UKM, serta Perdagangan Prov. DKI Jakarta. 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Kegiatan dan hasil kegiatan pada Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Jumlah koperasi aktif sebanyak 6.493 (76,39%) dari 8.500 koperasi yang ada
- Pencapaian kegiatan

Tabel 3.93
Realisasi Program Urusan Koperasi dan UKM

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Usaha Koperasi	1	1	100
2	Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi	6	6	100
3	Program Pemberdayaan UMKM	3	3	100
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM	15	14	93,33
5	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	1	100
6	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	72	72	100
	Jumlah Total	98	97	98.97

Sumber : Dinas Koperasi UKM, serta Perdagangan Prov. DKI Jakarta. 2017

- Program Peningkatan Usaha Koperasi

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Koperasi Rusunawa
- Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi
 - Akta Pendirian koperasi Bagi Sekolah Negeri Diklat Dasar-Dasar Perkoperasian
 - Diklat Dasar dasar Perkoperasian
 - Uji Kompetensi Pelaku UKM dan Pengurus Koperasi
 - Diklat Pengelolaan Keuangan Koperasi Berbasis Komputer
 - Bimtek Kompetensi Manajer KSP/USP
 - Pendampingan Koperasi dan UMKM
- Program Pemberdayaan UMKM
 - Diklat Kewirausahaan Bagi UMKM
 - Bimtek Pengenalan dan Pemahaman Kandungan Berbahaya dan Beracun Bagi PKL
 - Bimtek Sablon dan Design Grafis Bagi UMKM
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM
 - Pengadaan sarana dagang bagi PKL
 - Pengadaan sarana dan Prasarana Co Working Space
 - Pemeliharaan Gedung Pusat Promosi Johar Baru
 - Pemeliharaan Gedung Pusat Promosi PPIKM
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana UMKM bagi Warga Rusun di Jakarta Pusat
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana UMKM bagi Warga Rusun di Jakarta Barat
 - Penyiapan Sarana dan Prasarana PKL Loksem Krendang dan Pecah Kulit Jakarta Barat
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana UMKM bagi warga Rusun Jakarta Timur
 - Penyiapan Sarana dan Prasarana PKL di Jakarta Selatan
 - Penataan Pedagang Kaki Lima Perawatan Lokbin Pasar

Minggu Jakarta Selatan

- Penyiapan Sarana dan Prasarana PKL Lenggang Jakarta Islamic Center
- Pengadaan Sarana dan Prasarana PKL Jakarta Utara
- Renovasi Sarana dan Prasarana Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara Jakarta Utara
- Penyediaan Sarana dan Prasarana UMKM Bagi Warga Rusun Jakarta Utara
- Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - Pemeliharaan KDO/KDO Khusus
- Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - Penyediaan Jasa TALI
 - Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy
 - Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
 - Pengisian Alat Pemadam Api Ringan
 - Pengadaan Souvenir Dinas
 - Pemeliharaan Gedung dan Taman Dinas
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Jasa Perizinan dan BBM KDO/KDO Khusus
 - Peningkatan Administrasi Layanan Umum Daerah UPK PPUMKMP Pulogadung
- volume usaha koperasi dengan besar volume usaha Rp 8.249.503.97.915 di tahun 2017.
- Meningkatnya jumlah koperasi dari 8. koperasi di tahun 2016 menjadi 8.500 koperasi di tahun 2017

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan dengan jumlah pegawai sebanyak 194 orang. Sebagian pegawai Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan juga melaksanakan Urusan Perdagangan.

Tabel 3.94
Rekapitulasi Pegawai Urusan Koperasi dan UKM

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	194	
	1. Golongan IV	27	
	2. Golongan III	153	
	3. Golongan II	14	
	4. Golongan I	-	
B.	Eselon	194	
	1. Eselon I	-	
	2. Eselon II	1	
	3. Eselon III	10	
	4. Eselon IV	22	
	5. Eselon V	-	
	6. Fungsional	-	
	7. Pelaksana (Staf)	161	
C.	Pendidikan	194	
	1. S3	-	
	2. S2	23	
	3. S1	78	
	4. Diploma	17	
	5. SLTA	73	
	6. SLTP	3	
	7. SD	0	

Sumber : Dinas Koperasi UKM, serta Perdagangan Prov. DKI Jakarta. 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.95
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Koperasi dan UKM

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1	1	1
2	Eselon III	10	10	10	7	10
3	Eselon IV	22	22	22	16	22
Jumlah		33	33	33	24	33

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM. 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 33 / 33 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 24 / 36 = 72,73 %
- Kepangkatan : 33 / 33 = 100,00 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran untuk Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.96 Anggaran Urusan Koperasi dan UKM

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KOPERASI, USAHA MIKRO dan KECIL			
	195.813.738.567	160.762.281.334	82,10
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	148.367.809.403	125.879.923.306	84,84
2. BELANJA LANGSUNG	47.445.929.164	34.882.358.028	73,52
a. BELANJA PEGAWAI	2.478.737.965	2.229.241.340	89,93
b. BELANJA BARANG DAN JASA	44.780.904.922	32.473.271.288	72,52
Biaya Pemeliharaan	2.578.293.886	1.876.805.733	72,79
c. BELANJA MODAL	186.286.277	179.845.400	96,54
CATATAN :	-	-	-
Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	195.813.738.567	200.240.785.043	97,79
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	186.286.277	195.813.738.567	0,10
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	2.578.293.886	44.780.904.922	5,76
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	2.578.293.886	195.813.738.567	1,32

Sumber : BPKAD Prov. DKI Jakarta 2017

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Koperasi dan UKM tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.97
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi
Koperasi dan UKM

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin							Jumlah
		Dinas	JP	JU	JT	JS	JB	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	-	-	1	-	2	5
2.	Kotak Pengaduan	1	1	-	-	1	-	-	3
3.	Leaflet	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Mobil Keliling	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Media Masa	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Website	1	-	-	-	-	-	-	1
7.	E-mail	1	-	-	-	-	-	-	1
8.	Call Center	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM. 2017

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar merupakan *top down* karena melaksanakan kebijakan-kebijakan Pusat maupun Daerah. Namun demikian terdapat juga usulan-usulan masyarakat yang perlu diakomodasi yang disampaikan melalui Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan khususnya yang terkait dengan permodalan dan lokasi usaha.

Tabel 3.98
Sinkronisasi Perencanaan Program Urusan Koperasi dan UKM

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	6	RENJA SKPD : RKPD	100%
2	RENJA SKPD 2017	6	RKA : RENJA SKPD	100%
3	RKA 2017	6	DPA : RKA	100%
4	DPA 2017	6		

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM. 2017

h. Permasalahan dan solusi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyiapan Sarana dan Prasarana PKL Lenggang Jakarta Islamic Center yang dianggarkan hanya dapat terealisasi hanya sampai proses perencanaan, kegiatan pelaksanaan terkendala karena waktu untuk proses lelang dan tidak mencukupi.
- 2) Sarana prasarana Pusat Diklat kurang memadai untuk melakukan Diklat dengan jumlah peserta diatas 50 orang.
- 3) Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui 2 tahap. Pencairan tahap 2 tergantung dari laporan realisasi penyerapan tahap 1, sehingga anggaran tidak bisa direalisasi.
- 4) Beberapa sarana prasarana penunjang kinerja pegawai rusak, namun terkendala dalam usulan anggaran terkait pengadaan

Solusi yang telah ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala tersebut adalah melalui :

- 1) Mempersiapkan perencanaan kegiatan lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku dan pengaturan jadwal yang lebih efektif dan efisien.
- 2) Menggunakan beberapa angkatan untuk menampung jumlah peserta yang melebihi kapasitas ruangan.

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.99
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Koperasi dan UKM

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	1. Pergub Nomor 266 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan. 2. Pergub Nomor 308 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung 3. Pergub Nomor 310 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan.
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Pergub Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
3	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi	

11. Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Prioritas urusan

- Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan
- Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk
- Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan
- Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan
- Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 %, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.100
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan
2		Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4		Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
5		Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
6		Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
7		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Jml	2	7

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, 2017

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, terdapat 7 Program Daerah dalam Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :

Tabel 3.101
Program Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Program	Jumlah
1.	Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan	1
2.	Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40
3.	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan	17

No	Program	Jumlah
	Sipil	
4.	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat	9
5.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	63
6.	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	1
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	3
Total		134

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, 2017

Capaian kegiatan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.102
Realisasi Program Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan	1	1	100%
2	Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40	40	100%
3	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17	17	100%
4	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat	9	9	100%
5	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	63	63	100%
6	Program Pengelolaan Rumah Dinas Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	1	1	100%
7	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	3	3	100%
Jumlah		134	134	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Capaian SPM Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Standar Pelayanan Minimal	Tahun			
		2016		2017	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	Cakupan penerbitan kartu keluarga	100%	97,55%	100%	97,12%
2	Cakupan penerbitan kartu tanda	100%	98,67%	100%	97,96%

No	Standar Pelayanan Minimal	Tahun			
		2016		2017	
		Target	Capaian	Target	Capaian
	penduduk				
3	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	82%	92,96%	85%	99,97%
4	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	45%	83,79%	50%	99,99%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta

Dalam penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan daerah sebagai dasar operasional, yaitu :

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Akses Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilakukan melalui KPD yang menyelenggarakan urusan.

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang perangkatnya sampai ke Kelurahan.

Tabel 3.103
Rekapitulasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Klasifikasi	Jumlah Pegawai Dinas/Sudin								JML
		DIN	JP	JU	JT	JS	JB	PS	UPT	
A.	Golongan	69	64	51	70	80	90	15	22	461
	• Golongan IV	16	4	6	3	9	7	2	3	50
	• Golongan III	33	47	39	58	60	74	11	13	335
	• Golongan II	19	13	6	9	11	9	2	6	75
	• Golongan I	1	-	-	-	-	-	-	-	1
B.	Eselon	69	64	51	70	80	90	15	22	461
	• Eselon I	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Klasifikasi	Jumlah Pegawai Dinas/Sudin								JML
		DIN	JP	JU	JT	JS	JB	PS	UPT	
	• Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	• Eselon III	5	1	1	-	1	1	1	2	12
	• Eselon IV	16	12	10	12	13	12	5	2	82
	• Eselon V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Staf	47	51	40	58	66	77	9	18	366
C.	Pendidikan	69	64	51	70	80	90	15	22	461
	• S2	18	5	5	6	10	8	3	4	59
	• S1	20	30	22	22	34	36	6	8	178
	• Diploma	14	5	2	5	5	2	1	6	40
	• SLTA	16	21	22	36	28	43	4	4	174
	• SLTP	1	3	-	1	2	-	1	-	8
	• SD	-	-	-	-	1	1	-	-	2

Sumber : Dinas Dukcapil Prov. DKI Jakarta, 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.104
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendi-dikan	Diklat-pim	Pangkat
1	Dinas					
	a) Eselon II	1	1	1	1	1
	b) Eselon III	5	5	5	5	5
	c) Eselon IV	16	16	16	15	16
2	Sudin Jakpus					
	d) Eselon III	1	1	1	1	1
	e) Eselon IV	12	12	12	6	12
3	Sudin Jakut					
	f) Eselon III	1	1	1	1	1
	g) Eselon IV	10	10	10	6	10
4	Sudin Jakbar					
	h) Eselon III	1	-	-	-	-
	i) Eselon IV	12	12	12	5	12
5	Sudin Jaksel					
	j) Eselon III	1	1	1	1	1
	k) Eselon IV	14	13	13	8	13

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendi- dikan	Diklat- pim	Pangkat
6	Sudin Jaktim					
	l) Eselon III	1	1	1	1	1
	m) Eselon IV	14	13	13	8	15
7	Sudin Kep Seribu					
	n) Eselon III	1	1	1	1	1
	o) Eselon IV	5	5	5	5	5
8	UPDAK					
	p) Eselon III	1	1	1	1	1
	q) Eselon IV	1	1	1	-	1
9	UPTIK					
	r) Eselon III	1	1	1	1	1
	s) Eselon IV	1	1	1	1	1
	JUMLAH					
	t) Eselon II	1	1	1	1	1
	u) Eselon III	13	12	12	12	12
	v) Eselon IV	85	83	83	54	85
	TOTAL	99	96	96	67	96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : C / B = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : D / B = 70 %
- Kepangkatan : E / B = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas, UPT dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 268.102.288.794,-.

Tabel 3.105
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KEPENDUDUKAN Dan CATATAN SIPIL	268.102.288.794	228.629.365.749	85,28%
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	195.646.678.800	169.175.584.309	86,47%
2. BELANJA LANGSUNG		59.453.781.440	82,06%

	72.455.609.994		
a. BELANJA PEGAWAI	218.500.000	26.050.000	11,92%
b. BELANJA BARANG DAN JASA	64.969.082.744	53.830.386.864	82,86%
- Belanja Pemeliharaan	2.374.693.022	2.119.395.220	89,25%
c. BELANJA MODAL	7.268.027.250	5.597.344.576	77,01%
CATATAN PERBBANDINGAN :	-	-	-
Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	268.102.288.794	61.821.923.000.480	0,43%
BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	5.597.344.576	228.629.365.749	2,45%
Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	2.119.395.220	53.830.386.864	3,94%
Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	2.119.395.220	228.629.365.749	0,93%

Sumber : Monev 2017, Bappeda Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.106
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin							Jumlah
		DIN	JP	JU	JB	JS	JT	PS	
1.	Kotak Pengaduan	1	53	1	1	1	1	0	58
2.	Leaflet, Booklet, Buku Saku	15.000	200	1.450	400	1.200	0	0	18.250
3.	Mobil Operasional Keliling	1	3	3	3	3	3	0	16
4.	Motor Operasional Keliling	18	43	30	56	66	62	0	275
5.	Pengumuman di Media Masa	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Website	1	0	0	0	0	0	0	1
7.	Video Wall	0	0	0	0	0	1	0	1

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, 2017

CATATAN PERBANDINGAN :

Website : witter : @dukcapilJakpus @dukcapiljakbar

Sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian besar berupa alat-alat elektronik pengolah dan penyimpan data, berupa Personal Computer (PC), Server dan peralatan komputerisasi lainnya, serta alat-alat pendukung produk administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan pelayanan administrasi yang bersifat dasar, oleh karena itu kegiatannya bersifat *top down*. Meskipun demikian, forum Musrenbang tetap dilalui dalam proses perencanaan.

Tabel 3.107
Sikronisasi Perencanaan Program Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	7	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	7	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2017	7	RKA : DPA	100
4	DPA 2017	7	DPA : DPA-P	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, 2017

h. Permasalahan dan solusi

Tahun 2017 penerbitan Kartu Keluarga (KK) sejumlah 97,12 %. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 97,55%. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang belum mengganti KK lama ke KK baru. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sejumlah 97,96%. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 98,67%. Meskipun meningkat, jumlah ini belum memenuhi target tahun 2017 sebesar 100% dikarenakan tidak tersedianya blanko KTP-el dari Kemendagri. Persentase

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2017 berjumlah 99,97%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 92,96%. Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian tahun 2017 berjumlah 99,99%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya dengan persentase 83,79%.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.108
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan	Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3		Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Administrasi Kependudukan
4		Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Yang Tidak memiliki Surat Keterangan Kelahiran

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, 2017

Data jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta per-31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.109
Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Per-31 Desember 2017

No	KOTA/KAB	JUMLAH
1	Jakarta Pusat	1.139.285
2	Jakarta Utara	1.716.591
3	Jakarta Barat	2.327.258
4	Jakarta Selatan	2.190.919

No	KOTA/KAB	JUMLAH
5	Jakarta Timur	2.946.926
6	Kep. Seribu	27.591
	TOTAL	10.348.570

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, 2017

12. Ketenagakerjaan

a. Prioritas urusan

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja; Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4. Program Penguatan Sistem dan Fasilitas Pendukung Pusat Pelatihan Kerja
5. Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Ketenagakerjaan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.110
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Ketenagakerjaan

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
2	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitaas	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
3	Perlindungan Tenaga Kerja Dan Pengembangan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
	Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	
4	Pengembangan Hubungan Industrial Dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Program Penguatan Sistem dan Fasilitas Pendukung Pusat Pelatihan Kerja
5		Program Bersama Penunjang Organisasi Dan Teknis Bersama
Jml	4	5

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta 2017

Program Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta menyatu dengan Program Ketransmigrasian, karena dilaksanakan oleh Dinas yang sama, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tabel 3.111
Urusan Ketenagakerjaan

No	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	7
2.	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	123
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10
4.	Program Penguatan Sistem dan Fasilitas Pendukung Pusat Pelatihan Kerja	3
5.	Program Bersama Penunjang Organisasi Dan Teknis Bersama	185
	Jumlah	328

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Hasil yang dicapai pada Tahun 2017 dalam urusan ketenagakerjaan (dan ketransmigrasian) sebagai berikut.

Tabel 3.112
Realisasi Program Urusan Ketenagakerjaan

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	7	7	100,00

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
2.	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	123	123	100,00
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10	10	100,00
4.	Program Penguatan Sistem dan Fasilitas Pendukung Pusat Pelatihan Kerja	3	3	100,00
5.	Program Bersama Penunjang Organisasi Dan Teknis Bersama	185	185	100,00
	Jumlah	345	344	100,00

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta 2017

Capaian hasil kegiatan urusan ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut :

d. Program peningkatan kesempatan kerja

- Jumlah angkatan kerja di DKI Jakarta pada Agustus 2017 tercatat 4,856,116 orang, berkurang 322,723 orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2016 sebanyak 5,178,839 orang.
- Jumlah penduduk yang bekerja di DKI Jakarta pada Agustus 2017 sebesar 4,509,171 orang, berkurang sekitar 352,661 orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016 sebanyak 4,861,832 orang.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta pada Agustus 2017 sebesar 7,14 6,12 persen, mengalami kenaikan sebesar 1,02 persen bila dibandingkan TPT keadaan Agustus 2016 sebesar 7,14 persen. Secara absolut jumlah penganggur mengalami kenaikan sebanyak 29,938 orang, dari 317,007 orang pada Agustus 2016 menjadi 346,945 ribu orang pada Agustus 2017
- Penduduk bekerja keadaan Agustus 2017 di DKI Jakarta menurut tiga sektor utama menunjukkan bahwa tertinggi terdapat pada sektor services sebesar 3,684,752 orang (81,7 persen), kemudian diikuti oleh sektor manufacturing sebesar 807,901 orang (17,9 persen) dan terakhir sektor agriculture 807,901 orang (0,36 persen).
- Pada Agustus 2017, status pekerjaan pekerja yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan sebesar 3,079,173 orang (68,3%) diikuti berusaha sendiri sebesar

820,474 orang (18,2%), dan selebihnya adalah pekerja bebas sebesar 124,443 orang (2,8%), pekerja berusaha dibantu 333,915 (7,4%) orang, dan pekerja tidak di bayar 151,166 orang (3,4%).

- Pada bulan Agustus 2016 penduduk yang bekerja di sektor formal sebanyak 3,226,469 (71,6%), sedangkan 1,282,702 orang (28,4 %) bekerja pada sektor informal.
- Berdasarkan jumlah jam kerja pada Agustus 2017, sebanyak 4,005,136 orang (88,8%) bekerja 35 jam atau lebih per minggu, sedangkan yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 8 jam per minggu sebesar 47,442 ribu orang (1,1%).
- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 4,94 poin, yaitu dari 66,91 persen pada Agustus 2016 menjadi 61,97 persen pada Agustus 2017. TPAK laki-laki mengalami peningkatan sebesar 4,83 poin, yaitu dari 83,31 persen pada Agustus 2016 menjadi 78,48 persen pada Agustus 2017. TPAK perempuan juga mengalami peningkatan sebesar 5,02 poin, yaitu dari 50,58 persen pada Agustus 2016 menjadi 45,56 persen pada Agustus 2017.
- Pada Agustus 2017, penduduk yang bekerja yang berpendidikan Universitas / S1) sebanyak 835,192 orang (18,5%), Diploma 244,115 (5,4%) SMA 1,047,700 (23,2%), SMK 903,928 orang (20,04 persen), SMP 682,444 (15,1%), dan SD sebanyak 795,792 orang (17,6%)
- Pada Agustus 2017 Pengangguran yang berpendidikan Universitas sebanyak 41,750 orang (12,03%), Diploma 17,134 orang (4,9%) SMA 90,736 orang (26,2%), SMK 110,104 orang (31,7%), SMP 52,917 orang (15,3%) dan SD sebanyak 34,304 (9,9%). Pengangguran terbanyak menurut pendidikan adalah lulusan SMA Kejuruan, dan lebih khusus lagi lulusan Sekolah Menengah Umum di tambah menengah kejuruan
- Secara persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Selama periode Agustus 2016 – Agustus 2017, mengalami peningkatan 6,12 persen menjadi 7,4 persen, atau naik sebesar sebesar sebesar 1,02 persen. Menurut jenis kelamin, TPT laki laki mengalami peningkatan dari 6,48

persen menjadi 7,17 persen (naik 0,69 poin), sementara TPT perempuan mengalami peningkatan dari 5,53 persen menjadi 7,09 persen (naik 1,56 poin)

- Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2017, TPT untuk penduduk yang berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 10,86persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,97persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang berlebih terutama pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SMK dan SMA. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apasaja sehingga TPT nya relatif rendah. Hal ini terlihat dari TPT untuk mereka yang berpendidikan SD ke bawah merupakan yang terendah diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 4,13 persen
- Program peningkatan kesempatan kerja adalah program yang berupaya untuk memfasilitasi pencari kerja untuk menemukan perusahaan tempat bekerja yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Secara umum Program peningkatan kesempatan kerja adalah salah satu upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran di DKI Jakarta

**DATA PENCARI KERJA,LOWONGAN & PENEMPATAN YANG TERDAFTAR TAHUN 2017
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA**

NO	KOTAMADYA/KABUPATEN	PENCARI KERJA			LOWONGAN			PENEMPATAN		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KOTA JAKARTA SELATAN	1492	1249	2741	3693	2921	6614	1591	1254	2845
2	KOTA JAKARTA TIMUR	3606	3833	7439	2503	2861	4364	2552	1828	4380
3	KOTA JAKARTA PUSAT	2159	2068	4227	5207	5641	10848	1841	1996	3837
4	KOTA JAKARTA BARAT	3525	1906	5431	3325	1798	5123	3053	1659	4712
5	KOTA JAKARTA UTARA	2491	2363	4854	1985	1776	3761	1581	1495	3076
6	KOTA KEPULAUAN SERIBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		13273	11419	24692	16713	14997	30710	10618	8232	18850

Rincian Penempatan Tenaga Kerja		
1	Pelayanan Antar Kerja	20044
2	PPKD	3830
3	AKAN	406
4	AKAD	169
5	AKL	52
6	WUB	620
7	BKK	-
	Total Penempatan	25121

Data Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	
Pencaker	29,548
Penempatan	25,121
% Serapan Lakip	85,02%

Jumlah Pencari Kerja yang mengakses info lowongan kerja	
Jakarta Barat	5431 Orang
Jakarta Pusat	4227 Orang
Jakarta Selatan	2741 Orang
Jakarta Timur	7439 Orang
Jakarta Utara	4854 Orang
Dinas	55 Orang
Total	24747 Orang

- Terlaksananya Penempatan Tenaga kerja sebanyak 25,121 orang dari 29,548 pencari kerja atau sebesar 85,02% terserap di pasar kerja.
- Terlaksananya monitoring terhadap kelompok kerja WUB (Wira Usaha Baru), TKM (Tenaga Kerja Mandiri) dan TTG (Teknologi Tepat Guna) yang menyerap pencari kerja sebanyak 789 orang
- Terlaksananya penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar daerah (AKAD) melalui pembekalan orientasi prakeberangkatan sebanyak 169 orang.
- Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Kerja Wanita sebanyak 50 orang
- Tahun 2017 telah diselesaikan Temu Konsultasi Bursa Kerja Khusus bagi 50 SMK Penyediaan Informasi Pasar Kerja *off-line* dan *on-line* berupa *job-fair* dengan melibatkan 604 perusahaan, 30.710 lowongan kerja.
- Tahun 2017 telah diselesaikan realisasi pemberdayaan tenaga kerja Mandiri / Wira Usaha Baru (WUB) sebanyak 770 orang

e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- Tahun 2017 telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035,- yang sebelumnya tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750,-
- Jumlah Serikat Pekerja (SP) / Serikat Buruh (SB) tahun ditahun 2017 berjumlah 3.517 SP/SB meningkat 3,32 persen di bandingkan tahun 2016 berjumlah 3378.
- Federasi Serikat pekerja tahun 2017 berjumlah 143 federasi Serika pekerja bertambah 4 federasi dibandingkan tahun 2016 berjumlah 139 Federasi.
- Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh tahun 2017 berjumlah 7 konfederasi pekerja, tetap dibandingkan tahun 2016 berjumlah 7 konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit pada tahun 2017 berjumlah 857 Perusahaan bertambah 132 perusahaan dibandingkan tahun 2016 berjumlah 725 Perusahaan.
- Peraturan Perusaan (PP) ditahun 2017 berjumlah 6389 PP dibandingkan tahun 2016 berjumlah 4.909 PP mengalami peningkatan sebesar 30,14 persen.

- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ditahun 2017 berjumlah 676 PKB dibandingkan ditahun 2016 berjumlah 561 PKB, mengalami peningkatan sebesar 116 PKB atau 20 persen.
- Kebersertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan aktif tahun 2017 berjumlah 95.828 perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 4.893.575 pekerja, dibandingkan ditahun 2016 berjumlah 69.496 perusahaan, 4.119.646 pekerja.
- Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial (PHI), Perselisihan HAK ditahun 2016 berjumlah 278 kasus, perselisihan Kepentingan 33 kasus, PHK 953 kasus, Antar SP/SB tidak ada / Nihil Kasus.
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tahun 2016 Sebanyak 974 perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 2.646 orang.
- Mogok Kerja di tahun 2015 di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	KOTA	JUMLAH KASUS	T.K TERLIBAT
a.	JAK-BAR	6 KASUS	700 Org
b.	JAK-TIM	6 KASUS	1.965 Org
c.	JAK-PUS	2 KASUS	379 Org
d.	JAK-UT	37 KASUS	10802 Org
e.	JAK-SEL	6 KASUS	686 Org
Total		57 KASUS	14.532 Org

- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Perjanjian bersama (PB) sebanyak 258 kasus
- Tahun 2017 telah dihasilkan terlaksananya Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Bagi Pekerja Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) sebanyak 5000 orang.
- Tahun 2017 telah di hasilkan terlaksananya Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebanyak 1080 perusahaan.
- Tahun 2017 telah dihasilkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sebanyak 6000 orang.
- Tahun 2017 telah dihasilkan terselesaikannya Layanan Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan &

- Keselamatan Kerja pada tahun sebanyak 14 Pelatihan.
- Tahun 2017 telah dihasilkan Terlaksananya pemeriksaan norma ketenagakerjaan di Tempat Kerja sebanyak 6543 Perusahaan
- Tahun 2017 telah dihasilkan Terlaksananya pemeriksaan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja sebanyak 1432 Perusahaan
- Tahun 2017 Jumlah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan sebanyak 317 Perusahaan

f. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

- Tahun 2017 telah dihasilkan Terlaksananya pelatihan kerja di 7 (tujuh) Pusat Pelatihan Kerja sebanyak 5316 orang,
- Tahun 2017 telah dihasilkan Terlaksananya pelatihan Satuan Pengamanan sebanyak 425 orang
- Tahun 2017 telah dihasilkan terlaksananya Pelatihan Pengemudi SIM A sebanyak 1700 orang,
- Tahun 2017 telah dihasilkan terlaksananya pelatihan kerajinan tangan di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 100 orang.
- Tahun 2017 telah dihasilkan Meningkatnya Lembaga Pelatihan ter-Akreditasi dari Pembinaan Manajemen Lembaga Pelatihan Kerja-Swasta (LPK-S) sebanyak 65 Lembaga pada tahun 2017 dari sebanyak 50 lembaga pada tahun 2016

g. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebagian dari pegawai tersebut juga melaksanakan urusan ketransmigrasian.

Tabel 3.113
Rekapitulasi Pegawai Urusan Ketenagakerjaan

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	513	
	1. Golongan IV	96	
	2. Golongan III	385	
	3. Golongan II	31	
	4. Golongan I	1	
B.	Eselon	513	
	1. Eselon I	-	
	2. Eselon II	1	

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
	3. Eselon III	18	
	4. Eselon IV	43	
	5. Eselon V	-	
	6. Fungsional	156	
	7. Pelaksana (Staf)	295	
C.	Pendidikan	513	
	1. S3	1	
	2. S2	65	
	3. S1	284	
	4. Diploma	25	
	5. SLTA	131	
	6. SLTP	3	
	7. SD	4	

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.114
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Ketenagakerjaan

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1	1	1
2	Eselon III	19	19	19	15	19
3	Eselon IV	43	43	43	38	43
Jumlah		63	63	63	53	63

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan :

- Tingkat Pendidikan : $63 / 63 = 100,00 \%$
- Diklat Kepemimpinan : $53 / 63 = 84,12 \%$
- Kepangkatan : $63 / 63 = 100,00 \%$

h. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.115
Alokasi dan Realisasi Urusan Ketenagakerjaan

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN WAJIB (KETENAGAKERJAAN)	268,875,112,588	251,477,554,300	93,53%
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	194,512,511,080	188,849,249,311	97,09%
2. BELANJA LANGSUNG	74,362,601,508	62,628,304,989	84,22%
a. BELANJA PEGAWAI			
b. BELANJA BARANG DAN JASA	75,535,016,215	61,885,735,432	84,16%
Belanja Pemeliharaan	1,663,128,209	1,463,981,916	88,03%
c. BELANJA MODAL	827,585,293	742,569,557	89,73%
CATATAN :			
Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	268,875,112,588	251,477,554,300	93,53%
BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	827,585,293	742,569,557	89,73%
Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang Jasa	1,663,128,209	1,463,981,916	88,03%
Belanja Pemeliharaan : Belanja Pegawai			

Sumber : LKPD 2017 *unaudited*, BPKD Prov. DKI Jakarta

i. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Ketenagakerjaan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.116
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Ketenagakerjaan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin/UPT								Jml
		Prov	J P	J U	J T	J S	J B	K P	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1	10	17
2.	Kotak Pengaduan	1	1	1	1	1	1	1	10	17
3.	Leaflet	4	4	4	4	4	4	4	10	38

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin/UPT								Jml
		Prov	J P	J U	J T	J S	J B	K P	UPT	
4.	Mobil Keliling	0							10	10
5.	Media Masa	4	2	2	2	2	2	2	20	36
6.	Website	1								1
7.	E-mail	2	1	1	1	1	1	1	10	18

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta 2017

Catatan :

- Website : disnakertrans.jakarta.go.id
- E-mail : disnakertrans@jakarta.go.id,
bidang.program@gmail.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa sarana pendukung peningkatan kualitas ketenagakerjaan khususnya yang berupa UPT.

Tabel 3.117
Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Pusat Pelatihan Kerja Daerah	5
2	Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las Condet	1
3	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI)	1
4	Pusat Higiene Perusahaan, kesehatan dan Keselamatan Kerja	1
5	Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D)	1
Jumlah		9

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta 2017

j. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Pelaksanaan pembangunan pada Urusan Ketenagakerjaan tidak hanya yang dibiayai oleh APBD tetapi juga terdapat kegiatan yang dibiaya oleh APBN melalui kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Kegiatan dari APBD direncanakan melalui forum Musrenbang yang dipandu oleh Bappeda, sementara kegiatan APBN merupakan penjabaran dari program pemerintah.

Tabel 3.118
Sinkronisasi Perencanaan Program Urusan Ketenagakerjaan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	6	RENJA SKPD : RKPD	100,00
2	RENJA SKPD 2017	6	RKA : RENJA SKPD	100,00
3	RKA 2017	6	DPA : RKA	100,00
4	DPA 2017	6		

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta 2017

k. Permasalahan dan solusi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Masih minimnya pejabat fungsional penempatan pencari kerja di perusahaan dan jumlahnya terus menurun akibat adanya pejabat fungsional yang pensiun sehingga penurunan jumlah pengangguran kurang signifikan
- Informasi Kesempatan kerja yang belum sampai kepada pencari kerja.
- Kesenjangan antara lowongan kerja dengan kompetensi pencari kerja sehingga lowongan kerja tidak terisi oleh pencari kerja yang terdaftar
- Sarana pelatihan di Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang belum mengikuti perkembangan teknologi.
- Jumlah instruktur di Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang kurang dari kebutuhan pelatihan.
- Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk melaksanakan peraturan di bidang ketenagakerjaan.
- Kurang jumlahnya pejabat fungsional mediator yang menangani perselisihan hubungan industrial
- Kurangnya jumlah pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan berbanding jumlah perusahaan di DKI Jakarta
- Kurang optimalnya sistem informasi manajemen dalam mengelola data sehingga laporan berbasis data kurang maksimal.

Solusi yang telah ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala tersebut diatas adalah melalui:

- Sosialisasi lowongan kerja dan informasi kesempatan kerja

melalui acara *Job Fair* dan peluncuran Bursa Kerja *On Line* pada www.bkol-dkijakarta.com yang dapat menarik minat pencari kerja untuk mengunjunginya.

- Informasi Pasar Kerja yang terus dikembangkan baik melalui *Leaflet*, Brosur, dan Bursa Kerja *On Line*.
- Revitalisasi pada Pusat Pelatihan Kerja (PPK) maupun Pusat Pelatihan Kerja PPK / PPKD di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui pembenahan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi.
- *Up Grading* dan Pendidikan Latihan bagi Instruktur sehingga *outcome*-nya dapat memenuhi kebutuhan pelatihan pada beberapa kejuruan di Pusat Pelatihan Kerja (PPK) maupun Pusat Pelatihan Kerja Daerah.
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja terus dilakukan dalam rangka menciptakan ketenangan bekerja baik untuk Pengusaha dan Pekerjanya.
- Senantiasa memberdayakan PPKD, PPKPI Pasar Rebo dan PPKKPL Condet dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- Proaktif menjalin hubungan dengan para pengusaha dalam menempatkan tenaga kerja
- Meningkatkan pembinaan pelaksanaan PP, PK, PKB agar tercipta hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja untuk mengurangi terjadinya perselisihan hubungan industrial
- Sosialisasi dan pembinaan K3 di perusahaan untuk mengurangi jumlah kecelakaan kerja pada perusahaan di Provinsi DKI Jakarta
- Mengadakan bimtek tenaga fungsional pengawas, mediator, instruktur, pengantar kerja untuk meningkatkan kinerja dalam pengawasan perusahaan, penanganan perselisihan, peningkatan mutu pelatihan, peningkatan pendataan lowongan kerja di perusahaan

I. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Urusan Ketenagakerjaan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.119 Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Ketenagakerjaan**

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	- Perda 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan - Perda 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah	1. Pergub Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 2. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 3. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 74 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Produktivitas; 4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyiapan Tenaga Kerja; 5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri; 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
		Pusat Pelatihan Kerja Daerah; 7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las; 8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 165 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat 9. Pergub Nomor 123 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014;

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta 2017

13. Ketahanan Pangan

a. Prioritas Urusan

Program Prioritas Urusan Ketahanan Pangan adalah :

- Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi / pemasaran.

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Ketahanan Pangan yang dapat dilaksanakan oleh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.120
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Ketahanan Pangan

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi / pemasaran
Jml	1	1

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2017

Program Urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Pertanian sebanyak 7 program 52 kegiatan. Adapun program Urusan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.121
Program Urusan Ketahanan Pangan Dinas Kelautan dan Pertanian

No.	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran	9
2.	Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil tanaman pangan & hortikultura	7
3.	Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil perikanan	7
4.	Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan produk hewan (kesmavet)	8
5.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketahanan Pangan	129
6.	Program Pengelolaan Rumah Dinas Urusan Ketahanan Pangan	7
7.	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Ketahanan Pangan	1
	Total	168

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Pencapaian kinerja program dan kegiatan urusan ketahanan pangan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.122
Realisasi Program Urusan Ketahanan Pangan
Dinas Kelautan dan Pertanian

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran	9	9	100
2.	Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil tanaman pangan & hortikultura	7	7	100
3.	Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil perikanan	7	7	100

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
4.	Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan produk hewan (kesmavet)	8	8	100
5.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketahanan Pangan	129	129	100
6.	Program Pengelolaan Rumah Dinas Urusan Ketahanan Pangan	7	7	100
7.	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Ketahanan Pangan	1	1	100
	Total	168	168	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2017

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini baru memiliki 2 regulasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan, yaitu :

- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 190 Tahun 2010 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian.

Ketersediaan pangan utama di Provinsi DKI Jakarta selalu dijaga, karena dapat berdampak luas terhadap perekonomian daerah maupun perekonomian nasional. Untuk ketersediaan pangan utama beras berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun Anggaran 2017 sebesar 1.162.671 ton. Pasokan beras berasal dari Sragen, Klaten, Tegal, Pemalang, Ponorogo, Jember, Banyuwangi, Indramayu, Cirebon, Cianjur, Bandung, dan sejumlah daerah lainnya.

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Pertanian, dengan jumlah pegawai 227 orang (termasuk di dalamnya Suku Dinas dan UPT).

Tabel 3.123
Rekapitulasi Pegawai Urusan Ketahanan Pangan

No.	Klasifikasi	Jumlah Pegawai Dinas/Sudin/UPT								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	Kep. 1000	UPT	
A.	Golongan	31	9	7	14	12	13	3	144	233
	• Golongan IV	5	2	1	2	4	3		19	36
	• Golongan III	18	6	5	11	7	9	3	99	158
	• Golongan II	7	1	1	1	1	1		26	38
	• Golongan I	1								1
B.	Eselon	31	9	7	14	12	13	3	144	233
	• Eselon II									0
	• Eselon III	1							3	4
	• Eselon IV	4	3	2	4	4	3	1	3	24
	• Fungsional	4			2				21	27
	• Staf	22	6	5	8	8	10	2	117	178
C.	Pendidikan	31	9	7	14	12	13	3	144	233
	• S3								1	1
	• S2	13	2	1	2	3	2	1	13	37
	• S1	11	5	3	6	5	6	1	51	88
	• Diploma						1		17	18
	• SLTA	7	2	3	6	3	4	1	52	78
	• SLTP					1			5	6
	• SD								5	5

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.124
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan Ketahanan Pangan

No.	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan Yang Terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Dinas					
	• Eselon II					
	• Eselon III	1	1	1	1	1

No.	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan Yang Terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
	• Eselon IV	4	4	4	3	4
2	Sudin Jakpus					
	• Eselon III					
	• Eselon IV	3	3	3	2	3
3	Sudin Jakut					
	• Eselon III					
	• Eselon IV	2	2	2	2	2
4	Sudin Jaktim					
	• Eselon III					
	• Eselon IV	4	4	4	3	4
5	Sudin Jaksel					
	• Eselon III					
	• Eselon IV	4	4	4	3	4
6	Sudin Jakbar					
	• Eselon III					
	• Eselon IV	3	3	3	3	3
7	Sudin Kep. Seribu					
	• Eselon III					
	• Eselon IV	1	1	1	1	1
8.	UPT					
	• Eselon III	3	3	3	3	3
	• Eselon IV	3	3	3	3	3
	JUMLAH					
	• Eselon II	0	0	0	0	0
	• Eselon III	4	4	4	4	4
	• Eselon IV	24	24	24	20	24
	TOTAL	28	28	28	24	28

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 28 / 28 = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : 24 / 28 = 85,71%
- Kepangkatan : 28 / 28 = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Ketahanan Pangan pada Dinas Kelautan dan Pertanian tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.125
Alokasi Program Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan
pada Dinas Kelautan dan Pertanian

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KETAHANAN PANGAN	52.554.334.078	45.032.959.244	85,69
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2. BELANJA LANGSUNG	52.554.334.078	45.032.959.244	85,69
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	0,00
b. BELANJA BARANG DAN JASA	40.199.909.338	33.158.239.244	82,48
- Belanja Pemeliharaan	2.944.493.336	1.957.364.328	66,48
c. BELANJA MODAL	12.354.424.740	11.874.720.000	96,12
CATATAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	52.554.334.078	57.365.040.315.366	0,09
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	11.874.720.000	45.032.959.244	26,37
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	1.957.364.328	33.158.239.244	5,90
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	1.957.364.328	45.032.959.244	4,35

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Ketahanan Pangan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana informasi yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.126
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi
Ketahanan Pangan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin/UPT								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	2	1	1	1	1	1	1	3	11
2.	Website	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3.	E-mail	2	1	1	1	1	1	1	3	11
4.	Call Center	2	1	1	1	1	1	1	3	11

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2017

Catatan :

Provinsi

- Website : dkpjakarta.web.id
- E-mail : dkp.jakarta@yahoo.com
- Call Center : 021 6285277, 021 6007251

Jakarta Pusat

- E-mail : tan_hut_jp@yahoo.com
- Call Center : 021 3851854

Jakarta Utara

- E-mail : sudinpertanian@yahoo.com
- Call Center : 021 4358783

Jakarta Timur

- E-mail : sudin_tanhut_jaktim@yahoo.com
- Call Center : 021 4808335

Jakarta Selatan

- Call Center : 021 7205794

Jakarta Barat

- E-mail : sudintanhutjakbar@yahoo.co.id
- Call Center : 021 58356239

Kepulauan Seribu

- E-mail : ikanseribu@yahoo.com
- Call Center : 021 58356239

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasionalisasi Urusan Ketahanan Pangan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.127
Sarana dan Prasarana Urusan Ketahanan Pangan

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian	1
2.	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan&Pengujian Mutu Hasil Peternakan	1
3.	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	1

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2017

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Ketahanan Pangan merupakan gabungan *bottom up* dan *top down* planning, yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Kota/Kabupaten Administrasi dan Badan Perencanaan Daerah.

Tabel 3.128
Sinkronisasi Perencanaan Program Urusan Ketahanan Pangan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	1	RENJA SKPD : RKPD	100,00
2	RENJA SKPD 2017	1	RKA : RENJA SKPD	100,00
3	RKA 2017	1	DPA : RKA	100,00
4	DPA 2017	1		

Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2017

h. Permasalahan dan solusi

- DKI Jakarta dengan penduduk yang besar merupakan daerah potensial tujuan pemasaran, sehingga kekurangan akan ketersediaan pangan dapat diatasi. Namun masih terdapat warga yang belum mampu mencukupi kebutuhan dasarnya tersebut dengan baik. Oleh sebab itu perlu pembinaan dan bantuan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Untuk memantau kualitas pasokan bahan pangan yang masuk ke DKI Jakarta perlu dibuat Agro Check Point.
- Suplai produk hasil pertanian berasal dari luar Jakarta, sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan daerah produsen.

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

- Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Ketahanan Pangan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.129 Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Ketahanan Pangan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Peraturan Perda/Pergub
1	Keputusan menteri Pertanian No. 481/KPTS/OT.2210/5/98 tentang Penerapan Standarisasi Komoditas Hasil	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
	Pertanian	Pertanian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2	Keputusan menteri Pertanian No. 481/KPTS/OT.2210/5/98 tentang Penerapan Standarisasi Komoditas Hasil Pertanian	Pergub Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 190 Tahun 2010 tentang Pengendalian Mutu dan keamanan Komoditas Hasil pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2017

- Pasokan bahan pangan ke DKI Jakarta dan juga beberapa daerah lain berpusat di beberapa pasar induk yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain Pasar Induk Kramat Jati (sayuran dan buah-buahan) dan Pasar Induk Beras Cipinang. Pasokan bahan pangan tersebut dapat dipantau baik dari segi kualitas, kuantitas maupun harga.

Pada tahun 2017 Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 88.

- Untuk meningkatkan mutu hasil perikanan masih menghadapi kendala seperti penggunaan bahan kimia berbahaya, penerapan PMMT masih rendah dan sarana/prasarana belum memadai. Usaha-usaha peningkatan mutu hasil perikanan terus dilakukan melalui penyediaan sarana/prasarana sesuai standard mutu, penerapan penanganan/ pengolahan yang baik, pengawasan/pemeriksaan melalui pengujian mutu hasil perikanan, termasuk dilakukan oleh unit pengujian mutu lebih memantapkan kompetensi dan otoritasnya sebagai lembaga yang diberi tanggungjawab untuk melakukan sertifikasi hasil perikanan untuk dikonsumsi manusia. Pemantapan kompetensi tersebut mengacu pada ISO 17025, ISO 17020 dan ISO 19011.

Pencapaian RPJMD tahun 2017

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KINERJA 2015	KINERJA 2016	KINERJA 2017
1	Jumlah ketersediaan pangan :			
	Persentase Pasokan Beras	100%	103,00%	100%
	Persentase Pasokan Daging	100%	146,45%	100%
	Persentase Pasokan Ikan	100%	333,00%	100%
	Persentase Pasokan Ayam	100%	245,52%	100%
	Persentase Pasokan Telor dan Susu	100%	503,60%	100%
	Persentase Pasokan Sayur Mayur	100%	100,66%	100%
	Persentase Pasokan Buah-buahan	100%	130,35%	100%

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KINERJA 2015	KINERJA 2016	KINERJA 2017
2	Skor pola pangan harapan	88	83,60%	
1	persentase buah dan sayur di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya	95,90% baik / aman	91,25 % baik / aman	99,820 % baik / aman
2	Jumlah sertifikat hasil uji hasil tanaman pangan dan hortikultura yang dikeluarkan	4.233 sertifikat	1.904 sertifikat	1.720 sertifikat
1	persentase ikan dan olahan ikan di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya	99,11 % baik / aman	98,23 % baik / baik	99,57 % baik / aman
2	Jumlah sertifikat hasil uji hasil perikanan yang di keluarkan	10.991 sertifikat (SME)	29.052 sertifikat	61.583 sertifikat
1	persentase daging dan olahannya yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya	93 % baik / aman	99,88 % baik / aman	99,68 % baik / aman
2	Jumlah sertifikat hasil uji produk hewan yang di keluarkan	15.768 sertifikat	20.201 Sertifikat	18.023 Sertifikat
3	Jumlah sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang diberikan	70 Sertifikat	136 sertifikat	164 sertifikat

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2017

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Prioritas urusan

Terdapat 4 (empat) Program Prioritas Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 yang dilaksanakan di 1 (satu) SKPD dan 6 (enam) UKPD 6 (enam) Sudin PPAPP Kab/Kota Adm, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan

Indikator yang akan dicapai antara lain:

- Jumlah Kelurahan Layak Anak
- Persentase Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan

Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat dilaksanakan oleh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.130
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Forum Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan
2	Kota Layak Anak	
Jml	2	1

Pada tahun anggaran 2017 terdapat 1 program dengan 3 kegiatan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.131
Program Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun 2012

No	Program	Jumlah Kegiatan
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan	3
Jumlah		3

Sumber : DPPAPP Prov. DKI Jakarta 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Pencapaian kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 sebesar 100%.

Tabel 3.132
Realisasi Program Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun 2017

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak dan Perempuan	3	3	100
	Jumlah	3	3	100

Sumber : DPPAPP Prov. DKI Jakarta 2017

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dengan jumlah pegawai sebanyak 13 orang. Dimana sebagian pegawai tersebut juga melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa dan urusan keluarga berencana Rincian pegawai sebagai berikut :

Tabel 3.133
Rekapitulasi Pegawai Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	13	
	• Golongan IV	2	
	• Golongan III	10	
	• Golongan II	1	
	• Golongan I		
B.	Eselon	13	
	• Eselon I		
	• Eselon II		
	• Eselon III		
	• Eselon IV	3	
	• Eselon V		
	• Fungsional Khusus		
	• Fungsional Umum (staf)	10	
C.	Pendidikan	13	
	• S3		
	• S2	2	
	• S1	9	
	• Diploma	1	

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
	• SLTA		
	• SLTP		
	• SD		

Sumber : DPPAPP, 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.134
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendi-dikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	0	0	0	0	0
2	Eselon III	0	0	0	0	0
3	Eselon IV	3	3	3	2	3
	TOTAL	3	3	3	2	3

Sumber : DPPAPP 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 3 / 3 = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : 2 / 3 = 67 %
- Kepangkatan : 3 / 3 = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melekat pada Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut.

Tabel 3.135
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

URAIAN	ALOKAS (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Dan PERLINDUNGAN ANAK	98.772.000	89.472.000	90,58
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2. BELANJA LANGSUNG	98.772.000	89.472.000	90,58
a. BELANJA PEGAWAI			
b. BELANJA BARANG DAN			

URAIAN	ALOKAS (Rp)	REALISASI (Rp)	%
JASA			
- Belanja Pemeliharaan			
c. BELANJA MODAL			
CATATAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : APBD			
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN			

Sumber : LKPD 2017 *unaudited*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.136 Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Jenis Fasilitas/Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kotak Pengaduan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Leaflet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Mobil Keliling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Media Masa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Website	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	1	8
9.	Roll Banner	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : DPPAPP 2017

CATATAN PERBANDINGAN : PERBBANDINGAN

Website : <http://dkijakarta.bkkbn.go.id/>

Tabel 3.137
Jenis Sarana dan Prasarana BPMP & KB

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Gedung BPMP dan KB Provinsi DKI Jakarta	1
2.	Gedung Kantor P2TP2A	1
3.	Kendaraan dinas (Kijang Super)	1

Sumber : DPPAPP 2017

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara terpadu dengan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih banyak bersifat top down, namun dalam implementasinya banyak melibatkan masyarakat secara langsung baik melalui kelembagaan maupun individu.

Tabel 3.138
Sikronisasi Perencanaan Program
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	1	RENJA SKPD : RKPD	100,00
2	RENJA SKPD 2017	1	RKA : RENJA SKPD	100,00
3	RKA 2017	1	DPA : RKA	100,00
4	DPA 2017			

Sumber : BPMPKB 2017

h. Permasalahan dan solusi

Kendala pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta solusinya antara lain :

- Kendala :
Persentase SKPD/UKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG) masih

relative kecil yaitu sebesar 76,92%. Hal itu disebabkan karena pemahaman tentang PPRG belum optimal

Solusi :

1. Pemahaman dan wawasan tentang PPRG perlu ditingkatkan
2. Pemahaman dan wawasan tentang PPRG perlu ditingkatkan
3. Temu kordinasi SKPD yang berkelanjutan
4. Kegiatan PPRG sudah diusulkan tetapi di dalam penyisiran Tim Gubernur tidak diakomodir, untuk itu kegiatan tersebut agar bisa diakomodir tahun berikutnya

- Kendala :

Jumlah Kelurahan Layak Anak tahun 2017 sebanyak 76 Kelurahan hal itu dikarenakan dalam kegiatan KLA tidak semua SKPD paham dengan KLA sehingga dari 31 indikator pencapaian sangat minim.

Solusi :

Melakukan koodinasi yang berkelanjutan ke SKPD yang terkait sehingga 31 indikator diharapkan bisa tercapai

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.139
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
	Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah	176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.
2.	Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 218 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 2008 tentang Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di daerah.	Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah	1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 218 Tahun 2010 tentang Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
		2) Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 630 Tahun 2010 Pembentukan Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak
		3) Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1192/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak
5	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
		Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender.

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
		Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
		Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Prioritas urusan

Terdapat 4 Program Prioritas Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2017 di DKI Jakarta, yaitu :

- 1) Program Keluarga Berencana
- 2) Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja.
- 3) Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.
- 4) Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

b. Program dan kegiatan

Program Nasional Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.140 Program Nasional dan Program Provinsi Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana (KB)
2	Kesehatan Reproduksi Remaja	Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja
3	Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
4	Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
5	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	
Jml	5	4

Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun 2017 melaksanakan 4 (tiga) program dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.141
Program Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Keluarga Berencana (KB)	5
2.	Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja	1
3.	Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	3
4.	Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1
Jumlah		10

Sumber : DPPAPP Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Kegiatan dan pencapaian kegiatan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut.

Tabel 3.142
Pencapaian Peserta Keluarga Berencana Baru

No	Program	Jumlah SubKegiatan	Realisasi	%
1.	Program Keluarga Berencana (KB)	6	5	83,33
2.	Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja	1	1	100
3.	Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	3	3	100
4.	Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1	1	100
Jumlah		11	10	95,83

Sumber DPPAPP Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

Tabel 3.143 **Data Tingkat Kesejahteraan Keluarga Tahun**
Tingkat Kesejahteraan

No	Kota/ Kabupaten	Tingkat Kesejahteraan					Jumlah
		Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III +	
1.	Jak. Pusat	-	37.049	75.368	54.620	17.769	185.166
2.	Jak. Utara	3.895	49.240	146.215	105.283	32.800	337.433
3.	Jak. Timur	8.427	88.195	218.203	180.211	49.799	544.835
4.	Jak. Selatan	161	23.322	113.607	151.530	56.592	345.212

5.	Jak. Barat	376	50.090	155.334	132.212	43.504	381.516
6.	Kep.Seribu	558	1.032	2.744	1.628	5	5.967
Jumlah		13.417	249.288	711.471	625.484	200.469	1.800.129

Sumber : DPPAPP Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera secara fungsional Tahun 2017 dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, dengan jumlah pegawai sebanyak 28 orang.

Tabel 3.144
Rekapitulasi Pegawai Urusan KB dan Keluarga Sejahtera

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	28	
	• Golongan IV		
	• Golongan III		
	• Golongan II		
	• Golongan I		
B.	Eselon	28	
	• Eselon I		
	• Eselon II		
	• Eselon III		
	• Eselon IV		
	• Eselon V		
	• Fungsional Khusus		
	• Fungsional Umum (staf)		
C.	Pendidikan	28	
	• S3		
	• S2		
	• S1		
	• Diploma		
	• SLTA		
	• SLTP		
	• SD		

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta, 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.145
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan KB dan Keluarga Sejahtera

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendi-dikan	Diklat-pim	Pangkat
1	Eselon II	0	0	0	0	0
2	Eselon III	2	2	2	2	2
3	Eselon IV	6	4	4	4	4
	Jumlah	8	6	6	6	6

Sumber : DPPAPP Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 6/6 100%
- Diklat Kepemimpinan : 6/6 100%
- Kepangkatan : 6/6 100%

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun anggaran 2017 melekat pada anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga.

Tabel 3.146
Alokasi dan Realisasi Anggaran BPMP & KB

URAIAN	ALOKASI (Rp)	RELAISASI (Rp)	%
ANGGARAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEHAT	13.877.902.001	13.298.253.083	95,82
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2. BELANJA LANGSUNG	13.877.902.001	13.298.253.083	95,82
a. BELANJA PEGAWAI			
b. BELANJA BARANG DAN JASA			
- Belanja Pemeliharaan			
c. BELANJA MODAL			
CATATAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD			
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN			

Sumber : LKPD 2017 *unaudited*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan KB dan Keluarga Sejahtera tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.147 Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi KB dan Keluarga Sejahtera

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada BPMKB/Kantor KB/PMPKB								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.	Kota Pengaduan	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.	Leaflet	4.830	0	0	0	0	0	0	0	4.830
4.	Spanduk	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.	Mobil Keliling	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6.	Media Masa	4	-	-	-	-	-	-	-	4
7.	Website	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8.	E.mail	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Sumber : DPPAPP Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

CATATAN PERBANDINGAN : PERBBANDINGAN :

- Website : <http://dkijakarta.bkkbn.go.id>

Sarana dan prasarana KB dan Keluarga Sejahtera yang berupa gedung dan kendaraan bermotor sebagaimana pada Tabel 3.152.

Tabel 3.148 Sarana dan Prasarana BPMP&KB

No	Jenis Asset	Jumlah
1.	Gedung BPMP dan KB Provinsi DKI Jakarta	1
2.	Gedung Kantor LPMJ	1
3.	Gedung Diklat KB-KS Prov. DKI Jakarta	1
4.	Gedung Gudang BPMPKB Prov. DKI Jakarta	1
5.	Rumah Dinas Kepala	1
6.	Rumah Dinas Esselon III	6
7.	Gedung Kantor KB Jakarta Pusat	1
8.	Gedung Kantor KB Jakarta Utara	1
9.	Gedung Kantor KB Jakarta Barat (dipinjam	1

No	Jenis Asset	Jumlah
	KPU)	
10.	Gedung Kantor KB Jakarta Selatan	1
11.	Gedung Kantor KB Jakarta Timur	1
12.	Kendaraan Dinas (Isuzu Panther)	2
13.	Kendaraan Dinas (Daihatsu Zebra)	1
14.	Kendaraan Dinas (Kijang Super)	1
15.	Kendaraan Dinas (Mitsubishi Colt L300)	1
16.	Kendaraan Pengangkut Barang (Truk/Load Back)	1
17.	Mobil Unit Pelayanan KB	5
18.	Mobil Penerangan dan Motivasi KB	1
19.	Kendaraan Dinas Kantor KB Kota Administrasi	8

Sumber : DPPAPP Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilakukan secara terpadu dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan terintegrasi antara keterpaduan perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning) dan perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) karena untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan Pusat maupun Daerah.

Tabel 3.149
Sikronisasi Perencanaan Program KB dan Keluarga Sejahtera

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	3	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	3	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2017	3	RKA : DPA	100
4	DPA 2017			

Sumber DPPAPP Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

h. Permasalahan dan solusi

Permasalahan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain :

Permasalahan:

Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif realisasi indikatornya hanya mencapai 67,15 hal ini disebabkan karena, belum maksimalnya partisipasi pria khususnya Metode Operasi Pria/MOP.

Solusi:

Untuk itu hal yang harus dilakukan adalah Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Metode Operasi Pria/MOP

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

- 1) Urusan KB dan KS diarahkan untuk menurunkan Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total dari 2,3 hasil SDKI Tahun 2012 menjadi 2,1 pada Tahun 2017, memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB gratis, serta jaminan ketersediaan alat kontrasepsi terutama untuk PUS yang berdomisili di DKI Jakarta. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak melalui berbagai kelompok kegiatan keluarga, serta pemberdayaan ketahanan keluarga peserta KB khususnya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, untuk mewujudkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan keluarga melalui kegiatan usaha ekonomi produktif.
- 2) Diterimanya Penghargaan/Hasil Lomba Tk.Nasional Tahun 2017, yaitu :
 - Diterimanya penghargaan Juara 1 Nasional Pentaloka Saka Kencana pada Kepemimpinan Putra Duta GenRe Indonesia Tahun 2017 yang diselenggarakan BKKBN

- Diterimanya penghargaan Juara 2 Nasional Pentaloka Saka Kencana pada Putra Duta GenRe Indonesia Tahun 2017 yang diselenggarakan BKKBN.
- Diterimanya penghargaan Juara 3 Nasional Pentaloka Saka Kencana pada Putri Duta GenRe Indonesia Tahun 2017 yang diselenggarakan BKKBN.
- Diterimanya penghargaan Juara 2 Tingkat Nasional dalam kategori KB Perusahaan yang diselenggarakan oleh BKKBN Tahun 2017.
- Diterimanya penghargaan Juara 3 Tingkat Nasional dalam kategori Kader BKR Teladan yang diselenggarakan oleh BKKBN Tahun 2017

Tabel 3.150
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan KB dan Keluarga Sejahtera

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
		Pergub Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana
2	Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B.5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan KB	Pergub Nomor 162 Tahun 2011 tentang Pelayanan Keluarga Berencana
3		Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 186 Tahun 2012 tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
4		Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja